

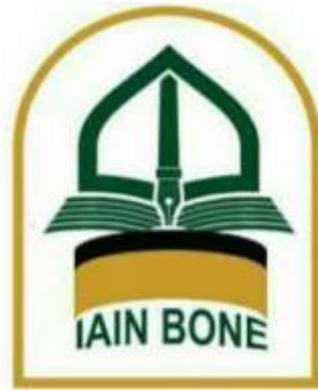
HASIL PENELITIAN HIBAH DOSEN BOPTN Tahun 2020

Oleh:

**Dr. Syaparuddin, S.Ag., M.SI.
Prof. Dr. Andi Nuzul, SH., M.Hum.**

**SK. Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 50 Tahun 2020
Tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Perguruan
Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Institut Agama Islam Negeri Bone Tahun 2020**

**KONSTRUKSI SOSIAL KEAGAMAAN
ATAS PENGUATAN KETAHANAN
PANGAN DI DAERAH
(STUDI TENTANG STABILITAS KETERSEDIAAN PANGAN
DI KAWASAN BOSOWASI)**



**HASIL PENELITIAN
(Penelitian Terapan Pengembangan Nasional)**

TIM Peneliti

Ketua:

Dr. Syaparuddin, S.Ag., M.SI.
NIDM: 2020126801
ID: 202012680102241

Anggota:

Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum.
NIDM: 2031126309
ID: 2030231340597

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
TAHUN 2020**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN BOPTN (HIBAH) DOSEN
IAIN BONE TAHUN 2020

1. Judul Penelitian : Konstruksi Sosial Keagamaan atas Penguatan Ketahanan Pangan di Daerah (Studi tentang Stabilitas Ketersediaan Pangan di Kawasan Bosowasi
2. Bidang Ilmu : Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Klaster Penelitian : Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
4. Tim Peneliti
 - a. Ketua : Dr. Syaparuddin, S.Ag., M.SI.
NIDM : 2020126801
ID Litapdimas : 202012680102241
 - b. Anggota : Prof. Dr. A. Nuzul, S.H., M.Hum.
NIDM : 2031126309
ID Litapdimas : 2030231340597
5. Lokasi Penelitian : Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai
6. Sumber Dana : BOPTN Tahun 2020
7. Jumlah Dana Tahun 2020 : Rp. 105.000.000 (Seratu Lima Juta Rupiah)

Watampone, 21 September 2020


Ketua LPPM
Rahmatunnair



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202035546, 24 September 2020

Pencipta

Nama : **Dr. Syaparuddin, S.Ag. M.Si., Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum.**

Alamat : Jl. A. Sambaloge Baru Watampone, Bone, Sulawesi Selatan Di Kompleks Perum. Taman Angrek Indah Watampone B1/35, Watampone, Sulawesi Selatan, 92711

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Syaparuddin, S.Ag. M.Si., Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum.**

Alamat : Jl. A. Sambaloge Baru Watampone, Bone, Sulawesi Selatan Di Kompleks Perum. Taman Angrek Indah Watampone B1/35, Watampone, Sulawesi Selatan, 92711

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Laporan Penelitian**

Judul Ciptaan : **Konstruksi Sosial Keagamaan Atas Penguatan Ketahanan Pangan Di Daerah (Studi Tentang Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Kawasan Bosowasi)**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 24 September 2020, di Watampone

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000204811

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Syaparuddin, S.Ag. M.Si.	Jl. A. Sambaloge Baru Watampone, Bone, Sulawesi Selatan Di Kompleks Perum. Taman Angrek Indah Watampone B1/35
2	Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum.	Jl. KH. Abd Hamid, Kelurahan Biru, Kec. Tanete Riattang Bone Sulawesi Selatan

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Dr. Syaparuddin, S.Ag. M.Si.	Jl. A. Sambaloge Baru Watampone, Bone, Sulawesi Selatan Di Kompleks Perum. Taman Angrek Indah Watampone B1/35
2	Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum.	Jl. KH. Abd Hamid, Kelurahan Biru, Kec. Tanete Riattang Bone Sulawesi Selatan



ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang membahas tentang pelibatan sosial keagamaan dalam penguatan ketahanan pangan dalam konteks lokal dengan unit analisis rumah tangga. Asumsi yang ditawarkan, yaitu: (1) Realitas kehidupan sosial keagamaan masyarakat di daerah dapat dijadikan sebagai dasar penguatan ketahanan pangan rumah tangga, (2) Penguatan ketahanan pangan yang berorientasi kepada realitas sosial keagamaan di daerah melalui mediasi norma subjektif akan lebih mudah dilakukan, dan (3) Penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi akan lebih mudah dikembangkan jika dilakukan secara sosial keagamaan melalui mediasi norma subjektif. Dalam membuktikan ketiga asumsi tersebut dibutuhkan data dengan berdasar pada tujuan penelitian, yaitu: (1) Mendeskripsikan realitas kehidupan sosial keagamaan yang berlangsung di Kawasan Bosowasi, (2) Mengetahui dan mengukur secara matematis kontribusi realitas sosial keagamaan terhadap penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi melalui mediasi norma subjektif, dan (3) Merumuskan model penguatan ketahanan pangan rumah tangga secara sosial keagamaan melalui mediasi norma subjektif.

Dalam mencapai tujuan tersebut, digunakan pendekatan induktif dengan metode kualitatif dan kuantitatif dalam mengumpulkan data, dan pendekatan sosial keagamaan dalam menganalisis data kualitatif, sedangkan data kuantitatif digunakan pendekatan *Structural Equation Modelling* (SEM) yang berbasis *variance* dengan metode *Partial Least Square* (PLS). Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian deskriptif. Data yang dibutuhkan, dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. lalu dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan dalam memaknai hasil analisis digunakan teori dan atau konsep yang relevan, yaitu: Konsep struktur sosial, teori kontruksi sosial, teori perubahan sosial, dan konsep falah dalam Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Realitas kehidupan sosial keagamaan masyarakat ternyata dapat dijadikan sebagai dasar penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi, (2) Penguatan ketahanan pangan rumah tangga yang berorientasi kepada realitas kehidupan sosial keagamaan ternyata lebih mudah dilakukan di Kawasan Bosowasi, dan (3) Penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi ternyata lebih mudah dikembangkan jika dilakukan secara sosial keagamaan melalui mediasi norma subjektif. Dari ketiga pernyataan tersebut, dapat dirumuskan dua model penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi, yaitu: Model penguatan kolektif dan model penguatan individu. Model ini diyakini dapat mewujudkan penguatan ketahanan pangan rumah tangga (kedaulatan, kemandirian, dan keamanan pangan) dengan mudah serta berdampak kepada peningkatan kesejahteraan hidup rumah tangga.

Kata Kunci: Bosowasi, Rumah Tangga, Ketahanan Pangan, Norma Subjektif, Sosial Keagamaan.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Alhamdulillah, segala puja dan puji ke hadirat Allah swt. yang dengan taufiq dan hidayat-Nya, peneliti dapat menyusun laporan akhir penelitian BOPTN tahun 2020 ini dengan judul "Konstruksi Sosial Keagamaan atas Penguatan Ketahanan Pangan di Daerah (Studi tentang Stabilitas Ketersediaan Pangan di Kawasan Bosowasi)". Kemudian shalawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw.

Penelitian ini dilakukan atas dorongan pemikiran bahwa pangan itu merupakan hak dasar manusia yang harus diupayakan secara revolusioner, akan tetapi dalam upaya penguatan yang dilakukan belum melibatkan realitas kehidupan sosial keagamaan masyarakat sebagai dasar utama, padahal hal tersebut merupakan urat nadi kehidupan masyarakat di daerah. Karena itu, pelibatan sosial keagamaan dalam menguatkan ketahanan pangan rumah tangga di daerah penting untuk dilakukan. Dalam merangkai pelibatan sosial keagamaan tersebut, digunakan mediasi norma subjektif dengan metode *Partial Least Square* (PLS). PLS merupakan metode analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) yang berbasis *variance*. Keunggulan metode ini adalah tidak memerlukan asumsi dan dapat diestimasi dengan jumlah sampel yang relatif kecil. Alat bantu yang digunakan berupa program aplikasi statistik *Smart-PLS* Versi 3.3.2 yang dirancang khusus untuk mengestimasi persamaan struktural dengan basis *variance*.

Hal tersebut di atas dituangkan dalam penelitian ini, dan dapat terselesaikan dengan baik berkat dorongan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Bone atas kesempatan dan izin yang diberikan dalam melakukan

dan menyelesaikan penelitian ini.

2. Ketua LPPM IAIN Bone dan semua stafnya atas dukungan yang diberikan dalam melakukan dan menyelesaikan penelitian ini,
3. Pimpinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, dan Sinjai atas izin yang diberikan kepada peneliti dalam melakukan penelitian,
4. Pimpinan Dinas Ketahanan Pangan dan atau Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, dan Sinjai atas kesempatan yang diberikan kepada peneliti untuk melakukan wawancara,
5. Pimpinan Kantor Kementerian Agama dan Pimpinan MUI Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, dan Sinjai atas kesempatan yang diberikan kepada peneliti untuk melakukan wawancara,
6. Seluruh partisipan penelitian ini atas arahan, bantuan, informasi, jawaban dan data yang diberikan kepada peneliti,
7. Keluarga kami atas kesabaran dan pengertiannya untuk ditinggal sementara waktu dalam rangka melakukan penelitian di Kawasan Bosowasi,
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga mendapat balasan yang setimpal di sisi Allah swt. atas jasa dan amal bakti yang mereka telah berikan kepada kami. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap semoga penelitian ini dapat memberi manfaat bagi kemajuan bangsa, negara dan agama. Tak lupa peneliti berharap akan kritik dan saran yang konstruktif bagi kesempurnaan penelitian ini.

Watampone, 15 November 2021

Tim Peneliti,



Dr. Syaparuddin, S.Ag., M.SI.
NIDM: 2020126801
ID: 202012680102241



Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum.
NIDM: 2031126309
ID: 2030231340597

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL,	i
PENGESAHAN,	ii
HAK CIPTA,	iii
ABSTRAK,	v
KATA PENGANTAR,	vi
DAFTAR ISI,	viii
DAFTAR TABEL,	x
DAFTAR GAMBAR,	xi

BAB I PENDAHULUAN, 1

- A. Latar Belakang Masalah, 1
- B. Rumusan Masalah, 4
- C. Tujuan Penelitian, 4
- D. Signifikansi Penelitian, 4
- E. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu, 5
- F. Kontribusi Penelitian, 9
- G. Sistematika Pembahasan, 9

BAB II LANDASAN TEORI PENELITIAN, 11

- A. Konsep Struktur Sosial, 11
 - 1. Pengertian Struktur Sosial, 12
 - 2. Unsur-unsur Struktur Sosial, 14
 - 3. Ciri-ciri Struktur Sosial, 14
 - 4. Fungsi Struktur Sosial, 16
 - 5. Bentuk-bentuk Struktur Sosial, 17
- B. Teori Konstruksi Sosial, 23
 - 1. Eksternalisasi, 26
 - 2. Objektivasi, 26
 - 3. Internalisasi, 27
- C. Teori Perubahan Sosial, 27
- D. Konsep Falah dalam Islam, 30
 - 1. Pengertian Falah, 30
 - 2. Falah sebagai Tujuan Hidup, 32
- E. Agama dan Nilai Kearifan Lokal, 33
 - 1. Agama, 34
 - 2. Nilai Kearifan Lokal, 36
 - 3. Korelasi Agama dengan Nilai Kearifan Lokal, 37
- F. Teori *Planned Behavior*, 38
- G. Ketahanan Pangan
 - 1. Ketersediaan Pangan, 41
 - 2. Stabilitas Ketersediaan Pangan, 42
 - 3. Akses Pangan, 42
 - 4. Pemanfaatan Pangan, 43

BAB III METODE PENELITIAN, 44

- A. Proses dan Prosedur Penelitian, 44
- B. Waktu dan Lokasi Penelitian, 45
- C. Pendekatan dan Desain Penelitian, 46
- D. Partisipan Penelitian, 47
- E. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data, 49
- F. Instrumen Penelitian, 52
- G. Analisis Data, 54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, 49

- A. Deskripsi Lokasi Penelitian, 49
 - 1. Kabupaten Bone, 49
 - 2. Kabupaten Soppeng, 51
 - 3. Kabupaten Wajo, 53
 - 4. Kabupaten Sinjai, 54
- B. Penyajian Hasil Penelitian, 56
 - 1. Realitas Kehidupan Sosial Keagamaan di Bosowasi, 56
 - 2. Realitas Ketahanan Pangan di Bosowasi, 73
 - 3. Kontribusi Realitas Sosial Keagamaan, 84
 - 4. Perumusan Model Penguatan Secara Sosial Keagamaan, 95
- C. Pembahasan Hasil Penelitian, 99
 - 1. Rumah Tangga di Kawasan Bosowasi, 100
 - 2. Penguatan Ketahanan Pangan, 103
 - 3. Kolektif dan Individu, 105
 - 4. Kesejahteraan Hidup, 107

BAB V PENUTUP, 120

- A. Kesimpulan, 120
- B. Implikasi Penelitian, 121
- C. Saran-saran, 121

REFERENSI, 122

LAMPIRAN-LAMPIRAN, 128

CV PENELITI, 149

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Kisi-kisi Instrumen Penelitian, 52

Tabel 4.1 : Hasil Uji Validitas, 89

Tabel 4.2 : Hasil Uji Reliabilitas, 90

Tabel 4.3 : Hasil Pengujian Inner Model, 93

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 : Teori *Planned Behavior*, 40
- Gambar 4.1 : Konstruksi Diagram Jalur, 85
- Gambar 4.2 : Output Diagram Jalur Uji Validitas (1), 88
- Gambar 4.3 : Output Diagram Jalur Uji Validitas (2), 88
- Gambar 4.4 : Hasil Pengujian Inner Model, 92
- Gambar 4.5 : Model Penguatan Kolektif, 98
- Gambar 4.6 : Model Penguatan Individu, 99
- Gambar 4.7 : Kurva Kesejahteraan Hidup Rumah Tangga, 108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan salah satu isu strategi nasional yang diusulkan untuk dimantapkan di Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 (Bappenas, 2019). Argumennya adalah bahwa pangan itu merupakan hak dasar manusia yang harus diupayakan secara revolusioner. Ketahanan pangan di daerah meliputi empat aspek, yaitu: Ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan (Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone, Soppeng, Wajo dan Sinjai, 2020). Keempat aspek ini telah mendapat perhatian yang cukup serius dari pemerintah daerah yang ada di Kawasan Bosowasi dan dianggap cukup berhasil dalam menguatkan ketahanan pangan di kawasan tersebut

Keberhasilan tersebut dapat dibuktikan melalui ketersediaan pangan di kawasan tersebut. Ketersediaan pangan di Kawasan Bosowasi dapat dipetakan sebagai berikut: (1) Padi Sawah dan Padi Ladang. Hasil produksi padi sawah di Sinjai 128.777 ton, padi ladang sebesar 0 ton. Di Bone, hasil produksi padi sawah 809.402 ton, padi ladang 3.374 ton. Di Soppeng, hasil produksi padi sawah 225.248 ton, padi ladang 1.186 ton. Di Wajo, hasil produksi padi sawah 619.693 ton, padi ladang 51.287 ton. (2) Jagung dan Kedelai. Hasil produksi jagung di Sinjai 13.340 ton, kedelai 0 ton. Di Bone, hasil produksi jagung 290.960 ton, kedelai 29.398 ton. Di Soppeng, hasil produksi jagung 41.128 ton, kedelai 4.947 ton. Di Wajo, hasil produksi jagung 133.369 ton, kedelai 11.517 ton. (3) Kacang Tanah dan Kacang Hijau. Hasil produk kacang tanah di Sinjai 1.331 ton, kacang hijau 0 ton. Di Bone, hasil produksi kacang tanah 6.665 ton, kacang hijau 1.302 ton. Di Soppeng, hasil produksi kacang tanah 406 ton, kacang hijau 329 ton. Di Wajo, hasil produksi kacang tanah 676 ton, kacang hijau 20.824 ton. (4) Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Hasil produksi ubi kayu di Sinjai 2.354 ton, ubi jalar 2.315 ton. Di Bone, hasil produksi ubi kayu 9.758 ton, ubi jalar 21.688 ton. Di Soppeng, hasil

produksi ubi kayu 231 ton, ubi jalar 123 ton. Di Wajo, hasil produksi ubi kayu 10.711 ton, ubi jalar 3.295 ton (BPS Sulawesi Selatan, 2020).

Keberhasilan pemerintah daerah di Kawasan Bosowasi dalam menguatkan ketahanan pangan di kawasan tersebut, dilakukan melalui berbagai program dan strategi. Akan tetapi, dalam melaksanakan program dan strategi tersebut, ternyata aspek sosial keagamaan belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam menguatkan ketahanan pangan, padahal realitas kehidupan sosial keagamaan masyarakat di Kawasan Bosowasi merupakan pondasi dalam melakukan berbagai program yang berorientasi untuk menyejahterakan masyarakat. Karena itu, jika setiap program dan strategi penguatan ketahanan pangan di daerah tanpa melibatkan realitas kehidupan sosial keagamaan masyarakat akan sulit dilakukan secara berkesinambungan.

Demikian juga dalam menjaga stabilitas ketersediaan pangan seperti yang dipaparkan di atas, pemerintah daerah di Kawasan Bosowasi hanya mengacu pada kemampuan masyarakat di kawasan tersebut untuk mendapatkan bahan pangan sepanjang waktu tertentu. Sementara kerawanan pangan yang dapat berlangsung secara transisi, musiman, ataupun kronis belum mendapatkan perhatian secara serius, terutama dari aspek sosial keagamaan dalam upaya melakukan stabilisasi ketersediaan pangan di Kawasan Bosowasi. Aspek sosial keagamaan merupakan sumber vital dalam membentuk modal sosial guna melakukan stabilisasi terhadap ketersediaan pangan di Daerah.

Sejauh ini studi tentang stabilisasi ketersediaan pangan dari aspek kerawanan pangan dengan pendekatan sosial keagamaan belum menjadi perhatian yang cukup dari para ahli. Beberapa studi yang telah ada cenderung hanya memerhatikan hal-hal berikut ini, yaitu: Ketersediaan pangan (Darwanto, 2005, Haryadi, 2010, dan Purwantini dkk, 2016), stabilitas ketersediaan pangan (Purwaningsih, 2008, Suryana, 2014, dan Simatupang, 2016), keterjangkauan (akses) pangan (Swantika, 2011 dan Prawoto, 2012), dan pemanfaatan pangan (YP, 2008, Hidayah, 2011, dan Budiyanto, 2012). Sedangkan studi tentang stabilitas ketersediaan pangan yang ada hanya mengacu pada kemampuan suatu individu dalam mendapatkan bahan pangan sepanjang waktu tertentu. Namun

terkait dengan masalah kerawanan pangan yang dapat berlangsung secara transisi, musiman, ataupun kronis nyaris belum tersentuh. Penelitian yang ada belum ada yang membahas tentang pelibatan sosial keagamaan dalam mengembangkan penguatan ketahanan pangan. Karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dan merupakan penelitian yang pertama membahas pelibatan sosial keagamaan dalam penguatan ketahanan pangan dalam konteks lokal dengan unit analisis rumah tangga.

Dalam merangkai pelibatan sosial keagamaan tersebut untuk penguatan ketahanan pangan rumah tangga di daerah dengan kasus di Kawasan Bosowasi, digunakan mediasi norma subjektif dengan metode *Partial Least Square* (PLS). PLS merupakan metode analisis dengan *Structural Equation Modelling* (SEM) yang berbasis *variance*. Keunggulan metode ini adalah tidak memerlukan asumsi dan dapat diestimasi dengan jumlah sampel yang relatif kecil. Alat bantu yang digunakan berupa program aplikasi statistik *Smart-PLS* Versi 3.3.2 yang dirancang khusus untuk mengestimasi persamaan struktural dengan basis *variance*. Pelibatan sosial keagamaan dalam menguatkan ketahanan pangan rumah tangga di daerah penting untuk dilakukan karena (1) penguatan ketahanan pangan rumah tangga harus dilakukan secara sosial keagamaan karena di Kawasan Bosowasi sangat kental nuansa sosial keagamaannya dalam melakukan suatu kegiatan, (2) pangan merupakan kebutuhan masyarakat banyak karena itu perlu pelibatan sosial keagamaan (3) perlu perubahan main set masyarakat dari perilaku memberatas lingkungan pangan menjadi bersahabat dengan lingkungan pangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini mengasumsikan bahwa: (1) Realitas kehidupan sosial keagamaan masyarakat di daerah dapat dijadikan sebagai dasar penguatan ketahanan pangan rumah tangga, (2) Penguatan ketahanan pangan yang berorientasi kepada realitas kehidupan sosial keagamaan di daerah melalui mediasi norma subjektif akan lebih mudah dilakukan, dan (3) Penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi akan lebih mudah dikembangkan jika dilakukan secara sosial keagamaan melalui mediasi norma subjektif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan penelitian yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian dalam tiga format, yaitu: deskriptif, kritis dan transformatif dengan unit analisis rumah tangga. Pertanyaan penelitian dalam tiga format tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

1. Bagaimana realitas kehidupan sosial keagamaan yang berlangsung di Kawasan Bosowasi?
2. Bagaimana kontribusi realitas sosial keagamaan tersebut terhadap penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi melalui mediasi dan tanpa mediasi norma subjektif?
3. Bagaimana merumuskan model penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi secara sosial keagamaan melalui mediasi dan tanpa mediasi norma subjektif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu untuk:

1. Mendeskripsikan realitas kehidupan sosial keagamaan yang berlangsung di Kawasan Bosowasi,
2. Mengetahui dan mengukur secara matematis kontribusi realitas sosial keagamaan terhadap penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi melalui mediasi dan tanpa mediasi norma subjektif,
3. Merumuskan model penguatan ketahanan pangan rumah tangga secara sosial keagamaan melalui mediasi dan tanpa mediasi norma subjektif.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas dasar empat alasan utama, dan di sinilah letak signifikansi penelitian ini dilakukan. Keempat alasan utama tersebut, yaitu:

1. Mengembangkan hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang penguatan ketahanan pangan pada lingkup penelitian (*setting*) yang baru dalam konteks ketahanan pangan rumah tangga di daerah yang dilakukan secara sosial

keagamaan yang difokuskan pada ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi.

2. Mengarahkan perilaku ketahanan pangan rumah tangga pada level sosial keagamaan, termasuk intervensi di dalam struktur untuk membangun perilaku, nilai, dan sikap baru melalui perubahan pada struktur dan proses penguatan ketahanan pangan rumah tangga di daerah khususnya di Kawasan Bosowasi.
3. Membantu para penentu kebijakan dalam menguatkan ketahanan pangan rumah tangga secara sosial keagamaan. Sesungguhnya masyarakat di daerah memiliki pengetahuan dan pengalaman secara sosial keagamaan dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangganya sendiri. Hanya saja mereka tidak pernah diberikan pemahaman dan penyadaran untuk membangkitkan potensinya tersebut. Karena itu, penelitian ini merupakan salah satu sumber rujukan yang dapat membangkitkan potensi masyarakat tersebut.
4. Membantu para mahasiswa untuk mengembangkan konsep, penulisan, dan pengorganisasian konsep yang terkait dengan penguatan ketahanan pangan dalam konteks rumah tangga di daerah secara sosial keagamaan melalui mediasi dan tanpa mediasi norma subjektif.

E. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Ketahanan pangan memiliki empat pilar utama (FAO, 1997), yaitu: Ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan, keterjangkauan (akses) pangan, dan pemanfaatan pangan. Empat pilar ini dijadikan sebagai acuan untuk memetakan secara tematik hasil-hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang ketahanan pangan dalam rangka untuk menegaskan orisinalitas penelitian yang akan dilakukan ini. Hasil penelurusan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut dapat disajikan seperti berikut ini:

Hasil penelitian yang membahas tentang ketersediaan pangan, antara lain dilakukan oleh Darwanto (2005), Haryadi (2010), dan Purwantini dkk (2016). Darwanto (2005) dalam artikelnya mengatakan bahwa untuk menjamin keberlanjutan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan

nasional, terutama beras sekaligus peningkatan kesejahteraan petani diperlukan kebijakan jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka pendek diperlukan kebijakan perlindungan petani dengan pembatasan impor, sedangkan untuk jangka panjang kebijakan pembatasan impor tersebut dapat dikurangi secara bertahap namun kebijakan peningkatan produksi domestik masih diperlukan yang disertai dengan upaya diverifikasi konsumsi atau pangan. Dari aspek penggunaan teknologi, Haryadi (2010) dalam artikelnya mengatakan bahwa teknologi pangan mempunyai peran strategis dalam upaya pengembangan kemandirian pangan, yaitu sistem ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal. Khususnya, melalui pengembangan industri penghasil nilai tambah, dalam hal ini industri aneka ragam pangan, berbasis potensi lokal. Dari aspek pemanfaatan lahan, Purwantini dkk (2016) dalam artikelnya mengatakan bahwa untuk mengoptimalkan peran lahan pekarangan terutama sebagai penyedia pangan dan gizi rumahtangga dan sumber pendapatan tambahan rumahtangga petani serta dalam menjaga keberlanjutan usaha di lahan pekarangan, perlu dilakukan rancangan pemanfaatan pekarangan yang lebih komprehensif.

Hasil penelitian yang membahas tentang stabilitas ketersediaan pangan, antara lain dilakukan oleh Purwaningsih (2008), Suryana (2014), dan Simatupang (2016). Purwaningsih (2008) dalam artikelnya mengatakan bahwa dalam rangka memupuk cadangan pangan masyarakat, maka perlu untuk menumbuhkan lumbung desa atau meningkatkan fungsi lumbung desa yang telah ada, apalagi bila dilakukan pada desa mandiri pangan yang telah dirintis oleh pemerintah. Keberadaan lumbung pangan diarahkan menuju lumbung desa sebagai sarana untuk pemupukan cadangan pangan masyarakat yang fungsinya adalah mewujudkan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu. Dari aspek menghadapi krisis pangan, Suryana (2014) dalam artikelnya mengatakan bahwa upaya sungguh-sungguh untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan sangat diperlukan mengingat ancaman krisis pangan global masih tetap ada dan dapat secara tiba-tiba menjadi kenyataan. Dengan membangun ketahanan pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal, memanfaatkan teknologi unggul untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan secara

efisien dan berdayasaing, dan membangun kekokohandan kelenturan respons masyarakat menghadapi ancaman krisis pangan, Indonesia akan mampu mengatasi ancaman krisis pangan global ataupun domestik. Dari aspek swasembada pangan, Simatupang (2016) dalam artikelnya mengatakan bahwa strategi swasembada pangan didasarkan pada paradigma ketersediaan pangan terbukti tidak dapat menjamin akses pangan bagi semua keluarga atau individu yang merupakan inti dari ketahanan pangan. Paradigma yang dipandang lebih tepat ialah perolehan pangan yang mencakup dimensi ketersediaan, akses dan penggunaan. Dengan paradigma ini, swasembada pangan berguna untuk ketahanan ketersediaan pangan, namun tidak merupakan keharusan untuk ketahanan pangan sehingga tidak dianjurkan untuk dijadikan sebagai sasaran mutlak kebijakan.

Hasil penelitian yang membahas tentang pemanfaatan pangan, antara lain dilakukan oleh YP (2008), Hidayah (2011), dan Budiyanto (2012). YP dalam artikelnya mengatakan bahwa (1) Pola diverifikasi konsumsi pangan pokok, yaitu: Beras dan pangan pengganti beras seperti jagung yang dikonsumsi dengan mengikuti pola beras – jagung, beras – ketela pohon, dan beras – jagung – ketela pohon. Pola ini dapat mengurangi ketergantungan pada beras, (2) Konsumsi pangan pokok rumah tangga berbeda antar rumah tangga tergantung dari tinggi rendahnya tingkat pendapatannya, (3) Faktor-faktor yang memengaruhi pola diversifikasi konsumsi pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga pedesaan adalah pendapatan rumah tangga, harga pangan, dan jumlah anggota keluarga. Dari aspek diverifikasi pangan, Hidayah (2011) dalam artikelnya mengatakan bahwa masyarakat perkotaan disarankan untuk belajar menerapkan diversifikasi pangan pokok secara bertahap, karena secara tidak langsung dapat membantu terwujudnya ketahanan pangan. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan efikasi diri pangan, yaitu kemampuan yang diperoleh untuk melakukan perubahan pola makan. Masyarakat pedesaan disarankan untuk menambah variasi pengolahan pangan non beras yang selama ini sudah dikonsumsi sehingga tidak timbul kebosanan. Pemerintah daerah disarankan untuk menyampaikan sosialisasi pentingnya manfaat diversifikasi kepada

masyarakat, sehingga motivasi penerapan diversifikasi yang selama ini sudah dilakukan berubah dari ekstrinsik menjadi intrinsik. Dari aspek pemanfaatan pangan alternatif. Budiyanto (2012) dalam artikelnya mengatakan bahwa perlunya melakukan penyempurnaan draft model pengembangan ketahanan pangan berbasis pisang melalui revitalisasi nilai kearifan lokal dan penguatan kelembagaan kelompok tani. yang dilanjutkan dengan evaluasi, revisi, dan review pakar, sehingga model pengembangan ketahanan pangan berbasis pisang melalui revitalisasi nilai kearifan lokal dan penguatan kelembagaan kelompok tani bersifat applicable.

Hasil penelitian yang membahas tentang akses pangan, antara lain dilakukan oleh Swantika (2011) dan Prawoto (2012). Swantika (2011) dalam artikennya mengatakan bahwa penerapan program ketahanan pangan yang masih bergantung pada pangan impor belum berhasil meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya sehingga mereka belum mampu keluar dari perangkap kemiskinan. Karena itu, strategi alternatif yang prospektif adalah membangun kemandirian dan kedaulatan pangan, dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ditopang oleh industri berbasis pertanian, skim kredit lunak, dan pembangunan infrastruktur di pedesaan. Kehadiran industri pertanian di pedesaan akan menciptakan pasar bagi produk pertanian primer dan lapangan kerja baru di pedesaan. Dari aspek pemberdayaan masyarakat, Prawoto (2012) dalam artikelnya mengatakan bahwa program pengembangan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal peningkatan dan pemberdayaan masyarakat terasing berbasis kemandirian untuk mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat, yaitu identifikasi permasalahan ekonomi yang dihadapi, prospek pengembangan dan kendala yang dihadapi pada tiap unit usaha dapat dirumuskan program pengembangan potensi ekonomi atau produk unggulan masyarakat di pedesaan.

Ternyata hasil-hasil penelitian terdahulu cenderung membahas tiga hal, yaitu: Ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan dan pemanfaatan pangan. Terfokus pada hasil penelitian yang membahas tentang stabilitas ketersediaan pangan, antara lain dilakukan oleh Purwaningsih (2008), Suryana

(2014), dan Simatupang (2016). Ketiga hasil penelitian ini hanya membahas aspek cadangan pangan, aspek menghadapi krisis pangan, dan aspek swasembada pangan. Tiga aspek ini hanya mengacu pada kemampuan suatu individu dalam mendapatkan bahan pangan sepanjang waktu tertentu. Namun terkait dengan kerawanan pangan yang dapat berlangsung secara transisi, musiman, ataupun kronis dengan melibatkan aspek pelibatan sosial keagamaan belum dibahas sama sekali, Hasil penelitian yang ada belum ada yang membahas tentang pelibatan sosial keagamaan dalam penguatan ketahanan pangan. Karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dan merupakan penelitian yang pertama membahas pelibatan sosial keagamaan dalam penguatan ketahanan pangan dalam konteks lokal dan di sinilah letak orisinalitas penelitian yang akan dilakukan ini.

F. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pemerintah pusat/daerah untuk menguatkan ketahanan pangan secara sosial keagamaan melalui mediasi dan tanpa mediasi norma subjektif. Hasil penelitian ini berkaitan erat dengan pemantapan ketahanan pangan rumah tangga yang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan potensi lokal tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Lebih dari itu, penelitian ini juga merupakan referensi penetapan kebijakan pengembangan, sistem evaluasi, dan sistem kontrol ketahanan pangan rumah tangga di daerah.

Penelitian ini akan bermanfaat dalam merumuskan model penguatan ketahanan pangan rumah tangga di daerah secara sosial keagamaan melalui mediasi dan tanpa mediasi norma subjektif. Selain itu dapat juga dijadikan sebagai referensi untuk mengkaji sosial keagamaan dalam menguatkan ketahanan pangan rumah tangga untuk kemajuan masyarakat di daerah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar hasil penelitian ini dapat dipahami secara logis dan diskursif, serta dapat memberikan hasil yang komprehensif secara maksimal, maka desain pembahasannya secara makro dirancang menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut: Bab pendahuluan menguraikan sub bab latar belakang penelitian, rumusan

masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, tinjau hasil penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Untuk memecahkan permasalahan yang diangkat pada sub bab satu di atas, maka harus dilandasi teori dan atau konsep yang kuat, maka pada bab dua dibahas landasan teori penelitian. Pembahasan mengenai landasan teori dan atau konsep tersebut meliputi: teori struktur sosial, konstruksi sosial, perubahan sosial, konsep falah dalam Islam, konsep agama dan nilai kearifan lokal, teori *Planned Behavior*, dan konsep ketahanan pangan.

Setelah menguraikan landasan teori penelitian secara lengkap, maka untuk mengarahkan penelitian ini haruslah memiliki metode yang jelas. Karena itu dalam bab tiga dibahas metode penelitian yang memaparkan tentang proses dan prosedur penelitian, waktu dan lokasi penelitian, pendekatan dan desain penelitian, partisipan penelitian, jenis data dan metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

Lalu, pada bab empat diuraikan secara lengkap inti pembahasan penelitian, yaitu hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi: Deskripsi lokasi penelitian, penyajian hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

Sebagai bab terakhir, bab lima merupakan bab penutup yang mengakhiri keseluruhan rangkaian dari penelitian ini. Bab ini memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dan dilengkapi dengan implikasi dan saran-saran penelitian yang mudah-mudahan menjadi signifikan bagi semua pihak. Sebagai tambahan, juga diberikan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan CV peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI PENELITIAN

Dalam menginterpretasi hasil penelitian, menetapkan variabel penelitian yang digunakan, dan menyusun instrumen penelitian untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan angket, dengan berpedoman pada permasalahan penelitian yang diangkat sebagaimana yang dituangkan dalam Bab I penelitian ini, digunakan teori dan atau konsep yang relevan. Teori dan atau konsep yang digunakan, diangkat dengan berpedoman pada asumsi yang ditawarkan untuk dibuktikan sebagaimana yang dituangkan dalam Bab I penelitian ini. Teori dan atau konsep yang digunakan untuk menginterpretasi hasil penelitian, yaitu: Konsep struktur sosial, teori konstruksi sosial, teori perubahan sosial, konsep falah dalam Islam. Sedangkan teori dan atau konsep yang digunakan untuk menetapkan variabel penelitian dan menyusun instrumen penelitian, yaitu: Konsep agama dan nilai kearifan lokal, teori *Planned Behavior*, dan konsep FAO tentang ketahanan pangan.

Teori dan atau konsep tersebut dapat disajikan uraiannya seperti di bawah ini:

A. Konsep Struktur Sosial

Struktur sosial merupakan salah satu konsep kunci dalam ilmu sosial. Alasan menggunakan konsep ini bahwa rumah tangga (dibatasi hanya pada keluarga) sebagai unit analisis dalam membahas ketahanan pangan di Kawasan Bosowasi merupakan lembaga sosial yang terbentuk dalam masyarakat sehingga masyarakat sulit untuk meninggalkan lembaga yang dibangunnya sendiri tanpa ada perubahan sosial yang terjadi pada mereka sehingga memaksa mereka untuk meninggalkannya. Karena itu, konsep struktur sosial digunakan untuk membahas hal tersebut dan didukung dengan beberapa teori, juga diuraikan dalam Bab ini. Konsep struktur sosial dapat disajikan uraiannya seperti di bawah ini:

1. Pengertian Struktur Sosial

Istilah struktur berasal dari kata Latin *structum* yang artinya menyusun (Abercrombie, 2011). Sekilas dapat dipahami bahwa struktur sosial adalah susunan masyarakat. Kata susunan artinya tatanan yang sistematis, dapat berbentuk vertikal atau horizontal atau kombinasi keduanya. Jika yang dipikirkan adalah struktur organisasi, maka akan ditemukan beberapa posisi dan peran yang beragam dalam sebuah struktur. Struktur masyarakat juga menggambarkan adanya beragam peran sosial yang dimainkan oleh tiap individu sebagai bagian dari kesatuan masyarakat. Dalam memainkan perannya, individu tersebut menganut nilai-nilai yang menjadi orientasinya (Johnson, 1986).

Struktur sosial menurut para ahli, antara lain dikemukakan oleh Soemardjan (1974). Menurut Soemardjan (1974) bahwa struktur sosial itu merupakan keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Soekanto (1983), menurutnya bahwa struktur sosial itu merupakan jaringan dari unsur-unsur sosial pokok, yang meliputi: Kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi sosial, dan kekuasaan dan wewenang. Sedangkan Kornblum (2000) mengemukakan bahwa struktur sosial adalah susunan yang dapat terjadi karena adanya pengulangan pola perilaku individu. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Parson (1939), ia mengatakan bahwa struktur sosial adalah suatu proses sosial yang melibatkan hubungan antara manusia yang membentuk suatu tingkatan. Hubungan ini terjadi secara terus-menerus sehingga masyarakat terstruktur layaknya suatu organisasi.

Dari pengertian-pengertian yang dikemukakan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur sosial adalah suatu fenomena sosial yang merupakan susunan lembaga-lembaga sosial, lembaga yang dibentuk secara sengaja oleh masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan suatu keteraturan sosial dengan mengatur hubungan-hubungan antar manusia dalam rangka memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup mereka. Keteraturan sosial ini juga merujuk pada perilaku yang diulang-ulang dengan bentuk atau cara yang sama.

Oleh karena itu, struktur sosial dapat dipergunakan untuk menggambarkan keteraturan sosial, merujuk pada perilaku yang diulang-ulang dengan bentuk atau cara yang sama, karena diartikan sebagai hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan antara peranan-peranan. Interaksi dalam sistem sosial dirumuskan secara lebih terperinci dengan menjabarkan manusia yang menempati posisi-posisi dan melaksanakan peranannya.

Soemardjan (1974) mengatakan bahwa struktur sosial itu meliputi: (1) relasi sosial antar individu, dan (2) perbedaan individu serta kelas sosial menurut peranan sosial mereka. Sedangkan cara-cara tentang bagaimana mekanisme hubungan-hubungan itu dalam mengatur hidup segenap individu persekutuan hidup dan sifat-sifat persekutuan hidup di atas adalah merupakan fungsi sosial mereka. Konsep struktur dan fungsi itu sangat penting, karena itu suatu aktivitas akan jelas apabila dibuktikan memiliki fungsi guna memelihara struktur sosial.

Selain hal tersebut, struktur sosial suatu masyarakat sebagaimana yang diungkapkan oleh Soekanto (1983) juga memiliki berbagai tipe kelompok yang terjadi dari banyak orang dan meliputi pula lembaga-lembaga didalamnya dimana banyak orang ikut mengambil bagian, lembaga dimaksudkan sebagai hubungan-hubungan tertentu yang timbul dari aktifitas orang-perorangan atau kelompok yang hendak mencapai tujuan bersama. Struktur sosial baik menyangkut kelompok maupun lembaga berdiri pada dasar yang definitif. Pada kehidupan masyarakat yang relatif masih sederhana seperti gender, usia, kekerabat, dan kesatuan atas dasar kedaerahan dianggap merupakan dasar-dasar yang paling pokok dari suatu struktur sosial. Namun dalam masyarakat yang lebih modern, orientasi manusia dalam mengisi kehidupannya adalah mereka cenderung untuk selalu meningkatkan kualitas kehidupannya. Mekanisme yang menunjukkan kecenderungan itu adalah dengan lebih memberdayakan segenap potensi yang dimilikinya.

Dengan demikian struktur sosial itu adalah aspek sosial yang relatif statis daripada aspek prosedural atau fungsional dari sistem tersebut. Dari semua keterangan di atas, dapat dinyatakan bahwa sesungguhnya struktur sosial itu merupakan suatu jaringan dari unsur-unsur sosial pokok dalam masyarakat.

Unsur-unsur pokok tersebut menurut Soekanto (1983), mencakup: (1) kelompok sosial, (2) lembaga sosial, (3) stratifikasi sosial, (4) mobilitas sosial, dan (5) kebudayaan.

2. Unsur-Unsur Struktur Sosial

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dalam suatu masyarakat yang tertata dalam suatu struktur yang cenderung bersifat tetap. Struktur sosial dalam kehidupan masyarakat itu diharapkan dapat berfungsi dengan baik, sehingga akan tercipta suatu keteraturan, ketertiban, dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Struktur sosial tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Unsur-unsur struktur sosial menurut Loomis (1967), yaitu: (1) adanya pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh para anggota masyarakat yang berfungsi sebagai alat analisis dari anggota masyarakat, (2) adanya perasaan solidaritas dari anggota-anggota masyarakat, (3) adanya tujuan dan cita-cita yang sama dari warga masyarakat, (3) adanya nilai-nilai dan norma-norma sosial yang dijadikan sebagai patokan dan pedoman bagi anggota masyarakat dalam bertingkah laku, (4) adanya kedudukan dan peranan sosial yang mengarahkan pola-pola tindakan atau perilaku warga masyarakat, (6) adanya kekuasaan, berupa kemampuan memerintah dari anggota masyarakat yang memegang kekuasaan, sehingga sistem sosial dapat berlanjut, (7) adanya tingkatan dalam sistem sosial yang ditentukan oleh status dan peranan anggota masyarakat, (8) adanya sistem sanksi yang berisikan ganjaran dan hukuman dalam sistem sosial, sehingga norma tetap terpelihara, (9) adanya sarana atau alat-alat perlengkapan sistem sosial, seperti pranata sosial dan lembaga, dan (10) adanya sistem ketegangan, konflik, dan penyimpangan yang menyertai adanya perbedaan kemampuan dan persepsi warga masyarakat.

3. Ciri-Ciri Struktur Sosial

Segala sesuatu pasti memiliki ciri-ciri tersendiri yang membedakan dengan sesuatu yang lain. Misalnya masyarakat desa mempunyai ciri-ciri unik, seperti gotong royong, kebersamaan, tidak ada spesialisasi dalam pembagian

kerja, dan lain-lain yang membedakan dengan masyarakat perkotaan yang cenderung individualistis dan adanya pembagian pekerjaan sesuai dengan keahlian. Begitupun juga dalam struktur sosial.

Ciri-ciri struktur sosial menurut Syani (1995) antara lain: (1) Struktur sosial mengacu pada hubungan-hubungan sosial yang dapat memberikan bentuk dasar pada masyarakat dan memberikan batas-batas pada aksi-aksi yang kemungkinan besar dilakukan secara organisatoris, (2) Struktur sosial mencakup semua hubungan sosial antara individu-individu pada saat tertentu. Artinya segala bentuk pola interaksi sosial dalam masyarakat telah tercakup dalam suatu struktur sosial, (3) Struktur sosial merupakan seluruh kebudayaan masyarakat. Artinya semua karya, cipta, dan rasa manusia sebagai anggota masyarakat merupakan aspek dari struktur sosial. Misalnya komputer, alat-alat pertanian modern, mobil, pesawat, kesenian, ilmu pengetahuan, dan lain-lain, (4) Struktur sosial merupakan realitas sosial yang bersifat statis, sehingga dapat dilihat sebagai kerangka tatanan dari berbagai bagian tubuh yang membentuk struktur. Misalnya dalam sebuah organisasi terdapat ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi yang kesemuanya membentuk suatu struktur, dan (5) Struktur sosial merupakan tahapan perubahan dan perkembangan masyarakat yang mengandung dua pengertian; Pertama, di dalam struktur sosial terdapat peranan yang bersifat empiris dalam proses perubahan dan perkembangan. Kedua, dalam setiap perubahan dan perkembangan tersebut terdapat tahap perhentian, di mana terjadi stabilitas, keteraturan, dan integrasi sosial yang berkesinambungan sebelum kemudian terancam oleh proses ketidakpuasan dalam tubuh masyarakat.

Selain ciri-ciri tersebut, Syani (1995) juga mengungkapkan beberapa sifat dari struktur sosial, antara lain: (1) muncul pada kelompok masyarakat. Struktur sosial hanya bisa muncul pada individu-individu yang memiliki status dan peran. Status dan peranan masing-masing individu hanya bisa terbaca ketika mereka berada dalam suatu sebuah kelompok atau masyarakat. Pada setiap sistem sosial terdapat macam-macam status dan peran individu. Status yang berbeda-beda itu merupakan pencerminan hak dan kewajiban yang berbeda pula, (2) berkaitan erat dengan kebudayaan. Kelompok masyarakat lama kelamaan akan membentuk

suatu kebudayaan. Setiap kebudayaan memiliki struktur sosialnya sendiri. Indonesia mempunyai banyak daerah dengan kebudayaan yang beraneka ragam. Hal ini menyebabkan beraneka ragam struktur sosial yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Sementara hal-hal yang dapat memengaruhi struktur sosial masyarakat sebagaimana yang diungkapkan oleh Syani (1995), yaitu: (1) Keadaan geografis. Kondisi geografis terdiri dari pulau-pulau yang terpisah. Masyarakatnya kemudian mengembangkan bahasa, perilaku, dan ikatan-ikatan kebudayaan yang berbeda satu sama lain, (2) Mata pencaharian. Masyarakat Indonesia memiliki mata pencaharian yang beragam, antara lain sebagai petani, nelayan, ataupun sektor industri, (3) Pembangunan. Pembangunan dapat memengaruhi struktur sosial masyarakat Indonesia. Misalnya pembangunan yang tidak merata antara daerah dapat menciptakan kelompok masyarakat kaya dan miskin, dan (4) Dapat berubah dan berkembang. Masyarakat tidak statis karena terdiri dari kumpulan individu. Mereka bisa berubah dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Karenanya, struktur yang dibentuk oleh mereka pun bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

4. Fungsi Struktur Sosial

Selain ciri-ciri yang disebutkan di atas, struktur sosial juga memiliki fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi struktur sosial menurut Koentjaraningrat (1988), terdiri dari tiga, yaitu: Fungsi identitas, kontrol, dan pembelajaran. Penjelasan ketiga fungsi tersebut, dapat disajikan seperti dibawah ini:

4.1. Fungsi Identitas

Struktur sosial berfungsi sebagai penegas identitas yang dimiliki oleh sebuah kelompok. Kelompok yang anggotanya memiliki kesamaan dalam latar belakang ras, sosial, dan budaya akan mengembangkan struktur sosialnya sendiri sebagai pembeda dari kelompok lainnya.

4.2. Fungsi Kontrol

Dalam kehidupan bermasyarakat, selalu muncul kecenderungan dalam diri individu untuk melanggar norma, nilai, atau peraturan lain yang berlaku dalam masyarakat. Bila individu tadi mengingat peranan dan status yang dimilikinya

dalam struktur sosial, kemungkinan individu tersebut akan mengurungkan niatnya melanggar aturan. Pelanggaran aturan akan berpotensi menimbulkan konsekuensi yang pahit.

4.3. Fungsi Pembelajaran

Individu belajar dari struktur sosial yang ada dalam masyarakatnya. Hal ini dimungkinkan mengingat masyarakat merupakan salah satu tempat berinteraksi. Banyak hal yang bisa dipelajari dari sebuah struktur sosial masyarakat, mulai dari sikap, kebiasaan, kepercayaan dan kedisiplinan.

5. Bentuk-Bentuk Struktur Sosial

Selain fungsi-fungsi struktur sosial yang disebutkan di atas, Struktur sosial juga memiliki bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk tersebut, antara lain:

5.1. Kelompok Sosial

Kelompok sosial menurut Smelser (1981) adalah kehidupan bersama manusia dalam himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang umumnya secara fisik relative kecil yang hidup secara guyub. Ada juga beberapa kelompok social yang dibentuk secara formal dan memiliki aturan-aturan yang jelas. Berdasarkan struktur kelompok dan proses sosialnya, maka kelompok social dapat dibagi menjadi beberapa karakter yang penting. Ada empat kelompok sosial yang dapat dibagi berdasarkan struktur masing-masing kelompok menurut Smelser (1981), yaitu:

Pertama, Kelompok Formal-sekunder. Kelompok sosial yang umumnya bersifat sekunder, formal, memiliki aturan dan struktur yang tegas, serta dibentuk berdasarkan tujuan-tujuan yang jelas pula. Kelompok ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Adanya kesadaran anggota bahwa ia adalah bagian dari kelompok yang bersangkutan, (2) Setiap anggota memiliki hubungan timbal balik dengan anggota lainnya dan bersedia melakukan hubungan-hubungan fungsional diantara mereka, (3) Setiap anggota kelompok menyadari memiliki faktor-faktor kebersamaan diantara mereka, di mana kebersamaan ini mendorong kohesifitas kelompok itu sendiri, (4) Kelompok sosial ini memiliki struktur yang jelas dan tegas, termasuk juga prosedur suksesi dan kaderisasi, (5) Memiliki aturan formal yang mengikat setiap anggota kelompok dalam struktur yang ada termasuk juga

mengatur mekanisme struktur dan sebagainya, (6) Anggota dalam kelompok formal-sekunder memiliki pola dan pedoman perilaku sebagaimana diatur oleh kelompok secara umum, (7) Kelompok sosial ini memiliki sistem kerja yang berpola, berstruktur, dan berproses dalam mencapai tujuan-tujuan kelompok, (8) Kelompok sosial formal-sekunder memiliki kekuatan mempertahankan diri, mengubah diri (adaptasi), rehabilitasi diri, serta kemampuan menyerang kelompok lain, (9) Kelompok sosial formal-sekunder memiliki masa (umur) hidup yang dikendalikan oleh faktor-faktor internal dan eksternal,

Kedua, Kelompok formal-primer. Kelompok sosial yang umumnya bersifat formal namun keberadaannya bersifat primer. Kelompok ini tidak memiliki aturan yang jelas, walaupun tidak dijalankan secara tegas. Begitu juga kelompok sosial ini memiliki struktur yang tegas walaupun fungsi-fungsi struktur ini diimplementasikan secara guyub. Terbentuknya kelompok ini didasarkan oleh tujuan-tujuan yang jelas ataupun tujuan yang abstrak. Contoh dari kelompok formal primer adalah keluarga inti, kelompok kekerabatan dan kelompok-kelompok primordial,

Ketiga, Kelompok Informal-Sekunder. Kelompok sosial yang umumnya informal namun keberadaannya bersifat sekunder. Kelompok ini bersifat tidak mengikat, tidak memiliki aturan dan struktur yang tegas serta dibentuk berdasarkan sesaat dan tidak mengikat bahkan bisa terbentuk walaupun memiliki tujuan-tujuan yang kurang jelas. Contoh kelompok ini adalah klik, kelompok persahabatan, kelompok anak muda (geng), kelompok percintaan (pacaran), dan semacamnya,

Keempat, Kelompok Informal-Primer. Kelompok sosial yang terjadi akibat meleburnya sifat-sifat kelompok sosial formal-primer atau disebabkan karena pembentukan sifat-sifat di luar kelompok formal-primer yang tidak dapat ditampung oleh kelompok formal-primer. Kelompok ini juga merupakan bentuk lain dari kelompok informal-sekunder terutama menonjol di hubungan-hubungan mereka yang sangat pribadi dan mendalam.

Smelser (1981) lebih lanjut menjelaskan bahwa selain empat tipe kelompok sosial di atas, tipe lain dari kelompok sosial dapat pula didasarkan atas

jumlah (besar kecilnya jumlah anggota), wilayah (desa, kota, negara), kepentingan (tetap atau permanen atau sementara), derajat interaksi (erat atau kurang eratnya hubungan) atau kombinasi dari ukuran yang ada. Pada umumnya kelompok sosial di atas adalah kelompok sosial yang teratur, artinya mudah diamati dan memiliki struktur yang relatif jelas.

Ada pula kelompok sosial yang tidak teratur, artinya sulit diamati strukturnya dan sifatnya sementara seperti kerumunan dan publik. Kerumunan merupakan kelompok manusia yang terbentuk secara kebetulan, tiba-tiba dalam suatu tempat dan waktu yang sama karena kebetulan memiliki pusat perhatian yang sama. Pada kerumunan, umumnya tidak ada interaksi sosial di antara orang-orang, begitu juga di antara mereka tidak ada ikatan sosial yang mendalam walaupun mungkin memiliki perasaan yang sama dengan orang lain yang berada di tempat yang sama itu (Smelser, 1981).

Sebagaimana kenyataannya, Smelser (1981) mengatakan bahwa manusia pada awalnya lahir dalam kelompok formal-primer yaitu keluarga, di mana kelompok ini disebut sebagai salah satu dari jenis kelompok-kelompok kecil yang paling berkesan bagi setiap individu. Isolasi kehidupan individu dalam keluarga tak bertahan lama, karena seiring dengan perkembangan fisik, intelektual, pengalaman dan kesempatan, individu mulai melepas hubungan-hubungan keluarga dan memasuki dan menyebar untuk menjalankan berbagai kegiatannya dan bertemu dengan manusia lain yang memiliki kesamaan tujuan, kepentingan, dan berbagi aspirasi lainnya. Dalam proses pelepasan tersebut, membentuk kelompok lainnya individu, lalu beradaptasi. Di dalam kelompok, masing-masing anggota berkomunikasi, saling berinteraksi, saling pengaruh memengaruhi satu dengan lainnya.

Pergaulan dalam kelompok tersebut memengaruhi dan menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang melembaga bagi setiap anggota kelompok, kebiasaan itu menciptakan pola perilaku yang dilakukan terus-menerus. Perilaku yang sudah berpola-pola itu akan membentuk sikap setiap anggota kelompok. Kebiasaan yang melembaga, perilaku, dan sikap tersebut berjalan secara simultan di antara individu dan kelompok. Berger dan Lukmann (1966) mengatakan bahwa proses

konstruksi sosial yang terjadi secara simultan dalam tiga proses, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Sehingga pada tahap berikutnya individu akan menginternalisasikan semua sikap dan perilaku yang diperoleh dari kelompoknya dalam kehidupan pribadinya.

5.2. Lembaga Sosial

Lembaga sosial menurut Sanderson (2000), adalah sekumpulan tata aturan yang mengatur interaksi dan proses-proses sosial di dalam masyarakat. Lembaga sosial memungkinkan setiap struktur dan fungsi serta harapan-harapan setiap anggota dalam masyarakat dapat berjalan, dan memenuhi harapan sebagaimana yang disepakati bersama. Dengan kata lain lembaga sosial digunakan untuk menciptakan ketertiban.

Wujud konkret dari lembaga sosial yang dikemukakan Sanderson (2000), adalah aturan, norma, adat istiadat dan semacamnya yang mengatur kebutuhan masyarakat dan telah terinternalisasi dalam kehidupan manusia, dengan kata lain lembaga sosial adalah sistem norma yang telah melembaga atau menjadi kelembagaan di suatu masyarakat. Misalnya, kebutuhan orang terhadap penyembuhan penyakit, menghasilkan kedokteran, perdukunan, penyembuhan alternatif. Sanderson (2000) lebih lanjut menjelaskan bahwa kebutuhan manusia terhadap pendidikan bagi anggota keluarganya, melahirkan pesantren, taman pendidikan bagi anggota keluarganya, melahirkan pesantren, taman kanak-kanak, sekolah menengah, perguruan tinggi, dan lainnya. Kebutuhan akan mata pencaharian, menimbulkan sistem mata pencaharian pertanian, peternakan, koperasi, industri. Kebutuhan manusia terhadap perkawinan, melahirkan sistem perkawinan dan keluarga. Kebutuhan akan keindahan, menimbulkan kesusastraan, kesenian. Kebutuhan kesehatan jasmani, menimbulkan lembaga pemeliharaan kesehatan, kedokteran kecantikan, dan lainnya.

5.3. Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial menurut Soekanto (2002), adalah struktur sosial yang berlapis-lapis di dalam masyarakat. Lapisan sosial menunjukkan bahwa masyarakat memiliki strata, mulai dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Secara fungsional, lahirnya strata sosial ini karena kebutuhan masyarakat terhadap

sistem produksi yang dihasilkan oleh masyarakat di setiap strata, di mana sistem produksi itu mendukung secara fungsional masing-masing strata.

Lebih lanjut Soekanto (2002) menjelaskan dengan mengutip dari Pitirim Sorokin bahwa stratifikasi sosial itu adalah pembedaan penduduk dan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat, yaitu kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas rendah. Setiap masyarakat selalu mempunyai lapisan, mulai yang sederhana sampai yang rumit, tergantung dari teknologi yang dikuasai masyarakat tersebut. Dalam masyarakat yang kompleks, maka perbedaan kedudukan dan peranan juga bersifat kompleks.

Secara umum, strata sosial di masyarakat menurut Soekanto (2002), melahirkan kelas-kelas sosial yang terdiri dari tiga tingkatan, yaitu atas (*upper class*), menengah (*middle class*), dan bawah (*lower class*). Kelas atas mewakili kelompok elite di masyarakat yang jumlahnya sangat terbatas. Kelas menengah mewakili kelompok profesional, kelompok pekerja, wiraswastawan, pedagang, dan kelompok fungsional lainnya. Sedangkan kelas bawah mewakili kelompok pekerja kasar, buruh harian, buruh lepas, dan sebagainya. Secara khusus, kelas sosial ini terjadi pada lingkungan-lingkungan khusus pada bidang tertentu sehingga content varian strata sosial sangat spesifik berlaku pada lingkungan itu. *Content varian* lebih banyak menyangkut varian strata dalam satu lingkungan yang membedakannya dengan strata pada lingkungan lainnya. Jadi, apabila kelas sosial di suatu lingkungan sosial menempati struktur strata yang paling tinggi belum tentu kelas yang sama terjadi pada strata sosial lainnya di tempat lain pula.

Kelas sosial dengan strata sosial tertentu adakalanya terbentuk dengan sendirinya, ada pula yang dibentuk berdasarkan hukumnya. Strata kelas sosial yang terbentuk dengan sendirinya adalah berdasarkan pada kepandaian, tingkat umur, sifat keaslian keanggotaan kerabat, harta dalam batas-batas tertentu. Sedangkan strata kelas sosial yang dibentuk berdasarkan tujuan tertentu adalah seperti pemimpin dan yang dipimpin, yang memiliki kekayaan dan yang tidak, dan yang memiliki kekuasaan atau yang rakyat biasa. Dasar pembentukan kelas sosial menurut Soekanto (2002), yaitu: (1) ukuran kekayaan, (2) ukuran

kepercayaan, (3) besaran kekuasaan, (4) ukuran keselamatan, dan (5) ukuran ilmu pengetahuan dan pendidikan.

5.4. Mobilitas Sosial

Narwoko dan Uyanto (2004) mengutip dari Horton dan Hunt bahwa mobilitas sosial dapat diartikan sebagai suatu gerak perpindahan dari suatu kelas ke kelas sosial lainnya. Mobilitas bisa berupa peningkatan atau penurunan dalam segi status sosial dan biasanya termasuk pula segi penghasilan yang dapat dialami oleh beberapa individu atau oleh keseluruhan anggota kelompok.

Dengan demikian, secara umum ada tiga jenis mobilitas sosial, yaitu gerak sosial yang meningkat (*social climbing*), gerak sosial menurun (*social sinking*), dan gerak sosial horizontal. Ketiga jenis mobilitas sosial ini dapat dialami oleh siapa saja dan kapan saja sesuai dengan bagaimana seseorang mengekspresikan lingkungan sosial dan bagaimana lingkungan sosial mengekspresikan seseorang secara timbal balik.

5.5. Kebudayaan

Kebudayaan menurut Koentjaraningrat (1988), adalah produk dari seluruh rangkaian proses sosial yang dijalankan oleh manusia dalam masyarakat dengan segala aktivitasnya. Dengan demikian, maka kebudayaan adalah hasil nyata dari sebuah proses sosial yang dijalankan oleh manusia bersama masyarakatnya.

Pernyataan di atas sejalan dengan Soemardjan (1974) bahwa kebudayaan sebagai hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya, yakni masyarakat menghasilkan *material culture* seperti teknologi dan karya-karya kebendaan atau budaya materi (fisik) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai dan menundukan alam sekitarnya, sehingga budaya yang bersifat fisik ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Soemardjan (1974) lebih lanjut menjelaskan bahwa rasa merupakan *spiritual culture* (nonfisik) yang meliputi unsur mental dan kejiwaan manusia. Rasa menghasilkan kaidah-kaidah, nilai-nilai sosial, hukum, dan norma sosial atau yang disebut dengan pranata sosial. Apa yang dihasilkan rasa digunakan untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan. Misalnya agama, kesenian, ideologi,

kebatinan, dan sebagainya. Sementara itu, cipta merupakan *immaterial culture* yang menghasilkan pranata sosial, namun cipta yang menghasilkan gagasan, berbagai teori, wawasan dan semacamnya yang bermanfaat bagi manusia. Sedangkan karsa menurut Soemardjan (1974), merupakan kemampuan untuk menempatkan karya, rasa, dan cipta, pada tempatnya agar sesuai dengan kegunaan dan kepentingan bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian karsa adalah kecerdasan dalam menggunakan karya, rasa dan cipta secara fungsional sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat lebih bagi manusia dan masyarakat secara luas.

B. Teori Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial atas realitas (*Social Construction of Reality*) menurut Berger dan Luckmann (1966), adalah proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu atau sekelompok individu, menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Teori ini berakar pada paradigma konstruktivis yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu, yang merupakan manusia bebas. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya, yang dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya. Dalam proses sosial, manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya.

Konstruksi sosial merupakan teori sosiologi kontemporer, dicetuskan oleh Berger dan Luckmann (1966). Teori ini merupakan suatu kajian teoritis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan (penalaran teoritis yang sistematis), bukan merupakan suatu tinjauan historis mengenai perkembangan disiplin ilmu. Pemikiran Berger dan Luckmann dipengaruhi oleh pemikiran sosiologi lain, seperti Schutzian tentang fenomenologi, Weberian tentang makna-makna subjektif, Durkheimian – Parsonian tentang struktur, pemikiran Marxian tentang dialektika, serta pemikiran Herbert Mead tentang interaksi simbolik.

Asal usul kontruksi sosial menurut Suparno (1997), yaitu dari filsafat konstruktivisme, yang dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif. Dalam aliran filsafat, gagasan konstruktivisme telah muncul sejak Socrates menemukan jiwa dalam tubuh manusia, dan Plato menemukan akal budi. Gagasan tersebut semakin konkret setelah Aristoteles mengenalkan istilah, informasi, relasi, individu, substansi, materi, esensi, dan sebagainya. Ia mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, setiap pernyataan harus dapat dibuktikan kebenarannya, serta kunci pengetahuan adalah fakta. Suparno (1997) mengutip ungkapan Aristoteles: *Cogito ergo sum*, yang artinya saya berfikir karena itu saya ada, menjadi dasar yang kuat bagi perkembangan gagasan-gagasan konstruktivisme sampai saat ini.

Lebih lanjut Suparno (1997) menjelaskan bahwa seorang epistemolog dari Italia bernama Giambattista Vico, yang merupakan pencetus gagasan-gagasan pokok Konstruktivisme, dalam *De Antiquissima Italorum Sapientia*, mengungkapkan filsafatnya bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan. Menurutnya, hanya Tuhan sajalah yang dapat mengerti alam raya ini karena hanya Ia yang tahu bagaimana membuatnya dan dari apa Ia membuatnya, sementara itu orang hanya dapat mengetahui sesuatu yang telah dikonstruksikannya.

Suparno (1997) mengemukakan bahwa ada tiga macam Konstruktivisme, yaitu: (1) Konstruktivisme radikal, hanya dapat mengakui apa yang dibentuk oleh pikiran kita, dan bentuknya tidak selalu representasi dunia nyata. Kaum konstruktivisme radikal mengesampingkan hubungan antara pengetahuan dan kenyataan sebagai suatu kriteria kebenaran. Pengetahuan bagi mereka tidak merefleksi suatu realitas ontologism obyektif, namun sebuah realitas yang dibentuk oleh pengalaman seseorang. Pengetahuan selalu merupakan konstruksi dari individu yang mengetahui dan tidak dapat ditransfer kepada individu lain yang pasif, (2) Realisme hipotesis, pengetahuan adalah sebuah hipotesis dari struktur realitas yang mendekati realitas dan menuju kepada pengetahuan yang hakiki, dan (3) Konstruktivisme biasa, mengambil semua konsekuensi konstruktivisme, serta memahami pengetahuan sebagai gambaran dari realitas itu.

Pengetahuan individu dipandang sebagai gambaran yang dibentuk dari realitas objektif dalam dirinya sendiri.

Dari ketiga macam konstruktivisme terdapat kesamaan, dimana konstruktivisme dilihat sebagai proses kerja kognitif individu untuk menafsirkan dunia realitas yang ada, karena terjadi relasi sosial antara individu dengan lingkungan atau orang di sekitarnya. Kemudian Individu membangun sendiri pengetahuan atas realitas yang dilihatnya berdasarkan pada struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya, inilah yang disebut dengan konstruksi sosial menurut Berger dan Luckmann (1966).

Berger dan Luckman (1966) berpendapat bahwa institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia, walaupun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataannya semua dibentuk dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Objektivitas dapat terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain, yang memiliki definisi subjektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidup menyeluruh yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial, serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupannya.

Berger dan Luckman (1966) mengemukakan bahwa realitas sosial memiliki tiga bentuk, yaitu: (1) Realitas sosial objektif, merupakan suatu kompleksitas definisi realitas (termasuk ideologi dan keyakinan) gejala-gejala sosial, seperti tindakan dan tingkah laku yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan sering dihadapi oleh individu sebagai fakta, (2) Realitas sosial simbolik, merupakan ekspresi bentuk-bentuk simbolik dari realitas objektif, yang umumnya diketahui oleh khalayak dalam bentuk karya seni, fiksi serta berita-berita di media, dan (3) Realitas sosial subjektif, merupakan realitas sosial pada individu, yang berasal dari realitas sosial objektif dan realitas sosial simbolik, merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realitas subjektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan

basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial.

Setiap peristiwa merupakan realitas sosial objektif dan merupakan fakta yang benar-benar terjadi. Realitas sosial objektif ini diterima dan diinterpretasikan sebagai realitas sosial subjektif dalam diri pekerja media dan individu yang menyaksikan peristiwa tersebut. Pekerja media mengkonstruksi realitas subjektif yang sesuai dengan seleksi dan preferensi individu menjadi realitas objektif yang ditampilkan melalui media dengan menggunakan simbol-simbol. Tampilan realitas di media inilah yang disebut realitas sosial simbolik dan diterima pemirsa sebagai realitas sosial objektif karena media dianggap merefleksikan realitas sebagaimana adanya.

Menurut Berger dan Luckmann (1966) bahwa kenyataan itu dibangun secara sosial, dalam pengertian individu-individu dalam masyarakat yang telah membangun masyarakat, maka pengalaman individu tidak dapat terpisahkan dengan masyarakat. Manusia sebagai pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui tiga momen dialektis yang simultan, yaitu:

1. Eksternalisasi

Eksternalisasi merupakan usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Proses ini merupakan bentuk ekspresi diri untuk menguatkan eksistensi individu dalam masyarakat. Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai produk manusia (*Society is a human product*),

2. Objektivasi

Objektivasi merupakan hasil yang telah dicapai (baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia), berupa realitas objektif yang mungkin akan menghadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada diluar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya (hadir dalam wujud yang nyata). Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai realitas yang objektif (*Society is an objective reality*) atau proses interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi.

3. Internalisasi

Internalisasi merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa, sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifikasi akan ditangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi manusia menjadi hasil dari masyarakat (*Man is a social product*).

Eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi adalah dialektika yang berjalan simultan, artinya ada proses menarik keluar (eksternalisasi) sehingga seakan-akan hal itu berada di luar (objektif) dan kemudian terdapat proses penarikan kembali ke dalam (internalisasi) sehingga sesuatu yang berada di luar tersebut seakan-akan berada dalam diri atau kenyataan subyektif. Pemahaman akan realitas yang dianggap objektif pun terbentuk, melalui proses eksternalisasi dan objektifikasi, individu dibentuk sebagai produk sosial. Sehingga dapat dikatakan, setiap individu memiliki pengetahuan dan identitas sosial sesuai dengan peran institusional yang terbentuk atau yang diperankannya.

C. Teori Perubahan Sosial

Perubahan merupakan proses yang terus menerus terjadi dalam setiap masyarakat. Proses perubahan itu menurut Sihabudin (2011), ada yang berjalan sedemikian rupa sehingga tidak terasa oleh masyarakat pendukungnya. Gerak perubahan yang sedemikian itu disebut evolusi. Sosiologi mempunyai gambaran adanya perubahan evolusi masyarakat dari masyarakat sederhana ke dalam masyarakat modern. Proses gerak perubahan tersebut ada dalam satu rentang tujuan ke dalam masyarakat modern. Berangkat dari pemikiran teori evolusi Comte tentang perubahan sosial. Sihabudin (2011) mengutip dari Martindale, menyebutkan bahwa titik tolak pemikiran Comte adalah pandangannya tentang masyarakat dengan memanfaatkan konsep-konsep biologi, yakni: (1) Masyarakat berkembang secara linier (searah), yakni dari primitif ke arah masyarakat yang lebih maju, (2) Proses evolusi yang dialami masyarakat mengakibatkan perubahan-perubahan yang berdampak terhadap perubahan nilai-nilai dan

berbagai anggapan yang dianut masyarakat, (3) Pandangan subjektif tentang nilai dibaurkan dengan tujuan akhir perubahan sosial. Hal ini terjadi karena masyarakat modern merupakan bentuk masyarakat yang dicita-citakan memiliki label yang baik dan lebih sempurna, seperti kemajuan, kemanusiaan, dan sivilisasi, dan (4) Perubahan sosial yang terjadi dari masyarakat sederhana ke arah masyarakat modern berlangsung lambat, tanpa menghancurkan fondasi yang membangun masyarakat, sehingga memerlukan, sehingga memerlukan waktu yang panjang.

Berkaitan hal di atas, Sihabuddin (2011) menjelaskan bahwa perubahan sosial sudah diperkenalkan oleh beberapa ahli teoritis sosiologi klasik, antara lain: Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim, dan George Simmel. Keempatnya membahas masalah kemunculan dari pengaruh modernitas. Menurut Marx, bahwa modernitas ditentukan oleh ekonomi kapitalis, ia mengakui kemajuan yang ditimbulkan oleh transisi masyarakat sebelumnya ke masyarakat kapitalisme. Namun dalam karya-karyanya, sebagian besar perhatiannya ditujukan untuk mengkritik sistem ekonomi kapitalis dan kecacatannya berkaitan alienasi dan eksploitasi. Menurut Weber, masalah kehidupan modern yang paling menentukan adalah perkembangan rasionalitas formal. Rasional formal yang dimaksudkan Weber, meliputi proses berfikir aktor dalam membuat pilihan mengenai alat dan tujuan. Dalam hal ini pilihan dibuat dengan merujuk pada kebiasaan, peraturan, dan hukum yang diterapkan secara universal. Ketiganya berasal dari berbagai struktur berskala besar, terutama struktur birokrasi dan ekonomi. Keadaan rasionalitas inilah mengakibatkan munculnya kerangkeng-besi rasionalitas. Manusia semakin terperjara dalam kerangkeng-besi ini dan akibatnya semakin tak mampu mengungkapkan beberapa ciri kemanusiaan mereka yang paling mendasar

Menurut Ogburn (1922) perubahan sosial adalah perubahan yang mencakup unsur-unsur kebudayaan baik material maupun immaterial yang menekankan adanya pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial. Kebudayaan materil adalah sumber utama kemajuan. Aspek kebudayaan non-materil harus menyesuaikan diri dengan perkembangan kebudayaan materil, dan jurang pemisah antara keduanya akan

menjadi masalah sosial. Menurut Ogburn (1922) bahwa teknologi adalah mekanisme yang mendorong perubahan, manusia selamanya berupaya memelihara dan menyesuaikan diri dengan alam yang senantiasa diperbaharui oleh teknologi. Ogburn (1922) memusatkan perhatian pada perkembangan teknologi dan ia menjadi terkenal karena mengembangkan ide mengenai ketertinggalan budaya dan penyesuaian tak terelakkan dari faktor-faktor kebudayaan terhadap teknologi.

Teori Materialis yang disampaikan oleh Ogburn (1922) pada intinya mengemukakan bahwa: (1) Penyebab dari perubahan adalah adanya ketidakpuasan masyarakat karena kondisi sosial yang berlaku pada masa yang mempengaruhi pribadi mereka, (2) Meskipun unsur-unsur sosial satu sama lain terdapat hubungan yang berkesinambungan, namun dalam perubahan ternyata masih ada sebagian yang mengalami perubahan tetapi sebagian yang lain masih dalam keadaan tetap (statis). Hal ini juga disebut dengan istilah *cultural lag*, ketertinggalan menjadikan kesenjangan antar unsur-unsur yang berubah sangat cepat dan yang berubah lambat. Kesenjangan ini akan menyebabkan kejutan sosial pada masyarakat. Ketertinggalan budaya menggambarkan bagaimana beberapa unsur kebudayaan tertinggal di belakang perubahan yang bersumber pada penciptaan, penemuan dan difusi. Teknologi, menurut Ogburn, berubah terlebih dahulu, sedangkan kebudayaan berubah paling akhir. Dengan kata lain kita berusaha mengejar teknologi yang terus menerus berubah dengan mengadaptasi adat dan cara hidup kita untuk memenuhi kebutuhan teknologi. Teknologi menyebabkan terjadinya perubahan sosial cepat yang sekarang melanda dunia. Perubahan teknologi akan lebih cepat dibanding dengan perubahan pada perubahan budaya, pemikiran, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma yang menjadi alat untuk mengatur kehidupan manusia. Oleh karena itu, perubahan seringkali menghasilkan kejutan sosial yang yang pada gilirannya akan memunculkan pola-pola perilaku baru, meskipun terjadi konflik dengan nilai-nilai tradisional.

Ogburn (1922) mengusulkan suatu pandangan mengenai perubahan sosial yang didasarkan pada teknologi. Menurutnya teknologi mengubah masyarakat

melalui lima proses, yaitu: (1) Penciptaan. Ogburn (1922) mendefinisikan penciptaan sebagai suatu kombinasi unsur dan bahan yang ada untuk membentuk unsur dan bahan yang baru. Kita biasanya hanya memikirkan penciptaan sebagai suatu yang bersifat materiil seperti komputer, namun ada juga yang disebut dengan penciptaan sosial, contoh kapitalisme, birokrasi, korporasi, dan lain-lain, (2) Penemuan. Ogburn (1922) mengidentifikasikan penemuan sebagai suatu cara baru melihat kenyataan, sebagai suatu proses perubahan kedua. Kenyataannya sendiri sudah ada, tetapi orang baru melihatnya tetapi orang baru melihatnya untuk pertama kali. Salah satu contohnya adalah penemuan Amerika Utara oleh Columbus, yang membawa konsekuensi besar sehingga mengubah perjalanan sejarah manusia, (3) Difusi. Ogburn (1922) menekankan bahwa difusi penyebaran suatu penciptaan dan penemuan dari suatu wilayah ke wilayah lain, dapat berakibat besar pada kehidupan orang. Contohnya, ketika para misionaris memperkenalkan kapak baja kepada orang Aborigin di Australia, (4) Akumulasi. Ogburn (1922) menyatakan bahwa akumulasi dihasilkan dari lebih banyaknya unsur baru yang ditambahkan kepada satu kebudayaan dibanding dengan unsur-unsur lama yang lenyap dari kebudayaan bersangkutan, dan (5) Penyesuaian. Ogburn (1922) menjelaskan bahwa penyesuaian mengacu pada masalah yang timbul dari saling ketergantungan seluruh aspek kebudayaan. Sebagai contoh, penemuan di bidang ekonomi tanpa terelakkan akan mempengaruhi pemerintah menurut cara tertentu, pemerintah terpaksa menyesuaikan diri terhadap situasi yang dihadapkan oleh perubahan ekonomi atau teknologi baru akan mempunyai dampak terhadap keluarga, memaksa keluarga menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, meskipun penemuan teknologi berkaitan langsung dengan keluarga.

D. Konsep Falah dalam Islam

1. Pengertian Falah

Apa itu falah? Sebelum menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu akan dijelaskan apa itu kesejahteraan. Karena kesejahteraan dan falah adalah dua hal yang sangat erat kaitannya satu sama lain. Pengertian kesejahteraan dalam Islam

didasarkan pada pandangan yang komperhensif tentang kehidupan ini, dan mencakup dua hal (Misanam, 2014: 4-5), yaitu:

Pertama, Kesejahteraan holistik dan seimbang. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas dua unsur, yaitu: fisik dan jiwa, dan kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang di antara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual dan sosial. Manusia akan merasa bahagia apabila terdapat keseimbangan di antara dirinya sendiri dengan lingkungannya.

Kedua, Kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditujukan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan akhirat. Jika kondisi idel ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai jika dibandingkan dengan kehidupan dunia.

Pengertian kedua di atas, yakni kesejahteraan dunia dan akhirat, sangat erat kaitanya dengan falah. Kembali ke pertanyaan awal, apa itu falah? Falah menurut bahasa, berasal dari bahasa arab yang artinya kesuksesan, kemuliaan, atau kemenangan, yaitu kemenangan dan kemuliaan dalam hidup. Istilah falah menurut Islam diambil dari kata-kata al-Quran (misalnya, menggunakan kata *muflihun* dalam QS. Ali 'Imran [3] ayat 104, dll., dengan kata *aflahah* dalam QS. al-Mu'minin [23] ayat 1, dll.) yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material saja namun lebih ditekankan pada aspek spiritual. Jika demikian adanya, maka falah merupakan konsep yang multi dimensi. Ia memiliki implikasi pada aspek perilaku individual/mikro maupun perilaku kolektif/makro.

Meskipun dalam konteks duniawi, falah merupakan konsep yang multi dimensi, namun setidaknya falah di dunia mencakup tiga pengertian, yaitu: kelangsungan hidup, kebebasan dari kemiskinan serta kekuatan dan kehormatan. Sementara itu untuk kehidupan akhirat falah mencakup pengertian kelangsungan

hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi dan pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan.

Namun, falah ini hanya dapat dicapai dengan suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayatan thayyibah*). Sementara kehidupan ini hanya dapat dicapai dengan implementasi ajaran Islam secara *kaffah* serta menerapkan nilai-nilai dalam seluruh aspek kehidupan yang dibingkai dengan syariat Islam.

2. Falah sebagai Tujuan Hidup

Falah merupakan tujuan hidup bagi setiap manusia yang dibawa oleh Islam yang mencakup aspek yang lengkap dan menyeluruh bagi kehidupan manusia. Aspek ini meliputi spiritual dan moralitas, ekonomi, sosial dan budaya, serta politik. Misalnya, untuk memperoleh kelangsungan hidup, maka dalam aspek mikro manusia membutuhkan: (1) Pemenuhan kebutuhan biologis seperti kesehatan fisik atau bebas dari penyakit, (2) Faktor ekonomis, misalnya memiliki sarana kehidupan, dan (3) Faktor sosial, adanya persaudaraan dan hubungan antarpersonal yang harmonis. Sedangkan dalam aspek makro kesejahteraan menuntut adanya keseimbangan ekologi, lingkungan yang higienis, manajemen lingkungan hidup dan lain-lain.

Akhirat merupakan kehidupan yang diyakini nyata-nyata ada dan akan terjadi, memiliki nilai kuantitas dan kualitas yang lebih berharga dibandingkan dunia. Kehidupan dunia akan berakhir dengan kematian atau kemusnahan, sedangkan kehidupan akhirat bersifat abadi atau kekal. Kehidupan dunia merupakan ladang bagi pencapaian tujuan akhirat dan kebahagiaan dunia. Jika demikian adanya, maka falah mengandung makna kondisi maksimum dalam kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Dalam praktik kehidupan di dunia, kehidupan akhirat tidak dapat diobservasi, namun perilaku manusia di dunia akan dipertanggung jawabkan atau akan berpengaruh kepada kehidupannya di akhirat kelak nanti. Dalam praktiknya, upaya manusia untuk mewujudkan kebahagiaannya di dunia ini sering kali dapat menimbulkan dampak negatif terhadap orang lain, kelestarian lingkungan hidup manusia jangka panjang. Ketidak kemampuan manusia dalam menyeimbangkan kegiatan dunia dan kegiatan akhirat bisa berakibat pada kegagalan dalam

mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena itu, dalam ekonomi Islam ditekankan mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materinya di dunia ini sehingga tercapai kesejahteraan yang akan membawanya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Misanam, 2014: 3-4).

Manusia dapat mencapai falah tergantung pada perilaku dan keadaannya di dunia. Secara umum, manusia menghadapi kesulitan dalam mengharmonisasikan berbagai tujuan dalam hidupnya karena keterbatasan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa untuk mencapai falah, manusia harus menyadari hakikat keberadaannya di dunia, yakni mengapa kita tercipta di dunia ini. Sesungguhnya manusia tercipta karena kehendak yang menciptakannya, ia mengikuti petunjuk pencipta. Perilaku manusia semacam inilah yang dalam agama Islam disebut ibadah, yaitu setiap keyakinan, sikap, ucapan, maupun, tindakan mengikuti petunjuk Allah, baik terkait dengan hubungan sesama manusia (muamalah) ataupun manusia dengan penciptanya (ibadah mahdhah). Di sinilah agama Islam memiliki ajaran yang lengkap, menuntun setiap aspek kehidupan manusia agar berhasil dalam mencapai tujuan hidupnya. Dengan demikian, ibadah merupakan alat atau jalan yang digunakan untuk mencapai falah.

E. Agama dan Nilai Kearifan Lokal

Rangkaian hidup manusia dan lingkungan, tidak terlepas dari nalar serta insting perilakunya. Perilaku yang seseorang mungkin dilakukan akan menjadi unsur-unsur keberadaan budaya di lingkungan. Sehingga dari situlah leluhur menanamkan nilai-nilai aliran kepercayaan dengan konteks lokalitas pada suatu daerah. Masyarakat dan lingkungan tidak bisa terlepas satu sama lainnya, mereka saling kait mengait terhadap adanya pembangunan peradaban religi (Abdullah, dkk., 2008).

Daya dukung dari banyaknya konsumtifme berbagai kejiwaan hidup menjadikan faktor dominan warga lingkungan, dan apabila unsur-unsur dari keyakinan tersebut dilanggar maka ditakutkan terkena bencana. Namun realita yang ada bahwasanya kehidupan masyarakat telah diwarnai berbagai pandangan

terkait perilaku beragama dan kehidupan lokal. Apalagi warga pendatang di suatu daerah, yang sejatinya telah membawa pandangannya sendiri dari daerah asal.

Lingkungan masyarakat merupakan lahan berprosesnya manusia dan alam untuk mencari jati dirinya. Banyak berbagai hal peristiwa yang terjadi dalam lingkungan telah membuktikan keberadaan manusia memiliki peran utama diberbagai sektor. Masyarakat dengan peran pentingnya membangun peradaban, serta berpacu dengan waktu dan ruang akhirnya dapat memberikan sumbangsuhnya membangun peradaban dengan santunnya.

Agama menjadi dasar berpijak manusia dalam mengarungi proses kehidupan di lingkungan. Dasar kehidupan yang baik akan melahirkan kemampuan manusia membangun kehidupan yang terbaik. Akulturasi yang menjadi bagian hidup manusia di suatu daerah telah memberikan simbolisasi hidup penuh makna. Kearifan lokal sifat dan karakter asli dari kehidupan manusia pada suatu lingkungan. Hakikatnya lingkungan sendiri yang membentuk karakternya adalah manusia dengan akal serta pikirannya (Abdullah, 2008).

Setiap daerah memiliki tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal yang berbeda, meskipun ada pula yang sama. Warga dalam lingkungan desa-desa, memberikan warna-warna hidup yang unik untuk dipelajari dan dikaji. Landasan berpikir dan bekerjasama dalam membangun ketoleransian bermasyarakat, beragama, dan berbudaya. Kehidupan masyarakat pada dasarnya memiliki ketoleransian yang dapat menempatkan kebersamaan dalam hidup bertetangga.

1. Agama

Atas nama dasar keyakinan dalam jiwa-jiwa manusia adalah adanya kehadiran kepercayaan semakin kuat. Apalagi dilandasi dengan sepenuh hati dan dilaksanakan perintah yang baik-baik. Dengan tujuan yang mulia, manusia hidup dengan beragam, sesuai dengan keyakinannya. Pada hakikatnya agama adalah pegangan hidup manusia yang berakal, beriman, dan dilandasi dengan sepenuh jiwa untuk menjalankan perintah agamanya (Abdullah, dkk., 2008).

Kehidupan manusia di desa-desa sangat menekankan sifat agamisnya, saling memberikan warna kehidupan agamanya dengan berarti. Terutama dalam proses kehidupan yang lebih baik secara pribadi maupun bermasyarakat.

Memahami dengan sifat religi, merupakan wujud penerapan nilai-nilai agama. Hal itu dapat dijadikan pedoman dalam membina keanekaragaman tradisi perilaku agama dan lingkungan masyarakat. Manusia dan agama tidak terlepas dari adanya pegangan hidup untuk menjalani kehidupan, baik secara individu maupun berjama'ah (Abdullah, dkk., 2008).

Agama memberikan nilai-nilai prosesi kehidupan yang agung pada setiap manusia yang mampu memahami, mengerti, dan menerapkan dalam kehidupan setiap hari. Akar rumput religi dan kearifan lokal dalam kehidupan dianutnya adalah memahami agama sebagai kebutuhan dasar pada jiwa-jiwa mulia yang terdapat pada manusia berakal dan beriman. Dia Sang Pencipta Alam telah memberikan anugerah pada seluruh makhluk, begitu pula dengan manusia (Abdullah, dkk., 2008).

Manusia dalam membangun peradabannya tidak terlepas dari adanya agama sebagai pondasi terbentuknya peradaban lokal yang santun dan beradab. Hiruk pikuk perjalanan manusia seiring dengan tersedianya tingkat pemahaman terkait nilai-nilai agama. Inilah yang biasa disebut dengan tindakan normatif dalam diri manusia. Sehingga manusia tanpa adanya agama, seperti kehidupan mengarungi lautan luas tanpa ada nahkoda, terombang ambing dengan gelombang laut yang begitu dahsyatnya. Namun apabila manusia memiliki pegangan agama, senantiasa kehidupannya menjadi tenang dan mampu menempatkan diri dimanapun (Abdullah, dkk., 2008).

Akal dan hati adalah bagian utama dalam menempatkan unsur-unsur proses kehidupan. Manusia menjalani proses kehidupan dengan berbagai karakter dan sifat humanisme, sehingga terlahirlah ragam bentuk karakter manusia di desa-desa. Karakter manusia yang sudah terakulturasi dengan sistem nilai-nilai agama, mampu dengan mudahnya menempatkan diri pada unsur-unsur kearifan lokal di lingkungannya (Abdullah, dkk., 2008).

Memiliki iman dalam beragama, manusia dapat memiliki pemikiran yang baik serta tunduk pada aturan Tuhannya. Kebahagiaan hidup yang ada di diri manusia tidak terlepas dari adanya agama sebagai pondasi mengakulturasi dengan

nilai-nilai lokal. Mayoritas untuk memecahkan permasalahan di masyarakat, agamalah memiliki peran penting.

2. Nilai Kearifan Lokal

Nilai merupakan faktor kabstrakan terhadap simbolisasi terkait dengan kehidupan. Keberadaan nilai hanya sebatas penyamatan pujian atau penggunjingan sekelompok atau individu. Nilai sebatas penyamatan terhadap suatu proses dan hasil, mengukur penilaian berdasarkan asumsi subjektivitas, atau simpulan dari adanya objek yang dinilai. Seperti adanya agama dan nilai lokal, yang di maksud nilai lokal disini adalah bentuk kearifan lokal yang sudah mengakar kuat terdapat di lingkungan masyarakat, warisan leluhur (Abdullah, dkk., 2008).

Nilai lokal juga tidak terlepas dari sisi kemanusiaan maupun proses kehidupan manusia. Sifat adab santun yang berlaku dalam hidup manusia memang tidak terlepas dari agama. Kearifan lokal yang tercermin dalam kehidupan manusia, baik individu maupun kelompok. Berbagai pengaruh dari adanya agama dan nilai lokal di lingkungan manusia akan menjadi faktor pendukung proses kehidupan (Abdullah, dkk., 2008).

Setiap manusia dalam suatu lingkungan memiliki beranekaragam tradisi, agama, dan nilai-nilai kearifan lokalitas. Sehingga manusia sendiri sudah sepatutnya untuk menghadirkan nilai-nilai agama pada kehidupannya, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Kehidupan manusia di desa-desa telah membuktikan adanya sifat religi dan nilai kearifan lokalitas yang humanisme. Keberadaan manusia, lingkungan, dan nilai agama memang menjadi kesatuan rangkaian yang terdapat pada diri makhluk yang bernama manusia (Abdullah, dkk., 2008).

Hidup secara toleransi yang terdapat di desa-desa, telah menyuguhkan proses kehidupan yang baik. Sehingga secara tidak langsung adanya peradaban di desa-desa telah memberikan suatu gambaran kehidupan masyarakatnya antara agama dan nilai kearifan lokal. Manusia dan lingkungan merupakan tempat berproses hidup untuk memenuhi hasrat sebagai makhluk Tuhan (Abdullah, dkk., 2008).

Lingkungan adalah hasil cipta, karya, dan karsa manusia menjalani kehidupan. Keunikan manusia secara humanisme memang patut untuk dikaji dan didokumentasikan dengan baik. Mengingat kehidupan manusia pada suatu kawasan dapat memberikan pelajaran hidup. Disinilah letak leluhur, manusia dahulu yang sudah membangun peradabannya dengan santun kehidupan. Sinergitas hidup memang sangat dibutuhkan, mengingat rangkaian hidup saling mendukung dan memberikan nilai kearifan lokal (Abdullah, dkk., 2008).

Sartono Kartodirdjo (1993: 99) mengatakan bahwa dalam masyarakat tradisional pola kehidupan diatur oleh kaidah-kaidah dari nenek moyang yang dianggap berlaku terus. Tradisi yang berlaku dalam masyarakat sangat mapan sehingga memperkuat keseimbangan hubungan-hubungan sosial dalam bermasyarakat, yang kesemuanya itu menimbulkan rasa aman, dan tentram dengan kepastian yang dihadapi. Oleh karena itu tradisi dihargai sebagai nilai tersendiri yang tinggi, maka perlu dipertahankan.

3. Korelasi Agama dengan Nilai Kearifan Lokal

Budaya itu melekat diwaktu kita lahir dan sampai kini, itu sebuah identitas dan pemahaman, jadi tinggal bagaimana memaknai budaya dengan berbagai perspektif, karena pesan yang disajikan tidak ‘telanjang’. Hari baik dan hari buruk, semata-mata mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati dalam melakukan aktifitas, kita dituntut untuk lebih waspada. Agama sebagai pegangan dan pedoman hidup agar menjadi terarah, sebagai pribadi yang memiliki nilai-nilai ajaran ketuhanan. Budaya mengajak kita melihat proses kehidupan dengan sederhana dari mata angin yang berbeda, tanpa bermaksud menge-sampingkan agama.

Korelasinya antara agama dengan kearifan lokal, dimana budaya juga turut berperan membentuk garis-garis etika mampu mengatur tatanan hidup masyarakat, mengandung pesan moral yang kuat, ajakan berlaku baik demi menjauhkan kita dari resiko besar, meskipun kadang dihubung-hubungkan pada peristiwa ghaib dan kadangkala kita tidak bisa menalarkannya dengan akal. Tapi pada garis besarnya, kearifan lokal bermaksud mengharmonikan hidup manusia dengan alam, saling menjaga, dan ada rasa penghormatan atas makhluk-makhluk

yang ada di bumi selain manusia. Suharto (2010) mengatakan bahwa agama itu dogma, sesuatu yang harus dilaksanakan, karena merupakan perintah dari Tuhan, dan budaya itu berperan dalam pembentukan karakter.

Saat Islam datang, masyarakat nusantara telah memiliki kebudayaan yang mengandung nilai-nilai yang bersumber pada keyakinan animisme, dinamisme, Hindu dan Buddha. Ajaran Islam dan budaya nusantara saling terbuka untuk berinteraksi dalam praktik kehidupan masyarakat. Budaya lama tetap hidup, tetapi diisi dengan nilai-nilai keislaman.

Perpaduan Islam dengan kearifan lokal yang telah dilakukan oleh para penyebar agama Islam di nusantara pada masa lampau ternyata memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan budaya nusantara. Budaya nusantara semakin diperkaya nilai-nilai ajaran Islam yang menjadi sumber inspirasi dan pedoman kehidupan bagi masyarakat.

Koentjaraningrat (1974: 12-13) mengatakan bahwa kearifan lokal terbentuk dengan unsur-unsur, yaitu: Manusia, gagasan yang bernilai baik, kebenaran yang telah mentradisi, dan diakui oleh masyarakat. Keempat unsur tersebut dapat dipahami bahwa dalam kearifan lokal nilai agama tidak dapat terpisahkan. Gagasan yang bernilai baik kemudian menjadi kebenaran yang mentradisi dan diakui merupakan prinsip dasar dari semua agama khususnya agama Islam.

F. Teori *Planned Behaviour*

Teori *Planned Behavior* adalah teori yang menjelaskan tentang perilaku manusia. Teori ini disusun dengan menggunakan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Teori *Planned Behavior* merupakan perluasan dari teori *Reasoned Action*. Dalam teori *Reasoned Action* dijelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor utama, yaitu: *attitude toward the behavior* dan *subjective norms* (Fishbein dan Ajzen, 1975), sedangkan dalam teori *Planned Behavior* ditambahkan satu faktor lagi yaitu *perceived behavioral control* (Ajzen, 1991). Ajzen (1991) mengatakan bahwa faktor tersebut bertujuan untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan-

kekurangannya dan keterbatasan-keterbatasan dari kekurangan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya.

Lebih lanjut Ajzen (2001) menjelaskan bahwa faktor-faktor teori *Planned Behaviour* terdiri dari sikap terhadap perilaku, norma subyektif, dan persepsi kontrol perilaku. Sikap bukanlah perilaku, namun sikap menghadirkan suatu kesiapsiagaan untuk tindakan yang mengarah pada perilaku. Individu akan melakukan sesuatu sesuai dengan sikap yang dimilikinya terhadap suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku yang dianggapnya positif itu yang nantinya akan dipilih individu untuk berperilaku dalam kehidupannya. Oleh karena itu sikap merupakan suatu wahana dalam membimbing seorang individu untuk berperilaku. Seorang individu akan melakukan suatu perilaku tertentu jika perilakunya dapat diterima oleh orang-orang yang dianggapnya penting dalam kehidupannya dapat menerima apa yang akan dilakukannya. Sehingga, *normative beliefs* menghasilkan kesadaran akan tekanan dari lingkungan sosial atau Norma Subyektif.

Dalam berperilaku seorang individu menurut Ajzen (2005), tidak dapat mengontrol sepenuhnya perilakunya dibawah kendali individu tersebut atau dalam suatu kondisi dapat sebaliknya dimana seorang individu dapat mengontrol perilakunya dibawah kendali individu tersebut. Pengendalian seorang individu terhadap perilakunya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu tersebut seperti keterampilan, kemauan, informasi, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan yang ada disekeliling individu tersebut. Persepsi terhadap kontrol perilaku adalah bagaimana seseorang mengerti bahwa perilaku yang ditunjukkannya merupakan hasil pengendalian yang dilakukan oleh dirinya.

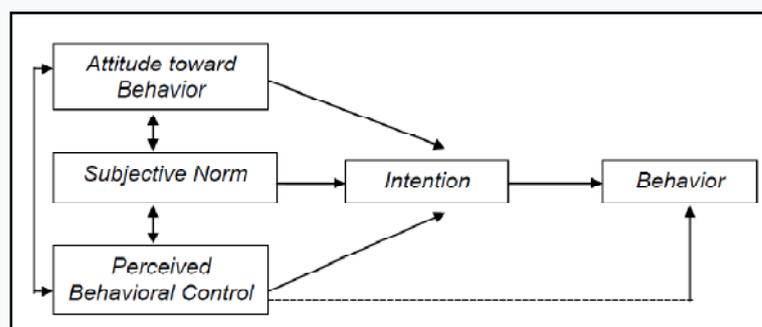
Untuk lebih detailnya, komponen teori *Planned Behavior* Ajzen (1991, 2001 dan 2005) mengemukakan sebagai berikut: Pertama, Kepercayaan perilaku yang memengaruhi sikap terhadap perilaku. Keyakinan perilaku adalah hal-hal yang mendorong individu untuk bertindak. Sedangkan sikap terhadap perilaku yaitu sikap individu terhadap perilaku yang diperoleh dari keyakinan yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut.

Kedua, Keyakinan normatif yang mempengaruhi norma subjektif. Kepercayaan normatif adalah norma yang digunakan orang-orang yang akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Sedangkan norma-norma subjektif menjadi sebagai individu persepsi terhadap sosialisasi yang ada untuk menunjukkan atau tidak perilaku. Norma-norma subjektif ini identik dengan keyakinan dari seseorang tentang perbuatan atau orang lain atau orang lain yang perlu, harus, atau tidak boleh melakukan perilaku, dan memotivasi orang untuk mengetahui orang lain tersebut.

Ketiga, Kontrol keyakinan yang memengaruhi kontrol perilaku yang dirasakan. Pengendalian keyakinan adalah pengalaman pribadi, atau orang-orang yang akan mempengaruhi hasil individu. Kontrol perilaku yang dirasakan adalah keyakinan bahwa individu pernah melakukan atau tidak pernah melaksanakan perilaku tertentu. Kontrol perilaku terdiri dari persepsi individu yang berhubungan dengan tingkah laku tertentu.

Agar hubungan ketiga komponen tersebut mudah dipahami, Ajzen (1991, 2001 dan 2005) menyajikannya dalam bentuk gambar seperti yang disajikan pada gambar 2.1 (lihat gambar 2.1)

Gambar 2.1: Teori *Planned Behavior*



Sumber: Ajzen, 1991

Teori *Planned Behavior* menurut Ajzen (1991, 2001 dan 2005), dapat diterapkan untuk mengestimasi berbagai macam perilaku, seperti perilaku sehat, misalnya pencegahan perilaku merokok. Uraian dapat dijelaskan sebagai berikut: Komponen *attitude toward behavior* dari pencegahan perilaku merokok adalah membuat perokok percaya akan hal positif dan negatif dari merokok

sehingga ia memiliki kecenderungan untuk sadar akan konsekuensi merokok. Komponen *subjective norms* adalah orang-orang disekitar perokok yang diminta atau dibuat untuk mendukung perokok berhenti merokok, dan perokok juga distimulasi agar menginternalisasi bahwa ia harus berhenti merokok. Lalu, komponen *perceived behavioral control* adalah penggalan pengalaman buruk akibat merokok serta mendukung perokok agar mengontrol perilaku merokoknya.

G. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya (FAO, 1997). Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan (Japan Times, 2011). Ketahanan pangan menurut FAO (1997) memiliki empat pilar utama, yaitu: Ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan, keterjangkauan (akses) pangan, dan pemanfaatan pangan. Penjelasannya dapat disajikan seperti berikut:

1. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan berhubungan dengan suplai pangan melalui produksi, distribusi, dan pertukaran (Gregory, 2005). Produksi pangan ditentukan oleh berbagai jenis faktor, termasuk kepemilikan lahan dan penggunaannya; jenis dan manajemen tanah; pemilihan, pemuliaan, dan manajemen tanaman pertanian; pemuliaan dan manajemen hewan ternak; dan pemanenan (FAO, 1997). Produksi tanaman pertanian dapat dipengaruhi oleh perubahan temperatur dan curah hujan (Gregory, 2005). Pemanfaatan lahan, air, dan energi untuk menumbuhkan bahan pangan seringkali berkompetisi dengan kebutuhan lain (Godfray, 2010).

Distribusi pangan melibatkan penyimpanan, pemrosesan, transportasi, pengemasan, dan pemasaran bahan pangan (FAO, 1997). Infrastruktur rantai pasokan dan teknologi penyimpanan pangan juga dapat mempengaruhi jumlah bahan pangan yang hilang selama distribusi (Godfray, 2010). Infrastruktur transportasi yang tidak memadai dapat menyebabkan peningkatan harga hingga ke pasar global (Godfray, 2010). Produksi pangan per kapita dunia sudah melebihi

konsumsi per kapita, namun di berbagai tempat masih ditemukan kerawanan pangan karena distribusi bahan pangan telah menjadi penghalang utama dalam mencapai ketahanan pangan (Tweeten, 1999).

2. Stabilitas Ketersediaan Pangan

Stabilitas ketersediaan pangan mengacu pada kemampuan suatu individu dalam mendapatkan bahan pangan sepanjang waktu tertentu. Kerawanan pangan dapat berlangsung secara transisi, musiman, ataupun kronis (FAO, 1997). Pada ketahanan pangan transisi, pangan kemungkinan tidak tersedia pada suatu periode waktu tertentu (Ecker, 2012). Bencana alam dan kekeringan mampu menyebabkan kegagalan panen dan mempengaruhi ketersediaan pangan pada tingkat produksi (FAO, 1997, Ecker, 2012).

Ketidakstabilan ketersediaan pangan di pasar menyebabkan peningkatan harga pangan sehingga juga menyebabkan kerawanan pangan. Faktor lain misalnya hilangnya tenaga kerja atau produktivitas yang disebabkan oleh wabah penyakit. Musim tanam mempengaruhi stabilitas secara musiman karena bahan pangan hanya ada pada musim tertentu saja (FAO, 1997). Kerawanan pangan permanen atau kronis bersifat jangka panjang dan persisten (Ecker, 2012).

3. Akses Pangan

Akses terhadap bahan pangan mengacu kepada kemampuan membeli dan besarnya alokasi bahan pangan, juga faktor selera pada suatu individu dan rumah tangga (Gregory, 2005). Kemiskinan membatasi akses terhadap bahan pangan dan juga meningkatkan kerentanan suatu individu atau rumah tangga terhadap peningkatan harga bahan pangan (Ecker, 2012). Kemampuan akses bergantung pada besarnya pendapatan suatu rumah tangga untuk membeli bahan pangan, atau kepemilikan lahan untuk menumbuhkan makanan untuk dirinya sendiri (Garrett, 1999). Rumah tangga dengan sumber daya yang cukup dapat mengatasi ketidakstabilan panen dan kelangkaan pangan setempat serta mampu mempertahankan akses kepada bahan pangan (Tweeten, 1999).

4. Pemanfaatan Pangan

Ketika bahan pangan sudah didapatkan, maka berbagai faktor mempengaruhi jumlah dan kualitas pangan yang dijangkau oleh anggota keluarga. Bahan pangan yang dimakan harus aman dan memenuhi kebutuhan fisiologis suatu individu (Ecker, 2012). Keamanan pangan mempengaruhi pemanfaatan pangan dan dapat dipengaruhi oleh cara penyiapan, pemrosesan, dan kemampuan memasak di suatu komunitas atau rumah tangga (FAO, 1997, Godfray, 2010). Akses kepada fasilitas kesehatan juga mempengaruhi pemanfaatan pangan karena kesehatan suatu individu mempengaruhi bagaimana suatu makanan dicerna (FAO, 1997). Kualitas sanitasi juga mempengaruhi keberadaan dan persebaran penyakit yang dapat mempengaruhi pemanfaatan pangan (FAO, 1997) sehingga edukasi mengenai nutrisi dan penyiapan bahan pangan dapat mempengaruhi kualitas pemanfaatan pangan (Tweeten, 1999).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Proses dan Prosedur Penelitian

Sesuai dengan prosedur penelitian pada umumnya, penelitian ini dimulai dari tahap *desk study* sampai dengan tahap pembuatan laporan akhir penelitian. Prosedur penelitian ini disusun agar pelaksanaan penelitian ini terarah dan sistematis. Prosedur penelitian ini terdiri dari empat tahap, yaitu:

1. Desk Study

Tahap *desk study*, peneliti mengadakan penelitian pendahuluan, yakni peneliti melakukan penjajakan lapangan terhadap latar penelitian, mencari data dan informasi tentang realitas kehidupan sosial keagamaan dan penguatan ketahanan pangan di Kawasan Bosowasi. Peneliti juga menempuh upaya konfirmasi ilmiah melalui penelusuran literatur, seperti: Artikel jurnal, buku-buku dan referensi pendukung penelitian tentang realitas kehidupan sosial keagamaan dan penguatan ketahanan pangan. Setelah itu, peneliti membuat rancangan penelitian yang meliputi: Identifikasi dan perumusan masalah, penentuan metode dan pendekatan penelitian, penentuan variabel penelitian, penentuan sumber data penelitian, dan penentuan dan penyusunan instrumen penelitian.

2. Field Study

Tahap *field study*, peneliti memasuki latar penelitian dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, kemudian melakukan pengumpulan data dengan menggunakan semua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Analisis Data

Tahapan analisis data, peneliti melakukan serangkaian proses analisis data dan interpretasi terhadap semua hasil analisis data yang dikumpulkan melalui semua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Penulisan Laporan Akhir

Tahap penulisan laporan akhir, peneliti membuat laporan akhir dalam bentuk tertulis berdasarkan kaidah-kaidah penulisan karya tulis ilmiah, dan laporan tentang penggunaan dana yang diberikan, dalam hal ini, peneliti diwajibkan: (1) membuat laporan *executive summary* diformat dalam bentuk artikel yang siap dikirim ke jurnal Internasional terindeks bereputasi (Q1/Q2/Q3), (2) membuat laporan penelitian diformat dalam bentuk *dummy* buku yang siap dikirimkan ke penerbit skala nasional, dan (3) membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian yang diberikan kepada peneliti. Selain itu, target luaran penelitian ini setelah laporan akhir, yaitu: (1) terbitan jurnal Internasional terindeks bereputasi (Q1/Q2/Q3), (2) buku ber-ISBN, dan (3) HAKI dari hasil penelitian yang diterbitkan.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan (*desk study* selama satu bulan, *field study* selama dua bulan, pengolahan dan analisis data selama satu bulan, dan penulisan laporan akhir selama dua bulan) dalam tahun 2020. Adapun lokasi yang dijadikan sebagai tempat penjarangan data bagi penelitian ini adalah Kawasan Bosowasi. Alasan yang mendasari dijadikannya Kawasan Bosowasi sebagai lokasi penelitian, yaitu: (1) Kawasan Bosowasi (Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai) merupakan salah satu kawasan andalan yang telah dicanangkan pada masa Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Lompo, (2) Sebagai salah satu kawasan yang dijadikan sebagai pusat pembangunan untuk sektor perhubungan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata, (3) Sebagai salah satu kawasan yang dijadikan sebagai pusat pengembangan komoditas unggulan melalui alih teknologi atau pemanfaatan bibit unggul, (4) Sebagai salah satu kawasan yang diprioritaskan untuk percepatan dan penataan pembangunan infrastruktur seperti jalan, pertanian, perkebunan, dan pengembangan sentra-sentra usaha, (5) Hubungan antar keempat wilayah tersebut dalam berbagai aspek sangat kuat sejak dahulu hingga sekarang ini, (6) Struktur sosialnya sangat kental dengan nuansa budaya Bugis, dan (7) Ketahanan pangan di kawasan tersebut dianggap sebagai pondasi utama perekonomian rakyat.

C. Pendekatan dan Desain Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah rencana dan prosedur yang terdiri dari langkah-langkah pengumpulan data, analisis dan interpretasi (Mungim, 2008). Berdasarkan defenisi ini, maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan induktif secara kualitatif dan kuantitatif dalam pengumpulan data penelitian tentang: (1) Realitas kehidupan sosial keagamaan di Kawasan Bosowasi, (2), Ketahanan pangan di Kawasan Bosowasi dan (3) Kontribusi sosial keagamaan terhadap penguatan ketahanan pangan rumah tangga di wilayah Bosowasi. Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan berdasarkan ketiga hal tersebut di atas, digunakan pendekatan sosial keagamaan, yakni data utama dikumpulkan dari realitas kehidupan sosial keagamaan dan ketahanan pangan di Kawasan Bosowasi melalui observasi, wawancara dan angket lalu data tersebut dintrepretasi dengan teori struktur sosial, konstruksi sosial, perubahan sosial dan falah dalam Islam. Hasil interpretasinya dijadikan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan.

2. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah pedoman atau prosedur dan teknik dalam perencanaan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan model atau blue print penelitian (Mungim, 2008). Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah desain penelitian deskriptif (kualitatif-kuantitatif). Desain penelitian deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan situasi suatu fenomena (Mungim, 2008). Berdasarkan penjelasan tersebut, desain penelitian deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara lengkap tentang: (1) Realitas kehidupan sosial keagamaan di Kawasan Bosowasi, (2) Ketahanan pangan di Kawasan Bosowasi (3) Kontribusi sosial keagamaan terhadap penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa desain penelitian deskriptif diarahkan untuk menghasilkan suatu model, karena itu penelitian yang dilakukan ini juga harus menghasilkan suatu model. Dalam membangun suatu model untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan suatu masalah, penelitian yang

dilakukan ini mengangkat tiga asumsi untuk dibuktikan, yaitu: ((1) Realitas kehidupan sosial keagamaan masyarakat di daerah dapat dijadikan sebagai dasar penguatan ketahanan pangan, (2) Penguatan ketahanan pangan yang berorientasi kepada realitas kehidupan sosial keagamaan di daerah melalui mediasi norma subjektif akan lebih mudah dilakukan, dan (3) Penguatan ketahanan pangan di Kawasan Bosowasi akan lebih mudah dikembangkan jika dilakukan secara sosial keagamaan melalui mediasi norma subjektif. Ketiga asumsi tersebut dijabarkan dengan menggunakan teori struktur sosial, konstruksi sosial, perubahan sosial, falah dalam Islam dan. Hasil penjabaran teori tersebut dijadikan sebagai dasar dalam membangun sebuah model, yakni model penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi. Model tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menguatkan ketahanan pangan rumah tangga, khususnya di Kawasan Bosowasi dan secara umum di Indonesia tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan.

D. Partisipan Penelitian

Partisipan dalam penelitian ini adalah semua orang yang berpartisipasi dalam kegiatan penelitian ini. Partisipan tersebut terdiri dari: Reviwer, konsultan metodologi dan subtansi penelitian, peneliti, personil penelitian, key informan, dan informan. Penjelasan mengenai partisipan tersebut dapat disajikan berikut ini:

1. Reviewer, subyek yang bertugas untuk melakukan proses penilaian proposal hingga penilaian luaran penelitian yang dilakukan. Subyek ini ditetapkan langsung oleh LPPM IAIN Bone.
2. Konsultan metodologi, pakar yang ditentukan oleh peneliti dan bertugas untuk melakukan pemetaan metodologi penelitian, subtansi penelitian, dan uji validitas konten terhadap instrumen penelitian yang digunakan dan dilakukan secara online. Jasa konsultan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Dr. Sihar Tambun, SE., M.Si.Ak., dari Universitas Trisakti Jakarta.
3. Peneliti, subyek yang bertugas untuk melaksanakan penelitian ini. Subyek ini terdiri dari dua orang, yaitu: Peneliti pertama dan peneliti kedua. Peneliti pertama (Dr. Syaparuddin, S.Ag., M.SI.) bertanggungjawab untuk mengumpulkan data, mengelola data, menganalisis data, dan

bertanggungjawab untuk menghasilkan *output* dan *outcome* penelitian. Sedangkan peneliti kedua (Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum) bertanggungjawab untuk melakukan kajian pustaka penelitian.

4. Personil penelitian, subyek yang direkrut oleh peneliti dan bertugas di sekretariat penelitian untuk mengurus semua jenis administrasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dan membantu peneliti dalam mengambil informasi (observasi, wawancara, angket dan data tertulis) dari informan dan responden yang ditentukan. Personil penelitian ini terdiri dari tiga orang, yaitu: Jumriani, S.Sos, M.Si., Muh. Ardi, SE.Sy., M.El, dan Rini Idayanti, SE., Sy., M.El.
5. Key Informan, subyek yang bertugas untuk memberikan informasi tentang realitas kehidupan sosial dan ketahanan pangan yang diobservasi, dan juga sebagai penghubung dengan informan yang diwawancarai dan dengan responden pengisi angket penelitian. Penunjukan subyek ini dilakukan secara insidental sebelum melakukan observasi, wawancara dan penyebaran angket. Subyek ini berasal dari masyarakat umum yang digunakan jasanya karena memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan tugas yang diberikan oleh peneliti.
6. Informan, subyek yang bertugas untuk memberikan informasi melalui wawancara mengenai indikator variabel sosial keagamaan, ketahanan pangan di Kawasan Bosowasi, dan pangan berbasis organik dan kearifan lokal. Informan dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian yang dilakukan. Informan wawancara yang dipilih untuk memberikan informasi tentang indikator variabel sosial keagamaan di Kawasan Bosowasi adalah informan dari Kemeterian Agama Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sinjai dan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sinjai. Sedangkan informan wawancara yang dipilih untuk memberikan informasi tentang ketahanan pangan di Kawasan Bosowasi adalah informan dari Dinas Ketahanan Pangan dan atau Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sinjai. Adapun informan wawancara yang dipilih untuk memberikan informasi pangan berbasis organik dan

kearifan lokal adalah akademisi dan praktisi pangan organik. Pemilihan informan tersebut dilakukan dengan beberapa kriteria, yaitu: (1) Sebagai staf resmi di kantornya, (4) Berkompeten pada realitas kehidupan sosial keagamaan, ketahanan pangan di Kawasan Bosowasi, dan pangan berbasis organik dan kearifan lokal, dan (3) Bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini.

7. Responden, subyek yang bertugas untuk mengisi angket penelitian. Subyek ini berupa rumah tangga yang dipilih secara insidental dan *purposive* (yakni dengan syarat: Minimal lima tahun berdomisili di Bosowasi, Memiliki pendapatan tetap, Memiliki tempat tinggal tetap, Kebutuhan pangannya terpenuhi, Kebutuhan sandangnya terpenuhi, Penghuni rumah tangganya lengkap [minimal ayah, ibu dan anak], dan Kondisi kesehatannya tidak terganggu), dan terdiri dari 400 rumah tangga dengan rincian sebagai berikut: (1) 50 responden dari 5 kecamatan di Kabupaten Sinjai (Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Utara, dan Kecamatan Sinjai Tengah), (2) 50 responden dari 5 kecamatan di Kabupaten Soppeng (Kecamatan Lalebata, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilialau, Kecamatan Marioriawa, dan Kecamatan Marioriwawo), (3) 50 responden dari 5 kecamatan di Kabupaten Wajo (Kecamatan Tempe, Kecamatan Tanasitolo, Kecamatan Majauleng, Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Belawa), dan (4) 50 responden dari 5 kecamatan di Kabupaten Bone (Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Lamuru, Kecamatan Cina, Kecamatan Awangpone, dan Kecamatan Dua Boccoe).

E. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Pengumpulan data dilakukan secara induktif (kualitatif dan kuantitatif) untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan, yaitu:

1.1. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh secara langsung dari obyek/subyek penelitian dengan cara: (1) melakukan observasi

secara sistematis terhadap realitas kehidupan sosial keagamaan. Lokasi yang diobservasi terdiri dari 5 kecamatan di Kabupaten Sinjai, yakni: Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Utara, dan Kecamatan Sinjai Tengah, 5 kecamatan di Kabupaten Soppeng, yakni: Kecamatan Lalebata, Kecamatan Liliraja, Kecamatan Lilialau, Kecamatan Marioriawa, dan Kecamatan Marioriwawo, 5 kecamatan di Kabupaten Wajo, yakni: Kecamatan Tempe, Kecamatan Tanasitolo, Kecamatan Majauleng, Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Belawa, dan 5 kecamatan di Kabupaten Bone, yakni: Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Lamuru, Kecamatan Cina, Kecamatan Awangpone, dan Kecamatan Dua Boccoe, (2) melakukan wawancara dengan informan dari Kementerian Agama Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, dan Sinjai dan MUI Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, dan Sinjai tentang indikator variabel sosial keagamaan di Kawasan Bosowasi, (3) melakukan wawancara dengan informan dari Dinas Ketahanan Pangan dan atau Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, dan Sinjai tentang ketahanan pangan di Kawasan Bosowasi, (4) melakukan wawancara dengan informan praktisi pangan organik tentang pangan berbasis organik dan keriafan lokal, dan (5) melakukan penyebaran angket kepada 400 responden, masing-masing 50 responden di setiap kabupaten di Kawasan Bosowasi tentang kontribusi sosial keagamaan terhadap penguatan ketahanan pangan rumah tangga melalui mediasi norma subjektif di Kawasan Bosowasi.

1.2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: (1) dokumentasi secara khusus di Kawasan Bosowasi yang terkait dengan lokasi penelitian, realitas kehidupan sosial keagamaan, norma subjektif dan penguatan ketahanan pangan rumah tangga, dan (2) referensi lain secara umum yang terkait dengan sosial keagamaan, norma subjektif, dan penguatan ketahanan pangan rumah tangga di daerah.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut di atas, yaitu: Observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Uraianya dapat disajikan berikut ini, yaitu:

2.1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati obyek yang diteliti, yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis (Nasution, 2002). Metode ini digunakan untuk menghimpun berbagai macam keterangan (data) yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap realitas kehidupan sosial keagamaan di Kawasan Bosowasi.

2.2. Wawancara

Wawancara adalah metode dalam bentuk tanya jawab untuk memperoleh suatu fakta atau data yang terkait dengan masalah yang diteliti dengan cara melakukan komunikasi langsung (tanya jawab secara lisan) baik secara temu wicara atau menggunakan teknologi komunikasi jika saling berjauhan tempatnya (Supardi, 2005). Dalam penelitian ini, metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi penting tentang indikator variabel sosial keagamaan, tentang ketahanan pangan di Kawasan Bosowasi, dan tentang pangan berbasis organik dan kearifan lokal.

2.3. Angket

Angket merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden (Zuriah, 2002). Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk mengetahui dan mengukur secara matematis kontribusi sosial keagamaan terhadap penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi

2.4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan menelusuri berbagai jenis kepustakaan untuk memperoleh berbagai teori, konsep, dalil-dalil, variabel, hubungan variabel, hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan materi kajian serta dataa sekunder sebagai langkah awal kegiatan

penelitian (Nasution, 2002). Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data secara tertulis yang terkait dengan realitas kehidupan sosial keagamaan, norma subjektif, dan ketahanan pangan rumah tangga di daerah secara umum, dan secara khusus di Kawasan Bosowasi.

F. Instrumen Penelitian

Seperti yang diuraikan di atas bahwa ada empat metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu: Observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Observasi, wawancara dan dokumentasi tidak dibuatkan instrumen karena datanya direduksi secara langsung dengan menuangkannya dalam bentuk tema-tema sesuai dengan obyeknya masing-masing. Dengan demikian, hanya satu metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, yang dibuatkan instrumen, yaitu angket. Angketnya terstruktur, yakni disajikan dalam bentuk sedemikian rupa dimana responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberi tanda silang atau tanda checklist.

Instrumen penelitian adalah sarana yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dalam rangka untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Sarana tersebut disesuaikan dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2009). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka langkah-langkah yang ditempuh dalam membuat instrumen penelitian (angket) ini, yaitu: (1) identifikasi variabel, (2) identifikasi indikator, (3) menentukan skalanya, dan (4) menyusun angketnya. Langkah-langkah tersebut dituangkan dalam bentuk kisi-kisi instrumen penelitian seperti yang disajikan pada tabel 3.1 (lihat tabel 3.1). Pada tabel 3.1 dapat dijelaskan bahwa dalam mengetahui kontribusi sosial keagamaan terhadap penguatan ketahanan pangan bagi rumah tangga di Kawasan Bosowasi dituangkan ke dalam tiga variabel, yaitu: (1) Realitas Sosial Keagamaan memiliki 4 indikator, posisi variabel ini adalah sebagai variabel eksogen, (2) Norma Subjektif memiliki 6 indikator, posisi variabel ini adalah sebagai variabel intervening, dan (3) Penguatan Ketahanan Pangan memiliki 4 indikator, posisi variabel ini adalah sebagai variabel endogen.

Variabel-variabel tersebut dikonstruksi dengan model Structural Equation Model (SEM).

Karena unit analisis yang digunakan adalah rumah tangga, maka sumber datanya dalam hal ini responden penelitian adalah rumah tangga yang ada di Kawasan Bosowasi dan sampel untuk respondennya ditarik secara insidental dan purposive (yakni dengan syarat: Minimal lima tahun berdomisili di Bosowasi, Memiliki pendapatan tetap, Memiliki tempat tinggal tetap, Kebutuhan pangannya terpenuhi, Kebutuhan sandangnya terpenuhi, Penghuni rumah tangganya lengkap [minimal ayah, ibu dan anak], dan Kondisi kesehatannya tidak terganggu).

Tabel 3.1:

Kisi-kisi Instrumen Penelitian

No	Variabel	Indikator	Skala
1	Realitas Sosial Keagamaan (RS)	Tidak saling membedakan	Likert
		Saling Menghargai	Likert
		Saling mengingatkan	Likert
		Saling Bekerjasama	Likert
2	Norma Subjektif (NS)	Pengaruh Teman	Likert
		Pengaruh Keluarga	Likert
		Pengaruh Tetangga	Likert
		Pengaruh Ulama	Likert
		Pengaruh Tokoh Masyarakat	Likert
		Perintah Pemerintah Daerah	Likert
3	Penguatan Ketahanan Pangan (PK)	Ketersediaan Pangan	Likert
		Akses Pangan	Likert
		Pemanfaatan Pangan	Likert
		Stabilitas Pangan	Likert

Sumber: Dirangkum dari Berbagai Sumber, 2020

G. Analisis Data

1. Proses Analisis Data

1.1. Secara Kualitatif

Proses analisis data secara kualitatif dilakukan dengan beberapa langkah. Langkah-langkah analisis data tersebut, yaitu: Klasifikasi data, penyajian data, dan editing data. Urainnya dapat disajikan berikut ini:

1.1.1. Klasifikasi Data

Data-data utama dalam penelitian ini dikumpulkan dalam bentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data-data tersebut terkumpul lalu dilakukan klasifikasi data berdasarkan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data-data tersebut. Data dari hasil observasi dan dokumentasi tentang realitas kehidupan sosial keagamaan diklasifikasikan secara tematis. Sedangkan data dari hasil wawancara tentang ketahanan pangan di Kawasan Bosowasi dan pangan berbasis organik dan kearifan lokal juga diklasifikasikan secara tematis.

1.1.2. Penyajian Data

Data kualitatif penelitian ini yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi disajikan dalam bentuk tulisan dengan kutipan tidak langsung dan dituangkan secara tematik agar mudah dipahami bagi siapa saja yang membacanya. Tujuan penyajian data penelitian ini dalam bentuk tulisan yaitu untuk memberikan informasi tentang realitas kehidupan sosial keagamaan, ketahanan pangan di Kawasan Bosowasi, dan pangan berbasis organik dan kearifan lokal.

1.1.3. Editing Data

Editing data dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca kembali dan memperbaiki tulisan semua data-data yang telah dikumpulkan. Jika ada data yang salah atau ada data yang masih meragukan, peneliti memperbaiki atau menggantinya dengan data yang lebih sesuai. Hal-hal yang diperhatikan dalam mengedit data penelitian ini, yaitu: kelengkapan dan kesempurnaan data, kejelasan

penulisan data, kemudahan membaca dan memahami data, kekonsistenan data, keseragaman data, kompetensi informan.

1.2. Secara Kuantitatif

Proses analisis data secara kuantitatif juga dilakukan dengan beberapa langkah. Langkah-langkah analisis data tersebut, yaitu:

1.2.1. Tabulasi Data

Tabulasi data, yakni menuangkan data yang diperoleh dari angket yang disebarkan ke dalam bentuk tabel secara tetamik berdasarkan pada variabel yang digunakan dengan program *Microsoft Excel*,

1.2.2. Pengujian *Outer Model* (Model Pengukuran)

Model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya atau dapat dikatakan bahwa outer model mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Pengujian yang dilakukan pada outer model, yaitu:

- *Convergent Validity*. Nilai *convergen validity* adalah nilai loading factor pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Nilai yang disarankan lebih besar dari pada 0.5.
- *Discriminant Validity*. Nilai ini merupakan nilai *cross loading factor* yang berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai yaitu dengan cara membandingkan nilai *loading* pada konstruk yang dituju harus lebih besar dibandingkan dengan nilai *loading* dengan konstruk yang lain.
- *Composite Reliability*. Data yang memiliki *composite reliability* > 0.7 dapat dinyatakan memiliki reliabilitas yang tinggi.
- *Average Variance Extracted (AVE)*. Nilai AVE yang disarankan adalah > 0.5 .
- *Cronbach Alpha*. Uji reliabilitas diperkuat dengan Cronbach Alpha dan nilai yang disarankan adalah > 0.6 untuk semua konstruk.

1.2.3. Pengujian *Inner Model* (Model Struktural)

Pengujian pada model struktural dilakukan untuk menguji hubungan antara konstruk laten. Pengujian yang dilakukan untuk model struktural yaitu :

- *R Square* pada konstruk endogen. Nilai *R Square* adalah koefisien determinasi pada konstruk endogen. Menurut Chin (1998), nilai *R square* sebesar 0.67 (kuat), 0.33 (moderat) dan 0.19 (lemah),
- *Estimate for Path Coefficients*, merupakan nilai koefisien jalur atau besarnya hubungan/pengaruh konstruk laten dan dilakukan melalui prosedur Bootstrapping,

Persamaan Struktural dengan *PLS-Path Modeling* yang digunakan dalam penelitian ini dengan bantuan program aplikasi statistik *Smart-PLS* versi 3.3.2, dapat dinyatakan seperti di bawah ini:

$$\begin{aligned}\eta_{PK} &= \beta\eta_{PK} + \gamma_{1NS}\xi_{1NS} + \zeta \\ \eta_{NS} &= \beta\eta_{NS} + \gamma_{2RS}\xi_{2RS} + \zeta \\ \eta_{PK} &= \beta\eta_{PK} + \gamma_{3RS}\xi_{3RS} + \zeta \\ \eta_{PK} &= \beta\eta_{PK} + \gamma_{4NS}\xi_{4NS} + \gamma_{5RS}\xi_{5RS} + \zeta\end{aligned}$$

Keterangan:

- η_{NS} : variabel laten endogen (Intervening: Norma Subjektif)
 η_{PK} : variabel laten endogen (Penguatan Ketahanan Pangan)
 $\beta\eta_{NS}$: matriks koefisien untuk variabel laten endogen (Intervening: Norma Subjektif)
 $\beta\eta_{PK}$: matriks koefisien untuk variabel laten endogen (Penguatan Ketahanan Pangan)
 γ_{1NS} : matriks koefisien untuk variabel laten eksogen (Norma Subjektif) 1
 γ_{2RS} : matriks koefisien untuk variabel laten eksogen (Realitas Sosial Keagamaan) 2
 γ_{3RS} : matriks koefisien untuk variabel laten eksogen (Realitas Sosial Keagamaan) 3
 γ_{4NS} : matriks koefisien untuk variabel laten eksogen (Intervening: Norma Subjektif) 4
 γ_{5RS} : matriks koefisien untuk variabel laten eksogen (Realitas Sosial Keagamaan) 5
 ξ_{1NS} : variabel laten eksogen (Norma Subjektif) 1
 ξ_{2RS} : variabel laten eksogen (Realitas Sosial Keagamaan) 2
 ξ_{3RS} : variabel laten eksogen (Realitas Sosial Keagamaan) 3
 ξ_{4NS} : variabel laten eksogen (Intervening: Norma Subjektif) 4

- ξ_{5RS} : variabel laten eksogen (Realitas Sosial Keagamaan) 5
 ζ : galat struktural

Persamaan Indikator Variabel Laten Eksogen yang digunakan dalam penelitian ini dengan bantuan program aplikasi statistik *Smart-PLS* versi 3.3.2, dapat dinyatakan seperti di bawah ini:

Variabel Eksogen (Independen): Realitas Sosial Keagamaan (RS)

$$\chi_{RS1} = \lambda_1 \xi_1 + \delta_1$$

$$\chi_{RS2} = \lambda_2 \xi_2 + \delta_2$$

$$\chi_{RS3} = \lambda_2 \xi_3 + \delta_3$$

$$\chi_{RS4} = \lambda_2 \xi_4 + \delta_4$$

Variabel Eksogen (Intervening): Norma Subjektif (NS)

$$\chi_{NS1} = \lambda_1 \xi_1 + \delta_1$$

$$\chi_{NS2} = \lambda_2 \xi_2 + \delta_2$$

$$\chi_{NS3} = \lambda_2 \xi_3 + \delta_3$$

$$\chi_{NS4} = \lambda_2 \xi_4 + \delta_4$$

$$\chi_{NS5} = \lambda_2 \xi_5 + \delta_5$$

$$\chi_{NS6} = \lambda_2 \xi_6 + \delta_6$$

Persamaan Indikator Variabel Laten Endogen yang digunakan dalam penelitian ini dengan bantuan program aplikasi statistik *SmartPLS* versi 3.3.2, dapat dinyatakan seperti di bawah ini:

Variabel Endogen (Dependen): Penguatan Ketahanan Pangan (PK)

$$\gamma_{PK1} = \lambda_1 \eta_1 + \varepsilon_1$$

$$\gamma_{PK2} = \lambda_2 \eta_2 + \varepsilon_2$$

$$\gamma_{PK3} = \lambda_3 \eta_3 + \varepsilon_3$$

$$\gamma_{PK4} = \lambda_4 \eta_4 + \varepsilon_4$$

Keterangan:

- x_{RS1-4} : indikator variabel laten eksogen RS1-4 dari ξ (Realitas Sosial Keagamaan)
 x_{NS1-6} : indikator variabel laten eksogen (intervening) NS1-6 dari ξ (Norma Subjektif)
 y_{KH1-4} : indikator variabel laten endogen PK1-4 dari η (Penguatan Ketahanan Pangan)
 ξ : variabel laten eksogen (independen/intervening)
 η : variabel laten endogen
 λ : loading factor indikator variabel laten endogen dan eksogen
 δ : galat pengukuran dari indikator x
 ε : galat pengukuran dari indikator y

2. Teknik Analisis Data

Setelah dilakukan proses analisis data, selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap hasil analisis data. Interpretasi dilakukan terhadap dua hal, yaitu:

- 2.1. Menginterpretasi hasil Uji Validitas (dengan kriteria jika nilai loading factor-nya berada di atas 0.5 maka dapat dinyatakan valid, demikian pula sebaliknya), Uji Realibilitas (dengan kriteria jika nilai composite reliability berada di atas 0.7 maka dapat dinyatakan reliabel, demikian pula sebaliknya), dan Uji SEM (dengan kriteria jika nilai pengaruh variable eksogen (TS) dan variabel inteverting (SN) terhadap variable endogennya (PK) $\leq 0,05$ maka dapat dinyatakan signifikan pengaruhnya, demikian pula sebaliknya)
- 2.2. Memaknai hasil penelitian secara kualitatif dan kuantitatif dengan teori dan atau konsep. Teori dan atau yang digunakan, yaitu: Konsep struktur sosial, teori kontruksi sosial, teori perubahan sosial dan konsep falah. Pemaknaan ini dituangkan dalam pembahasan asumsi yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Bosowasi, yakni Bone, Soppeng, Wajo, dan Sinjai. Lokasi penelitian perlu dideskripsikan terlebih dahulu untuk mendapatkan gambaran tentang situasi dan kondisinya dimana ketahanan pangan rumah tangga yang menjadi obyek penelitian ini, berada. Situasi dan kondisi yang dimaksud adalah tentang sejarahnya, keadaan geografi dan demografinya. Situasi dan kondisi tersebut sangat memengaruhi karakteristik rumah tangga yang ada di dalamnya. Deskripsi lokasi penelitian ini dapat disajikan seperti di bawah ini:

1. Kabupaten Bone

1.1. Sejarah

Di masa dahulu, Bone merupakan sebuah kerajaan besar di Nusantara. Kerajaan Bone dalam catatan sejarah didirikan oleh Raja Bone pertama, yaitu: Manurunge ri Matajang pada tahun 1330 M. dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan La Tenritatta Arung Palakka pada pertengahan abad ke-17 M. Belajar hikmah dari sejarah kerajaan Bone tersebut, paling tidak ada tiga hal yang bersifat mendasar untuk diaktualisasikan dan dihidupkan kembali karena memiliki persesuaian dengan kebutuhan masyarakat Bone dalam upaya menata kehidupan ke arah yang lebih baik (Pemda Kab. Bone, 2020).

Ketiga hal yang dimaksud, yaitu: Pertama, Bidang politik dan tata pemerintahan. Dalam hubungannya dengan bidang ini, sistem kerajaan Bone pada masa lalu sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyat atau dalam terminologi politik modern dikenal dengan istilah demokrasi. Ini dibuktikan dengan penerapan representasi kepentingan rakyat melalui lembaga perwakilan mereka di dalam dewan adat yang disebut “Ade Pitue”, yaitu tujuh orang pejabat adat yang bertindak sebagai penasihat raja. Segala sesuatu yang terjadi dalam kerajaan dimusyawarahkan oleh Ade’ Pitue dan hasil keputusan musyawarah disampaikan kepada raja untuk dilaksanakan (Pemda Kab. Bone, 2020).

Kedua, Kerjasama dan pendekatan. Urgensi terhadap pandangan seperti itu tampak jelas ketika menelusuri puncak-puncak kejayaan Bone di masa lalu. Sebagai bentuk monumental dari pandangan ini dikenal perjanjian dan ikrar bersama kerajaan Bone, Wajo, dan Soppeng yang melahirkan perjanjian “Tellumpocoe” atau “Lamumpatue Ri Timurung”, adalah sebagai upaya memepererat tali persaudaraan ketiga kerajaan hendak memperkuat posisi kerajaan dalam menghadapi tantangan dari luar (Pemda Kab. Bone, 2020).

Ketiga, Pesan-pesan kemanusiaan. Pesan-pesan ini digunakan orang Bone dapat menjawab perkembangan zaman dengan segala bentuk perubahan dan dinamikanya, sehingga Bone kemudian berkembang dan menjadi suatu daerah yang memiliki wilayah yang luas. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 menyatakan bahwa Bone berkedudukan sebagai Daerah Tingkat II yang merupakan bagian integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pemda Kab. Bone, 2020).

1.2. Geografi

Kabupaten Bone adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan, dan ibu kotanya adalah Watampone. Sebagai salah satu daerah yang berada di pesisir timur Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di Kawasan Timur Indonesia yang secara administrative terdiri dari 27 kecamatan, 328 desa dan 44 kelurahan. Kabupaten ini terletak 174 km ke arah timur Kota Makassar, berada pada posisi 4°13'- 5°6' LS dan antara 119°42'-120°30' BT. Luas wilayah Kabupaten Bone 4.559 km² dengan rincian lahan sebagai berikut: (1) Persawahan: 88.449 Ha, (2) Tegalan/Ladang: 120.524 Ha, (3) Tambak/Empang: 11.148 Ha, (4) Perkebunan Negara/Swasta: 43.052,97 Ha, (5) Hutan: 145.073 Ha, dan (5) Padang rumput dan lainnya: 10.503,48 Ha (BPS Kab. Bone, 2020).

1.3. Demografi

Penduduk Kabupaten Bone adalah 758.589 jiwa, terdiri atas 358.889 laki-laki dan 392.137 perempuan. Dengan luas wilayah Kabupaten Bone sekitar 4.559 km² dan rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bone adalah 162 jiwa

per km². Kabupaten Bone tergolong kabupaten yang besar dan luas di Sulawesi Selatan. Rata-rata jumlah penduduk per km² adalah 165 jiwa. Terkait dengan perannya sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan fasilitas publik lain, maka mayoritas penduduk tinggal terpusat di ibu kota kabupaten. Kepadatan penduduknya mencapai 2.214 jiwa per km². Penduduk Kabupaten Bone didominasi oleh penduduk muda dan usia produktif. Penduduk usia produktif memiliki jumlah terbesar yaitu 64,50 persen dari keseluruhan populasi dengan rasio ketergantungan sebesar 55,03 persen. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sebanyak 55 hingga 56 penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Hal lain yang menarik pada penduduk Kabupaten Bone adalah adanya perubahan arah perkembangan penduduk yang ditandai dengan penduduk usia 0-4 tahun yang jumlahnya lebih kecil dari kelompok penduduk usia yang lebih tua yaitu 5-9 tahun. Kondisi tersebut mengindikasikan terjadinya penurunan tingkat kelahiran penduduk pada beberapa tahun ini (BPS Kab. Bone, 2020).

2. Kabupaten Soppeng

2.1. Sejarah

Soppeng adalah sebuah kota kecil di mana dalam buku-buku lontara terdapat catatan tentang raja-raja yang pernah memerintah sampai berakhirnya status daerah Swapraja. Satu hal menarik dalam lontara tersebut bahwa jauh sebelum terbentuknya kerajaan Soppeng, telah ada kekuasaan yg mengatur daerah Soppeng, yaitu sebuah pemerintahan berbentuk demokrasi karena berdasar atas kesepakatan 60 pemuka masyarakat, tetapi saat itu Soppeng masih merupakan daerah yang terpecah-pecah sebagai suatu kerajaan-kerajaan kecil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Arung, Sulewatang dan Paddanreng serta Pabbicara yang mempunyai kekuasaan tersendiri (Pemda Kab. Soppeng, 2020).

Setelah kerajaan Soppeng terbentuk maka dikoordinir oleh Lili-lili yang kemudian disebut distrik di zaman pemerintahan Belanda. Literatur yang ditulis tentang sejarah Soppeng masih sangat sedikit. Sebagaimana tentang daerah-daerah di Limae Ajattappareng, juga Mandar dan Toraja, Soppeng hanyalah daerah “kecil” dan mungkin “kurang signifikan” untuk diperebutkan oleh

dominasi dua kekuatan di Sulawesi Selatan yakni Luwu dan Siang sebelum abad ke-16. Namun, seperti disebutkan oleh sebuah kronik Soppeng, dulunya Soppeng bersama Wajo, sangat bergantung kepada kerajaan Luwu. Seiring menguatnya kekuatan persekutuan Goa-Tallo di Makassar; untuk mengimbangnya, Bone sempat mengajak Wajo dan Soppeng membentuk persekutuan Tellumpocoe pada perjanjian Timurung tahun 1582. Akan tetapi, masuknya Islam di Sulawesi Selatan di paruh akhir abad ke-16, ditandai dengan masuknya Karaeng Tallo I Mallingkang yang lebih dikenal sebagai Karaeng Matoaya serta penguasa Goa I Manga'ranggi yang kemudian bergelar Sultan Alauddin, telah mengubah peta politik di Sulawesi Selatan. Untuk sementara, kekuatan Bugis Makassar menjadi satu kekuatan baru untuk melawan orang kafir ketika Soppeng dan Sidenreng memeluk Islam tahun 1609, Wajo 1610 dan akhirnya Bone pada tahun 1611 M (Pemda Kab. Soppeng, 2020).

Perkembangan berikutnya sepanjang abad ke-17, menempatkan Soppeng pada beberapa perubahan keputusan politik ketika persaingan Bone dan Goa semakin menguat. Jauh sebelum perjanjian Timurung yang melahirkan persekutuan Tellumpocco, sebenarnya Soppeng sudah berada di pihak kerajaan Goa dan terikat dengan perjanjian Lamogo antara Goa dan Soppeng. Persekutuan Tellumpocco sendiri lahir atas "restu" Goa. Namun, ketika terjadi gejolak politik antara Bugis dan Makassar disebabkan oleh gerakan yang dipelopori oleh Arung Palakka dari Bone, Soppeng sempat terpecah dua ketika Datu Soppeng, Arung Mampu, dan Arung Bila bersekutu dengan Bone pada tahun 1660 sementara sebagian besar bangsawan Soppeng yang lain menolak perjanjian di atas rakit di Atappang itu (Pemda Kab. Soppeng, 2020).

2.2. Geografi

Soppeng terletak pada depresiasi sungai Walanae yang terdiri dari daratan dan perbukitan dengan luas daratan ± 700 km² serta berada pada ketinggian rata-rata antara 100-200 m di atas permukaan laut. Luas daerah perbukitan Soppeng kurang lebih 800 km² dan berada pada ketinggian rata-rata 200 m di atas permukaan laut. Ibu kota Kabupaten Soppeng, Watansoppeng berada pada ketinggian 120 m di atas permukaan laut. Kabupaten Soppeng tidak

memiliki wilayah pantai. Wilayah perairan hanya sebagian dari Danau Tempe. Gunung-gunung yang ada di wilayah Kabupaten Soppeng menurut ketinggiannya adalah sebagai berikut: (1) Gunung Nene Conang 1.463 m, (2) Gunung Laposo 1000 m, (3) Gunung Sewo 860 m, (4) Gunung Lapancu 850 m, (6) Gunung Bulu Dua 800 m, (7) Gunung Paowengeng 760 m. Kabupaten Soppeng memiliki tempat-tempat wisata berupa permandian air panas alami yang bernama "Lejja", permandian mata air "Ompo" dan permandian alam "Citta". Lejja berjarak ± 40 Kilometer dari pusat kota, terletak di desa Batu-batu, Kecamatan Marioriawa (BPS Kab. Soppeng, 2020).

2.3. Demografi

Kabupaten Soppeng adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Watansoppeng. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.500,00 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 226.990 jiwa. Kabupaten Soppeng terdiri dari 8 kecamatan, 21 kelurahan dan 49 desa. Pada tahun 2020, kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.557,00 km² dan jumlah penduduk sebesar 226.990 jiwa dengan sebaran penduduk 160 jiwa/km² (BPS Kab. Soppeng, 2020).

3. Kabupaten Wajo

3.1. Sejarah

Wajo berarti bayangan atau bayang-bayang (wajo-wajo). Kata Wajo dipergunakan sebagai identitas masyarakat sekitar 605 tahun yang lalu yang menunjukkan kawasan merdeka dan berdaulat dari kerajaan-kerajaan besar pada saat itu. Di bawah bayang-bayang diadakan kontrak sosial antara rakyat dan pemimpin adat dan bersepakat membentuk Kerajaan Wajo. Perjanjian itu diadakan di sebuah tempat yang bernama Tosora yang kemudian menjadi ibu kota kerajaan Wajo. Versi lain tentang terbentuknya Wajo, yaitu kisah We Tadampali, seorang putri dari Kerajaan Luwu yang diasingkan karena menderita penyakit kusta. Dia dihanyutkan hingga masuk daerah Tosora. Kawasan itu kemudian disebut Majauleng, berasal dari kata maja (jelek/sakit) oli' (kulit). Konon kabarnya dia dijilati kerbau belang di tempat yang kemudian dikenal

sebagai Sakkoli (sakke' = pulih, oli = kulit) sehingga dia sembuh. Saat dia sembuh, beserta pengikutnya yang setia ia membangun masyarakat baru, hingga suatu saat datang seorang pangeran dari Bone (ada juga yang mengatakan Soppeng) yang beristirahat di dekat perkampungan We Tadampali. Singkat kata mereka kemudian menikah dan menurunkan raja-raja Wajo. Wajo adalah sebuah kerajaan yang tidak mengenal sistem to manurung sebagaimana kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan pada umumnya. Tipe Kerajaan Wajo bukanlah feodal murni, tetapi kerajaan elektif atau demokrasi terbatas (Pemda Kab. Wajo, 2020).

3.2. Geografi

Secara geografis, Kabupaten Wajo terletak pada 3°39' - 4°16' Lintang Selatan dan 119°53' - 120°27' Bujur Timur. Sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah hingga dataran rendah bergelombang dengan ketinggian wilayah 0-520 Mdpl. Hanya sebagian kecil yang berupa perbukitan di bagian utara. Bagian timur berupa dataran rendah dan pesisir Teluk Bone, termasuk pulau-pulau pasir di perairan Teluk Bone. Sedangkan bagian barat merupakan dataran aluvial Danau Tempe-Danau Sidenreng (BPS Kab. Wajo, 2020).

3.3. Demografi

Kabupaten Wajo adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Sengkang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.056,19 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 397.814 jiwa. Kabupaten Wajo dulunya terdiri dari 10 kecamatan, akan tetapi sejak tahun 2000 terjadi pemekaran hingga saat ini terdapat 14 kecamatan (BPS Kab. Wajo, 2020).

4. Kabupaten Sinjai

4.1. Sejarah

Kabupaten Sinjai mempunyai nilai sejarah tersendiri, yang membedakannya dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini diawali dengan terbentuknya persekutuan kerajaan tellu limpo'e: Tondong, Bulo-Bulo, Lamatti, dan persekutuan kerajaan Pitu Riwawo Bulu. Sekalipun dulunya

Kabupaten Sinjai berupa kerajaan, namun watak dan karakter warganya tetap tercermin dari adanya sistem pemerintahan demokratis dan berkedaulatan rakyat. Komunikasi politik melalui landasan tatanan kesopanan, "Sipakatau" (Saling Menghormati) dan menjunjung nilai-nilai dari konsep "Sirui Menre', Tesirui No' (saling menarik ke atas, pantang saling menarik ke bawah). Sekalipun dari ketiga tersebut tergabung ke dalam persekutuan Kerajaan Tellu Limppo'e, namun pelaksanaan roda pemerintahan tetap berjalan pada wilayahnya masing-masing tanpa adanya pertentangan dan peperangan yang terjadi di antara mereka. Persekutuan Kerajaan Tellu Limppo'e kemudian membangun sebuah benteng pertahanan, yang diberi nama Benteng Balangnipa pada tahun 1557 M, guna mengantisipasi serangan dari luar (Pemda Kab. Sinjai, 2020).

4.2. Geografi

Secara geografis Kabupaten Sinjai terletak pada titik $5^{\circ} 2' 56'' - 5^{\circ} 21' 16''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ} 56' 30'' - 120^{\circ} 25' 33''$ Bujur Timur. Kabupaten Sinjai terletak di bagian pantai timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 223 km dari kota Makassar. Luas wilayahnya berdasarkan data yang ada sekitar $819,96 \text{ km}^2$ (81.996 ha). Kabupaten Sinjai secara geografis terdiri atas wilayah pesisir, dataran rendah dan dataran tinggi dengan ketinggian antara 0-2.871 meter diatas permukaan air laut (mdpl). Wilayahnya termasuk 9 pulau-pulau kecil di Teluk bone yang masuk ke wilayah kecamatan Pulau Sembilan. Pesisir di Kabupaten Sinjai berada di sepanjang batas sebelah timur dan tergolong sempit meliputi Kecamatan Sinjai Timur, Sinjai Utara dan kecamatan Tellu Limpoe. Daerah dataran tinggi yang merupakan lereng timur Gunung Lompobattang dan Gunung Bawakaraeng meliputi kecamatan Sinjai Barat dan Sinjai Borong. Sedangkan dataran tinggi pegunungan Bohonglangi meliputi sebagian wilayah kecamatan Bulupoddo (BPS Kab. Sinjai, 2020).

4.3. Demografi

Kabupaten Sinjai adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kotanya adalah Sinjai yang berjarak sekitar ± 220 km dari Kota Makassar. Kabupaten ini memiliki luas wilayah $819,96 \text{ km}^2$ dan

berpenduduk sebanyak kurang lebih 265.930 jiwa. Kabupaten Sinjai terdiri dari 9 kecamatan, 13 kelurahan dan 67 desa. Pada tahun 2017, kabupaten ini memiliki luas wilayah 798,96 km² dan jumlah penduduk sebesar 255.853 jiwa dengan sebaran penduduk 320 jiwa/km². Kecamatan Sinjai Utara merupakan daerah terpadat penduduknya dengan 1.471 jiwa/km², sedangkan kecamatan Bulupoddo merupakan daerah terjarang penduduknya dengan 158 jiwa/km². Sebanyak 99% penduduk Kabupaten Sinjai memeluk agama Islam. Pertanian yang menonjol dari kabupaten Sinjai adalah lada dan coklat. Lada tumbuh hampir di semua kecamatan kecuali di kecamatan Pulau Sembilan. Luas areal tanamnya mencapai 3.249 hektare dengan jumlah produksi 2.380 per tahun. Sedangkan coklat tumbuh hampir di semua kecamatan dengan luas area tanam 4.178 hektare dan hasil panen per tahun mencapai 2.129 ton (BPS Kab. Sinjai, 2020).

B. Penyajian Hasil Penelitian

1. Realitas Kehidupan Sosial Keagamaan di Bosowasi

Realitas kehidupan sosial keagamaan di Kawasan Bosowasi dapat disajikan deskripsinya sebagai berikut:

1.1. Realitas Kehidupan Keagamaan

Deskripsi realitas kehidupan keagamaan di Kawasan Bosowasi dapat dipaparkan sebagai berikut:

1.1.1. Agama

Agama yang dianut oleh masyarakat di Bosowasi dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1.1.1.1. Kabupaten Bone

Ada lima agama yang dianut oleh masyarakat di Kabupaten Bone, yaitu: Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Adapun penduduk Kabupaten Bone yang beragama Islam sebanyak 753.614 jiwa, Protestan sebanyak 3.119 jiwa, Katolik sebesar 694 jiwa, Hindu sebanyak 598, dan Budha sebanyak 564 jiwa (BPS Kab. Bone, 2020: 100). Penduduk yang beragama Islam merupakan penduduk mayoritas di Kabupaten Bone dan dapat dijumpai di semua kecamatan (27 Kecamatan). Sedangkan agama-agama lain, yaitu (BPS Kab. Bone, 2020:

100): (1) Protestan dapat dijumpai di 9 kecamatan, yakni: Salomekko 1 orang, Libureng 52 orang, Mare 33 orang, Cina 76 orang, Bengo 29 orang, Palakka 21 orang, Tanete Riattang Barat 1.711 orang, Tanete Riattang 1.096 orang, dan Tanete Riattang Timur 100 orang, (2) Katolik dapat dijumpai di 8 kecamatan, yakni: Tonra 8 orang, Libureng 32 orang, Cina 47 orang, Lappariaja, 15 orang, Lamuru 8 orang, Ajangale 28 orang, Tanete Riattang Barat 428 orang, dan Tanete Riattang 131 orang, (3) Hindu dapat dijumpai di 4 kecamatan, yakni: Lamuru 1 orang, Tanete Riattang Barat 450 orang, Tanete Riattang 140 orang, dan Tanete Riattang Timur 7 orang, dan (4) Budha dapat dijumpai di 2 kecamatan, yakni: Tanete Riattang Barat 425 orang dan Tanete Riattang 112 orang.

1.1.1.2. Kabupaten Soppeng

Sama halnya di Kabupaten Bone, di Kabupaten Soppeng juga terdapat lima agama yang dianut oleh masyarakat, yaitu: Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Adapun penduduk Kabupaten Soppeng yang beragama Islam sebanyak 233.962 jiwa, Protestan sebanyak 117 jiwa, Katolik sebesar 701 jiwa, Hindu sebanyak 9, dan Budha sebanyak 9 jiwa (BPS Kab. Soppeng, 2020: 161). Penduduk yang beragama Islam merupakan penduduk mayoritas di Kabupaten Soppeng dan dapat dijumpai di semua kecamatan (8 Kecamatan). Sedangkan agama-agama lain, yaitu (BPS Kab. Soppeng, 2020: 161): (1) Protestan dapat dijumpai di tujuh kecamatan, yakni: Mariowawo 1 orang, Lalabata 74 orang, Liliriaja 38 orang, Ganra 1 orang, Lilirilau 1 orang, Donri-donri 1 orang, dan Marioriawa 1 orang, (2) Katolik Protestan dapat dijumpai di tujuh kecamatan, yakni: Mariowawo 137 orang, Lalabata 478 orang, Liliriaja 55 orang, Ganra 11 orang, Lilirilau 4 orang, Donri-donri 12 orang, dan Marioriawa 4 orang, (3) Hindu dapat dijumpai pada dua kecamatan, yakni: Mariowawo 1 orang dan Lalabata 8 orang, (4) Budha dapat dijumpai pada tiga kecamatan, yakni: Mariowawo 1 orang, Lalabata 5 orang, dan Marioriawa 1 orang.

1.1.1.3. Kabupaten Wajo

Demikian juga di Kabupaten Wajo, terdapat lima agama yang dianut oleh masyarakat, yaitu: Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Adapun

penduduk Kabupaten Wajo yang beragama Islam sebanyak 417.685 jiwa, Protestan sebanyak 681 jiwa, Katolik sebesar 527 jiwa, Hindu sebanyak 3.547, dan Budha sebanyak 47 jiwa (BPS Kab. Wajo, 2019: 145). Penduduk yang beragama Islam merupakan penduduk mayoritas di Kabupaten Wajo dan dapat dijumpai di semua kecamatan (14 Kecamatan). Sedangkan agama-agama lain, yaitu (BPS Kab. Wajo, 2019: 145): (1) Protestan dapat dijumpai di 3 kecamatan, yakni: Tempe 617 orang, Pammana 26 orang, Majauleng 38 orang, (2) Katolik Protestan dapat dijumpai di 4 kecamatan, yakni: Tempe 170 orang, Penrang 7 orang, Keera 5 orang, dan Pitumpanua 345 orang, (3) Hindu dapat dijumpai pada 2 kecamatan, yakni: Maniangpajo 1.671 orang dan Keera 1.684 orang, (4) Budha dapat dijumpai pada 1 kecamatan, yakni: Tempe 47 orang.

1.1.1.4. Kabupaten Sinjai

Di Kabupaten Sinjai, terdapat enam agama yang dianut oleh masyarakat, yaitu: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Agama lainnya. Adapun penduduk Kabupaten Sinjai yang beragama Islam sebanyak 258.374 jiwa, Protestan sebanyak 109 jiwa, Katolik sebesar 44 jiwa, Hindu sebanyak 2, Budha sebanyak 12 jiwa dan agama lainnya sebanyak 3 jiwa (BPS Kab. Sinjai, 2020: 83). Penduduk yang beragama Islam merupakan penduduk mayoritas di Kabupaten Sinjai dan dapat dijumpai di semua kecamatan (9 Kecamatan). Sedangkan agama-agama lain, yaitu (BPS Kab. Sinjai, 2020: 83): (1) Protestan dapat dijumpai di 7 kecamatan, yakni: Sinjai Barat 7 orang, Sijai Borong 3 orang, Sinjai Selatan 8 orang, Sinjai Timur 84 orang, Sinjai Tengah 2 orang, Sijai Utara 1 orang, Bulupoddon 4 orang (2) Katolik Protestan dapat dijumpai di 3 kecamatan, yakni: Sijai Selatan 1 orang, Sinjai Timur 36 orang, dan Bulopoddo 7 orang, (3) Hindu dapat dijumpai pada 2 kecamatan, yakni: Tellulimpoe 1 orang dan Sinjai Timur 1 orang, (4) Budha dapat dijumpai pada 1 kecamatan, yakni: Sinjai Timur 12 orang, dan agama lainnya dapat dijumpai di 3 kecamatan, yakni: Sinjai Barat 1 orang, Tellulimpoe 1 orang, dan Sinjai Timur 1 orang.

1.1.2. Tempat Peribadatan

Tempat peribadatan bagi masyarakat Bosowasi yang mengunut agama-agama sebagaimana yang dipaparkan di atas, dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1.1.2.1. Kabupaten Bone

Tempat peribadatan yang ada di Kabupaten Bone, yaitu: Mesjid, Musallah, Gereja Protestan, Gereja Katolik dan Vihara. Mesjid sebanyak 1.447 buah dan Musallah sebanyak 1.584 buah. Mesjid dan Musallah tersebut tersebar di seluruh wilayah kecamatan dan desa kabupaten Bone. Gereja Protestan sebanyak 4 buah dapat ditemukan di 2 kecamatan, yaitu: Bengo 1 gereja dan Tanete Riattang Barat 3 gereja. Gereja Katolik hanya 1 buah berada di Kecamatan Tanete Riattang, dan Vihara juga hanya 1 buah berada di Kecamatan Tanete Riattang (BPS Kab. Bone, 2020: 101).

1.1.2.2. Kabupaten Soppeng

Tempat peribadatan yang ada di Kabupaten Soppeng, yaitu: Mesjid, Musallah, Gereja Protestan, dan Gereja Katolik. Mesjid sebanyak 433 buah dan Musallah sebanyak 110 buah. Mesjid dan Musallah tersebut tersebar di seluruh wilayah kecamatan dan desa di Kabupaten Soppeng. Gereja Protestan sebanyak 6 buah dapat ditemukan di 2 kecamatan, yaitu: Marioriwawo 1 gereja dan Lalabata 5 gereja. Gereja Katolik hanya 1 buah berada di Kecamatan Lalabata (BPS Kab. Soppeng, 2020: 162).

1.1.2.3. Kabupaten Wajo

Tempat peribadatan yang ada di Kabupaten Wajo, yaitu: Mesjid, Musallah, dan Gereja Protestan. Mesjid sebanyak 664 buah dan Musallah sebanyak 54 buah. Mesjid dan Musallah tersebut tersebar di seluruh wilayah kecamatan dan desa di Kabupaten Wajo. Gereja Protestan sebanyak 8 buah dapat ditemukan di 2 kecamatan, yaitu: Tempe 4 gereja, Majauleng 1 gereja, dan Pitumpanua 3 gereja (BPS Kab. Wajo, 2019: 146).

1.1.2.4. Kabupaten Sinjai

Tempat peribadatan yang ada di Kabupaten Sinjai hanya Mesjid dan Musallah. Sedangkan Gereja Protestan, Gereja Katolik, Pura dan Vihara tidak ada. Mesjid sebanyak 675 buah dan Musallah sebanyak 122 buah. Mesjid dan Musallah tersebut tersebar di seluruh wilayah kecamatan dan desa di Kabupaten Sinjai (BPS Kab. Sinjai, 2020: 84).

1.1.3. Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam:

Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam (negeri dan swasta) yang dapat ditemukan di Bosowasi dapat disajikan deskripsinya sebagai berikut:

1.1.3.1. Kabupaten Bone

Lembaga pendidikan Keagamaan Islam (negeri dan swasta) yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari: (1) Raudatul Athfal memiliki sekolah sebanyak 63 buah, guru sebanyak 207 orang dan murid sebanyak 1.484 orang (BPS Kab. Bone, 2020: 71). (2) Madrasah Ibtidaiyah memiliki sekolah sebanyak 90 buah, guru sebanyak 905 orang dan murid sebanyak 8.376 orang (BPS Kab. Bone, 2020: 75), (3) Madrasah Tsanawiyah memiliki sekolah sebanyak 98 buah, guru sebanyak 1.258 orang dan murid sebanyak 13.325 orang (BPS Kab. Bone, 2020: 79), (4) Madrasah Aliyah memiliki sekolah sebanyak 48 buah, guru sebanyak 644 orang dan murid sebanyak 6.728 orang (BPS Kab. Bone, 2020: 84-86), (5) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang ada di Kabupaten Bone, yaitu: IAIN Bone, STKIP Muhammadiyah Bone dan STAI Al-Ghazali Bone (Hasil Observasi, 2020), dan (6) Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Bone, yaitu: Pondok Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar, Pondok Pesantren Darul Huadh, Pondok Pesantren al-Mubarak, Pondok Pesantren Ma'had Hadists Biru, Pondok Pesantren Nurul Aeyn As'adiyah, Pondok Pesantren al-Ikhlash, Pondok Pesantren al-Kahyah, Pondok Pesantren Pembangunan Yapit, Pondok Pesantren Darud Taqwa, dan Pondok Pesantren al-Amir Fil Jannah (Hasil Observasi, 2020).

1.1.3.2. Kabupaten Soppeng

Lembaga pendidikan Keagamaan Islam (negeri dan swasta) yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari: (1) Raudatul Athfal memiliki sekolah sebanyak 52

buah, guru sebanyak 171 orang dan murid sebanyak 1.604 orang (BPS Kab. Soppeng, 2020: 100), (2) Madrasah Ibtidaiyah memiliki sekolah sebanyak 20 buah, guru sebanyak 180 orang dan murid sebanyak 1.138 orang (BPS Kab. Soppeng, 2020: 104-106), (3) Madrasah Tsanawiyah memiliki sekolah sebanyak 33 buah, guru sebanyak 467 orang dan murid sebanyak 3.676 orang (BPS Kab. Soppeng, 2020: 110-112), (4) Madrasah Aliyah memiliki sekolah sebanyak 9 buah, guru sebanyak 445 orang dan murid sebanyak 1.487 orang (BPS Kab. Soppeng, 2020: 119-121).), (5) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang ada di Kabupaten Soppeng, yaitu: STAI Al-Ghazali Soppeng (Hasil Observasi, 2020), dan (6) Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Soppeng, yaitu: Ponpes Yasrib Lapajung, Ponpes DDI Pattojo, Ponpes Pergis Ganra, Ponpes Darunnaim Pesse, Ponpes Darusshalihin, Ponpes Siratal Mustakim, Ponpes NU Sering, Ponpes Nurussa'adah, dan PPTQ Imam Hafsh (Hasil Observasi, 2020).

1.1.3.3. Kabupaten Wajo

Lembaga pendidikan Keagamaan Islam (negeri dan swasta) yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari: (1) Raudatul Athfal memiliki sekolah sebanyak 39 buah, guru sebanyak 133 orang dan murid sebanyak 1.849 orang (BPS Kab. Wajo, 2020: 67). (2) Madrasah Ibtidaiyah memiliki sekolah sebanyak 40 buah, guru sebanyak 346 orang dan murid sebanyak 4.239 orang (BPS Kab. Wajo, 2020: 71), (3) Madrasah Tsanawiyah memiliki sekolah sebanyak 35 buah, guru sebanyak 537 orang dan murid sebanyak 6.993 orang (BPS Kab. Wajo, 2020: 75), (4) Madrasah Aliyah memiliki sekolah sebanyak 15 buah, guru sebanyak 238 orang dan murid sebanyak 2.959 orang (BPS Kab. Wajo, 2020: 82), (5) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang ada di Kabupaten Wajo, yaitu: Institut Agama Islam As'adiyah (Hasil Observasi, 2020), dan (6) Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Wajo, yaitu: Pondok Pesantren As'adiyah Putra Sengkang, Pondok Pesantren As'adiyah Putri, Pondok Pesantren Nurul As'adiyah Calaccu, Pondok Pesantren Mujahidin As'Adiyah Kampir, Pondok Pesantren As'adiyah Atapange, Pondok Pesantren Masyitha, Pondok Pesantren Ibnu Rahman Sengkang, Pondok Pesantren al-Muhlisin DDI, Pondok Pesantren Darul As'Adiyah, Pondok Pesantren Raodhatutthalibin, Pondok Pesantren al-Mu'minin,

Pondok Pesantren al-Mujahidin Muhammadiyah, Pondok Pesantren al-Mubarak DDI Tobarakka, (Hasil Observasi, 2020).

1.1.3.4. Kabupaten Sinjai

Lembaga pendidikan Keagamaan Islam (negeri dan swasta) yang ada di Kabupaten Sinjai terdiri dari: (1) Raudatul Athfal memiliki sekolah sebanyak 31 buah, guru sebanyak 118 orang dan murid sebanyak 950 orang (BPS Kab. Sinjai, 2020: 54). (2) Madrasah Ibtidaiyah memiliki sekolah sebanyak 30 buah, guru sebanyak 414 orang dan murid sebanyak 2.431 (BPS Kab. Sinjai, 2020: 58), (3) Madrasah Tsanawiyah memiliki sekolah sebanyak 40 buah, guru sebanyak 788 orang dan murid sebanyak 3.841 (BPS Kab. Sinjai, 2020: 62), (4) Madrasah Aliyah memiliki sekolah sebanyak 28 buah, guru sebanyak 464 orang dan murid sebanyak 3.233 orang (BPS Kab. Sinjai, 2020: 67-69), (5) Peguruan Tinggi Keagamaan Islam yang ada di Kabupaten Sinjai, yaitu: Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai (Hasil Observasi, 2020), (6) yang ada di Kabupaten Sinjai, yaitu: Pondok Pesantren Darul Istiqomah Pucee, Pondok Pesantren Darul Hikmah Lenggolenggo, Pondok Pesantren Darul Istiqomah Biroro, Pondok Pesantren Darussalam, Pondok Pesantren Syiar Islam, Pondok Pesantren Darul Istiqamah Sinjai Utara, Pondok Pesantren Ibadurrahman, Pondok Pesantren Darul Istiqamah Lappae, dan Pondok Pesantren Darul Muttaqin (Hasil Observasi, 2020).

1.1.4. Lembaga Pemerintahan dalam Bidang Keagamaan

Lembaga Pemerintahan dalam bidang Keagamaan yang ada di Bosowasi, yaitu: (1) Kementrian Agama Kabupaten Bone dan 27 KUA yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Bone, (2) Kementerian Agama Kabupaten Soppeng dan 6 KUA yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Soppeng, (3) Kementrian Agama Kabupaten Wajo dan 14 KUA yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Wajo, dan (4) Kementrian Agama Kabupaten Sinjai dan 9 KUA yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Sinjai (Hasil Observasi, 2020).

Tugas pokok kantor-kantor Kementerian Agama tersebut di atas adalah melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah

kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut disebutkan pada Pasal 7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 (Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama). Sedangkan pada pasal 8 disebutkan tentang fungsi-fungsi yang harus diselenggarakan. Fungsi-fungsi tersebut, yaitu: (1) perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota, (2) pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah, (3) pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan, (4) pembinaan kerukunan umat beragama, (5) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi, (6) pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program, (7) dan pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota.

Sedangkan tugas pokok KUA tersebut di atas adalah melaksanakan tugas dan fungsi yang disebutkan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2016. Tugas dan fungsinya, yaitu: (1) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk, (2) penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam, (3) pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan, (4) pelayanan bimbingan keluarga sakinah, (5) pelayanan bimbingan kemasjidan, (6) pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan Syariah, (7) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam, (8) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan (9) pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

1.1.5. Organisasi Kemasyarakatan Islam

Ada beberapa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam yang populer dan bersosialisasi dengan masyarakat di Kawasan Bosowasi. Di antara Ormas-ormas Islam tersebut, yaitu: MUI, NU, Muhammadiyah, LDI, Jama'ah Tabliq, Wahdah Islamiyah, HMI, dan PMII (Hasil Observasi, 2020).

Tujuan utama Ormas Islam tersebut di atas disebutkan pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Tujuannya, yaitu untuk: (1) meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, (2) memberikan pelayanan kepada masyarakat, (3) menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (4) melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat, (6) melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, (7) mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, dan (9) menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan h. mewujudkan tujuan Negara.

Sedangkan fungsinya yang disebutkan pada Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, yaitu: (1) penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi, (2) pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi, (3) penyalur aspirasi masyarakat, (4) pemberdayaan masyarakat, (5) pemenuhan pelayanan social, (6) partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan (7) pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1.1.6. Toleransi Beragama di Bosowasi

Hasil obsevasi (2020) yang dilakukan tentang toleransi beragama pada lima kecamatan untuk setiap kabupaten di Kawasan Bosowasi dapat digambarkan bahwa masyarakat di Kawasan Bosowasi secara umum merupakan pemeluk agama Islam yang taat, kehidupan mereka selalu diwarnai dengan keadaan yang yang religius. Kondisi ini ditunjukkan dengan banyaknya tempat-tempat ibadah dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam. Sekalipun demikian, di Kawasan Bosowasi juga ditemukan tempat-tempat peribadatan agama-agama lain. Para pemeluk agama lain di kawasan tersebut cukup bebas untuk melaksanakan ibadah menurut keyakinannya. Keadaan ini memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan keagamaan di Kawasan Bosowasi karena mereka saling hormat menghormati dan menghargai satu dengan lainnya. Di samping itu peran pemuka agama terutama para alim ulama sangat dominan dalam kehidupan keagamaan

bahkan alim ulama merupakan figur kharismatik yang menjadi panutan masyarakat.

Ormas Islam di Boswasi seperti NU dan Muhammadiyah selama ini gencar mempromosikan keberagamaan moderat. NU dikenal dengan gagasan "Islam Nusantara", yakni corak keislaman yang adaptif pada tradisi dan kultur lokal-tradisional. Sementara Muhammadiyah dikenal dengan agenda "Islam Berkemajuan", yakni Islam yang selaras dengan spirit modernitas dan kemanusiaan universal. NU dan Muhammadiyah merupakan dua ormas Islam paling otoritatif terbukti mampu menjadi inisiator penggerak program kerukunan beragama di Kawasan Bosowasi. Tidak hanya itu, dengan jaringan dan modal sosial yang dimilikinya, NU dan Muhammadiyah selama ini juga menjadi benteng umat Islam di Kawasan Bosowasi dalam melawan derasnya gelombang konservatisme keagamaan.

Di sisi lain, kementerian agama di Kawasan Bosowasi cukup serius memerhatikan sejumlah aspek yang penting bagi terwujudnya kerukunan dan moderasi beragama. Aspek-aspek tersebut antara lain, yaitu: (1) mendorong agenda moderasi keberagamaan dalam konteks Islam dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi cara pandang keagamaan yang konservatif, eksklusif, dan intoleran yang dilakukan oleh para penceramah agama melalui media sosial di Kawasan Bosowasi, (2) Kedua, menghidupkan kembali dialog antaragama yang dilandasi spirit mencari titik temu untuk menciptakan relasi sosial yang damai dan egaliter di Kawasan Bosowasi. Hal ini bertujuan untuk mencari konsensus bersama ihwal hidup damai berdampingan, dan (3) Ketiga, mewujudkan keadilan dan kesetaraan hak bagi seluruh kelompok agama yang ada di Kawasan Bosowasi.

Kantor Kementerian Agama beserta Pemerintah dan para pemuka agama di Kawasan Bosowasi senantiasa membangun karakter untuk saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, memelihara keharmonisan dan kerja sama sosial dalam bermasyarakat. Tujuannya adalah menciptakan kedamaian dan saling menghargai antar pemeluk agama. Sehingga terwujud

kenyamanan dalam mencapai kesejahteraan, peningkatan ekonomi dan kestabilan politik.

MUI juga demikian adanya, misalnya membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dilakukannya bersama dengan instansi yang terkait dan pemerintah daerah di Kawasan Bosowasi. Dalam rangka menjaga kedamaian antar umat beragama, MUI di Kawasan Bosowasi mengadakan pertemuan dengan pemuka agama yang ada di kawasan tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman dan wawasan kebangsaan, memberi pemahaman tentang pentingnya kerukunan dan memberi pemahaman cara mewujudkan kerukunan umat beragama. Hal ini pada pribadi Nabi Muhammad saw. sebagai uswatun hasanah dimana beliau telah memberi teladan bagaimana cara hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama. Salah satunya adalah toleransi antar umat beragama. Ini semua adalah sunatullah atau hukum alam, dimana manusia hidup dalam heterogenitas dari berbagai jenis suku, bangsa dan agama.

Dalam rangka mewujudkan kerukunan, MUI di Kawasan Bosowasi berusaha memberikan pemahaman dan mengamalkan ajaran agama supaya tidak terjadi intoleran dalam hidup beragama. Kelihatannya pemahaman agama yang dangkal menurut MUI di Kawasan Bosowasi akan menimbulkan radikalisme dan menganggap diri paling benar sedangkan orang lain salah semua. Masih dalam pespektif MUI di Kawasan Bosowasi bahwa orang yang tidak memahami dan mengamalkan ajaran agama juga cenderung menjadi pribadi yang liberalis. Dimana mereka lebih memprioritaskan hak azazi manusia meskipun bertentangan dengan nilai-nilai agama, sehingga pribadinya tidak lagi merujuk kepada nilai-nilai agama melainkan hanya untuk kepentingan dan kepuasan pribadi semata. Oleh karenanya, dalam pandangan MUI di Kawasan tersebut bahwa memahami agama bukan saja secara tekstual namun juga secara kontekstual, meyakini bahwa agama adalah rahmatan lil ‘alamiin, yang menjadi rahmat bagi diri serta alam dan lingkungan sekitar.

1.2. Perilaku Sosial Keagamaan

Perilaku sosial keagamaan adalah perbuatan melaksanakan ajaran agama yang dilakukan dengan penuh keyakinan dan kesungguhan hati serta

diimplementasikan di wilayah sosial masyarakat. Kontekstualisasinya dengan ajaran Islam, perbuatan itu merupakan bentuk penghayatan terhadap ajaran Islam yang dipelajari dan diamalkannya. Bukan hanya sekadar melaksanakan rutinitas ibadah sehari-hari melainkan lebih dari itu, yakni aktivitas itu memiliki motif kuat dalam menjalankan ajaran agama yang dimaknainya sebagai ibadah ke dalam bentuk keputusan tindakan sosial yang konkret dan bermakna bagi sesama dan lingkungannya. Ada sinergitas antara pelaksanaan ajaran agama dan tindakan sosial. Hal ini banyak sekali yang diwujudkan di Kawasan Bosowasi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya hidup damai, tenteram, saling menjalin kasih sayang, dan tolong-menolong di antara sesama dan lain-lain. Karena Kawasan Bosowasi kental dengan nuansa suku bugisnya, ajaran-ajaran agama diakulturasikan dengan budaya mereka.

Hasil observasi (2020) yang dilakukan tentang perilaku sosial keagamaan pada lima kecamatan untuk setiap kabupaten di Kawasan Bosowasi dapat digambarkan bahwa masyarakat kawasan Bosowasi berpandangan, keislaman adalah identik dengan kebugisan. Pandangan ini mensyaratkan agar setiap orang Bugis yang sudah akil baliq, yakni sekitar usia 12 tahun, haruslah menjalankan ajaran pokok agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Ajaran pokok tersebut meliputi ibadah formal yang umum, yaitu shalat lima kali sehari semalam, berpuasa pada bulan suci Ramadhan, serta membayar zakat fitrah.

Pandangan di atas tidaklah mengherankan jika muncul kesan di kalangan masyarakat awam bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang dianut oleh orang-orang Bugis yang ada di Kawasan Bosowasi. Namun karena proses keislaman di kalangan warga di Kawasan Bosowasi tidak merata maka secara umum dilihat dari segi tingkat pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari dalam dua kelompok masyarakat, yakni mereka yang tergolong memiliki tingkat pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang dikategorikan baik yang di kalangan masyarakat Bosowasi dikenal sebagai topagama, dan mereka yang tergolong sebagai muslim nominal lantaran lahir sebagai orang Bugis dan mewarisi agama Islam dari orang tua mereka, namun tingkat pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan mereka

sehari-hari relatif sangat rendah yang di kalangan masyarakat Bosowasi dikenal sebagai muslim sossorang. Kedua kelompok ini mengembangkan pola pemahaman dan pengamalan agama yang berdeda antara satu kelompok dengan yang lainnya. Perbedaan ini, sesungguhnya, berpotensi menjadi faktor yang dapat memicu terjadinya jarak sosial antarkomunitas di kalangan masyarakat di Kawasan Bosowasi. Perbedaan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam ini mempengaruhi proses integrasi sosial antarkomunitas muslim Bugis di Kawasan Bosowasi merupakan hal yang menarik untuk dikaji secara mendalam untuk mengetahui hubungan perbedaan kecenderungan pemahaman keagamaan tersebut dengan ikatan sosial yang telah terbina begitu kuat di kalangan masyarakat Bugis di Kawasan Bosowasi.

Mereka yang digolongkan sebagai orang-orang pagama, umumnya, memiliki tingkat kehidupan ekonomi, pendidikan dan sosial yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kelompok sossorang. Meskipun tidak semua orang pagama tergolong beruntung menjalani kehidupan ekonomi yang lebih baik berdasarkan kenyataan masih terdapat sejumlah diantaranya yang secara ekonomi tergolong miskin, kelompok ini umumnya dapat dikategorikan memiliki akses terhadap kegiatan ekonomi yang lebih baik. Mereka pada umumnya memiliki penghasilan yang tetap, baik sebagai petani pemilik lahan pertanian atau perkebunan, pedagang, pegawai negeri atau swasta serta pengusaha. Kehidupan ekonomi yang terbilang baik tersebut memungkinkan mereka untuk memberikan perhatian memadai kepada pemenuhan kebutuhann spiritual dengan jalan berusaha menunaikan kewajiban agama yang membutuhkan kemampuan ekonomi memadai, misalnya, membayar zakat, memberi infaq atau sadaqah, termasuk berusaha menunaikan ibadah haji yang hanya diwajibkan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang memungkinkan yang bersangkutan menunaikannya. Dilihat dari sisi pendidikan, umumnya, kelompok pagama memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik dari kelompok sossorang. Pada umumnya, orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan relatif baik memiliki kesadaran beragama yang memungkinkan yang bersangkutan untuk menganut

agama atas dasar pengetahuan yang diperoleh baik dengan cara belajar sendiri ataupun dengan cara menempuh pendidikan agama secara formal.

Jika dilihat dari perspektif kehidupan sosial, kelompok muslim pagama, umumnya, terdiri atas orang-orang yang berada pada lapisan sosial menengah ke atas. Hal ini merupakan konsekuensi dari proses keislaman yang bermula dari kalangan bangsawan kerajaan-kerajaan Bugis di Kawasan Bosowasi. Atas jasa merekalah, Islam kemudian berkembang di kalangan lapisan masyarakat umum. Tidak sedikit dari keluarga kerajaan tergolong orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk menjadi penganjur Islam di tengah-tengah masyarakat Bugis.

Hal tersebut menunjukkan proses keislaman dijalankan secara struktural dengan menggunakan otoritas politik secara top-down yang dimulai dari keluarga kerajaan. Peranan yang dimainkan oleh penguasa dalam mendukung proses keislaman di kalangan masyarakat Bugis di Kawasan Bosowasi memberi dorongan yang kuat bagi kalangan bangsawan Bugis-Bugis untuk menjadikan diri mereka sebagai teladan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran Islam. Selain itu, adanya penghargaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang-orang yang memiliki tingkat pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang baik mendorong para penguasa serta pemuka masyarakat untuk berusaha memahami dan menjalankan ajaran Islam secara baik. Karena itulah maka identitas keislaman sangat kuat di kalangan kaum bangsawan Bugis di Kawasan Bosowasi.

Perbedaan kecenderungan pemahaman keagamaan berpotensi menjadi sumber kecemburuan sosial yang pada gilirannya dapat menyulut terjadinya konflik sosial yang berpeluang merusak hubungan antar komunitas di dalam masyarakat di Kawasan Bosowasi. Terjadinya konflik, umumnya, merupakan akibat langsung dari perbedaan dan pertentangan kepentingan, pendapat, ide dan paham. Dilihat dari sudut perbedaan kepentingan bahwa perpecahan dapat terjadi karena kelangkaan posisi dan sumber-sumber yang diperebutkan. Makin sedikit posisi yang diperoleh, makin tajam pula konflik dan persaingan di antara peserta konflik. Disebabkan karena perbedaan kepentingan, paham dan ide merupakan keniscayaan dalam kehidupan masyarakat, maka sudah pasti konflik menjadi sesuatu yang selalu hadir sepanjang perjalanan kehidupan masyarakat

tersebut. Karena itu maka tidak bisa dihindarkan terjadinya konflik di dalam masyarakat. Namun dalam melihat konflik yang terjadi di dalam masyarakat perlu dibedakan antara konflik dengan kekerasan, dengan dengan konflik yang tidak menggunakan kekerasan.

Meskipun hubungan antarkomunitas di kalangan masyarakat muslim Bugis di Kawasan Bosowasi tidak sepenuhnya bebas dari konflik antarindividu maupun antarkelompok, namun hal tersebut sangat jarang terjadi. Adanya kesadaran untuk saling memahami dan menerima keadaan masing-masing individu ataupun kelompok menjadi faktor utama dalam menjalin hubungan anatarindividu maupun antarkelompok di kalangan masyarakat Bugis. Kesadaran ini tumbuh di atas nilai-nilai Islam yang berakulturasi dengan budaya mereka. Nilai-nilai akulturasi tersebut, yaitu: Sipakatau, Sipakainge', Sipakalebbi, dan Sipatokkong. Sipakatau, adalah sifat yang tidak saling membeda-bedakan, semua manusia sama, tidak ada perbedaan derajat, kekayaan, kecantikan, dsb. Dalam kehidupan, kita tidak selayaknya membeda-bedakan orang-orang. Kita harus saling menghargai dan menghormati sesama. Sipakalebbi, adalah sifat saling menghargai sesama manusia. Kita sesama manusia, harus saling menghargai. Semua manusia ingin diperlakukan dengan baik. Dengan sipakalebbi diharapkan akan membawa manusia ke jalan yang benar. Jadi intinya adalah, apabila kita ingin diperlakukan dengan baik maka perlakukan pula orang lain dengan baik pula. Sipakinge, adalah sifat di mana kita saling mengingatkan. Apabila ada di antara kita yang melakukan kesalahan tidak ada salahnya kita saling mengingatkan. Tujuan saling mengingatkan agar dapat mengubah dan menghindari sifat-sifat tercela yang tidak disukai oleh Allah swt. Sipatokkong, adalah sifat saling bekerja sama. Sipatokkong berarti berdiri bersama-sama. Contoh kecilnya, orang Bugis dalam melakukan suatu pekerjaan biasanya dilakukan bersama-sama. Pekerjaan yang berat apabila dikerjakan bersama-sama akan menjadi lebih ringan. Dalam arti lain, sipatokkong juga bisa diartikan saling membantu. Saling membantu kepada saudara-saudara kita yang sedang susah maupun yang sedang membutuhkan bantuan.

Kesadaran untuk menjalin hubungan yang harmonis di kalangan sesama warga Bugis di Kawasan Bosowasi tumbuh di atas keinginan untuk saling menerima keadaan, pandangan dan tindakan dalam satu tatanan kehidupan bersama yang diliputi semangat saling menghargai sebagai manusia yang dalam istilah Bugis disebut sipakatau. Sepanjang semangat sipakatau ini dijadikan rujukan utama di dalam berhubungan dengan orang lain maka bisa dipastikan terjadinya hubungan yang saling menghargai antarsesama manusia tanpa mempedulikan perbedaan yang terjadi sebagai akibat dari perbedaan cara pandang terhadap kehidupan termasuk perbedaan paham dan kecenderungan pengamalan keagamaan.

Untuk membangun kehidupan sosial yang didasarkan atas semangat saling menghargai itulah diperukan kesadaran untuk menjadikan norma-norma sosial dan budaya yang sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan sebagai kekuatan pengikat dalam menjalin berbagai aktivitas sosial baik antara individu satu dengan individu lainnya dalam satu komunitas yang sama maupun antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya di dalam masyarakat. Proses terjadinya integrasi sosial berawal dari munculnya kesempatan untuk mengadakan interaksi dengan orang-orang lain yang kemudian melahirkan komunikasi dalam bentuk kontak sosial antar individu maupun antara kelompok yang terlibat dalam kontak sosial tersebut. Jika proses interaksi ini terjadi berulang-ulang maka masing-masing individu maupun kelompok yang terlibat di dalamnya secara bersama-sama akan melahirkan norma-norma yang akan dijadikan penuntun bagi masing-masing anggota dari masing-masing kelompok dalam melakukan tindakan sosial. Konsensus yang lahir dari kebutuhan untuk membina kehidupan bersama akan berfungsi secara baik selama para anggota dari masing-masing kelompok yang berbeda merasakan manfaatnya secara fungsional dalam membina tata hubungan sosial. Dengan demikian maka untuk memelihara dan membina proses interaksi sosial yang diinginkan bersama diperlukan adanya kesamaan persepsi di samping kesamaan sikap terhadap norma-norma yang telah disepakati tersebut. Tanpa adanya norma yang

disepakati sulit diharapkan terciptanya proses interaksi sosial yang dapat menjamin terjadinya tatanan kehidupan sosial yang diharapkan.

Pola integrasi sosial yang terjadi di kalangan masyarakat muslim Bugis di Kawasan Bosowasi, terdiri dari tiga, yaitu: (1) Adanya nilai-nilai sosial fundamental yang disepakati sebagai acuan normatif dan praktis dalam berinteraksi dengan sesama warga masyarakat, (2) adanya kesadaran untuk memelihara kesetiaan ganda kepada masing-masing unit sosial sebagai wadah menjalin serta memelihara hubungan sosial sambil tetap memelihara kesetiaan kepada masing-masing unit sosial tersebut, dan (3) Adanya tuntutan untuk bekerja sama sebagai konsekuensi saling ketergantungan antarindividu maupun antarkelompok dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masing-masing

Secara teologis keberadaan agama Islam sebagai keyakinan mayoritas penduduk yang mendiami wilayah Kawasan Bosowasi merupakan hal yang tidak dapat dipertanyakan lagi. Hampir seluruh orang Bugis beragama Islam. Jika ada orang Bugis yang tercatat sebagai penganut agama selain Islam, maka hal tersebut dimungkinkan terjadi karena adanya usaha dari penganut agama lain yang berusaha untuk mengajak mereka memeluk agama tertentu selain Islam. Mereka ini, sesungguhnya, kurang atau bahkan tidak menyadari kalau mereka telah dikategorikan sebagai bukan penganut Islam lagi. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini, umumnya, tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang ajaran Islam. Penerimaan Islam sebagai agama mereka merupakan keniscayaan budaya yang terkait dengan panngadakkang. Mereka pada umumnya hanyalah menerima Islam sebagai warisan dari orang tua mereka sehingga mereka tetap merasa sebagai muslim. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mereka yang dikategorikan sebagai muslim sossorang ini tidak taat menjalankan ibadah ritual. Tidak sedikit di antara mereka yang hanya menjalankan ketentuan syari'at Islam dalam hal yang berkaitan dengan pernikahan dan kematian. Atau jika memungkinkan mereka ikut menyambut hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sebagai bagian dari tradisi dalam masyarakat Bugis

Meskipun masyarakat Bugis di Kawasan Bosowasi pada umumnya merupakan penganut agama Islam, namun tidaklah semuanya tergolong taat menjalankan ibadah ritual termasuk ibadah pokok sekalipun seperti shalat dan puasa. Lebih dari itu, mereka juga tergolong orang-orang yang masih setia menjalankan tradisi keagamaan yang merupakan kelanjutan dari kepercayaan pra-Islam. Orang-orang di Kawasan Bosowasi yang masih mempraktekkan tradisi keagamaan lokal tersebut akan menolak jika dikatakan sebagai bukan muslim. Kuatnya semangat keagamaan orang-orang Bugis sebagai muslim menyebabkan mereka hanya mengakui Islam sebagai agama mereka, meskipun dalam kenyataan sehari-hari sebagian dari mereka yang memiliki pengetahuan yang sangat sedikit tentang Islam juga mempertahankan kepercayaan yang berasal dari leluhur mereka yang sebagiannya dicampur ke dalam pengamalan ajaran Islam.

2. Realitas Ketahanan Pangan di Bosowasi

Hasil wawancara (2020) yang dilakukan tentang realitas ketahanan pangan di Bosowasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan atau Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sinjai dapat direduksi ke dalam empat tema besar, yaitu: Permasalahan dan potensi pangan, arah kebijakan, strategi umum, dan kebijakan ketahanan pangan. Rangkuman hasil wawancara melalui empat tema besar tersebut, dapat disajikan seperti di bawah ini:

2.1. Permasalahan dan Potensi Pangan

Ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga merupakan landasan bagi ketahanan pangan masyarakat, dan hal ini menjadi pilar bagi ketahanan pangan daerah di Kawasan Bosowasi. Berdasarkan pemahaman tersebut maka salah satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan di Kawasan Bosowasi adalah memberdayakan masyarakat agar mereka mampu menanggulangi masalah pangannya secara mandiri serta mewujudkan ketahanan pangan rumahtangganya secara berkelanjutan. Hal ini dapat dikatakan terwujud jika telah memenuhi dua aspek, yaitu: Pertama, tersedianya pangan yang cukup dan merata untuk seluruh

penduduk. Kedua, setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi kecukupan gizi guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif dari hari ke hari.

Melalui proses pemberdayaan, masyarakat ditingkatkan kapasitasnya agar semakin mampu meningkatkan produktivitas, produksi dan pendapatannya, baik melalui usahatani maupun usaha lainnya. Peningkatan pendapatan akan menambah kemampuan daya beli, sehingga menambah keleluasaan masyarakat untuk memilih pangan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Peningkatan produksi komoditas pangan oleh masyarakat, di samping meningkatkan ketersediaan pangan dalam rumah tangga juga akan memberikan kontribusi terhadap ketersediaan pangan di Kawasan Bosowasi, yang selanjutnya merupakan kontribusi terhadap ketersediaan pangan nasional.

Bagi kelompok masyarakat tertentu yang rentan terhadap masalah kerawanan pangan seperti golongan miskin, ibu hamil dan anak balita, pemerintah daerah wajib mengupayakan jaminan akses pangan bagi mereka, agar terpenuhi haknya untuk memperoleh pangan yang cukup.

Pada tataran rumah tangga, persoalan yang menonjol dalam pemantapan ketahanan pangan di Kawasan Bosowasi adalah masih besarnya proporsi kelompok masyarakat yang mempunyai daya beli rendah, ataupun yang tidak mempunyai akses atas pangan karena berbagai sebab, sehingga mereka mengalami kerawanan pangan kronis maupun transien. Jika kondisi yang mereka alami ini berkelanjutan, maka Kawasan Bosowasi akan kehilangan potensi terbaik dari sebagian sumberdaya manusianya.

Pada sisi lain, Kawasan Bosowasi mempunyai keunggulan komparatif sebagai kawasan agraris dan maritim. Keunggulan komparatif tersebut merupakan fundamental perekonomian yang perlu didayagunakan melalui pembangunan ekonomi sehingga menjadi keunggulan bersaing. Dengan pendekatan demikian, perekonomian yang dikembangkan di Kawasan Bosowasi memiliki landasan yang kokoh pada sumberdaya domestik, memiliki kemampuan bersaing yang tinggi. Dalam kaitan ini, pembangunan ekonomi di bidang pangan, baik yang berbasis tanaman, peternakan, perikanan maupun kehutanan, akan memperkuat ketahanan

pangan kawasan tersebut. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi di bidang pangan ini merupakan prioritas strategis dalam pembangunan di Kawasan Bosowasi.

Memperhatikan permasalahan dan potensi yang di kemukakan di atas, maka pembangunan ketahanan pangan di Kawasan Bosowasi diarahkan untuk mewujudkan kemandirian pangan, untuk menjamin ketersediaan pangan serta menjamin konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang di tingkat rumah tangga sepanjang waktu melalui pemanfaatan sumberdaya dan budaya lokal, teknologi inovatif dan peluang pasar, peningkatan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan.

2.2. Arah Kebijakan

Kebijakan pembangunan ketahanan pangan di Kawasan Bosowasi dapat dideskripsikan sebagai berikut: Pertama, pada sisi ketersediaan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (1) meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas sumberdaya alam dan air, (2) menjamin kelangsungan produksi pangan utamanya dari produksi, (3) mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat, dan (4) meningkatkan kapasitas produksi daerah masing-masing dengan menetapkan lahan abadi untuk produksi pangan.

Kedua, Pada aspek distribusi, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (1) meningkatkan sarana dan prasarana distribusi pangan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan, termasuk di dalamnya mengurangi kerusakan bahan pangan dan kerugian akibat distribusi yang tidak efisien, (2) mengurangi dan/atau menghilangkan peraturan daerah yang menghambat distribusi pangan antar daerah di Kawasan Bosowasi, dan (3) mengembangkan kelembagaan pengolahan dan pemasaran di pedesaan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi pangan serta mendorong peningkatan nilai tambah.

Ketiga, dalam hal konsumsi, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (1) menjamin pemenuhan pangan bagi setiap rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman dikonsumsi dan bergizi seimbang, (2) mendorong, mengembangkan dan membangun serta memfasilitasi peran serta

masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi pemenuhan hak atas pangan, (3) mengembangkan jaringan antar lembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan, dan (4) meningkatkan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan/pangan bersubsidi kepada golongan masyarakat tertentu (golongan miskin, ibu hamil, balita gizi buruk, dan sebagainya).

2.3. Strategi Umum

Berdasarkan arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi untuk mewujudkan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan di Kawasan Bosowasi adalah strategi jalur ganda, yaitu: (1) membangun ekonomi berbasis pendapatan, dan (2) memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui pemberian bantuan langsung agar tidak semakin terpuruk, serta pemberdayaan agar mereka semakin mampu mewujudkan ketahanan pangannya secara mandiri. Kedua strategi tersebut dijalankan dengan menggerakkan seluruh komponen di daerah masing-masing, yaitu pemerintah daerah, masyarakat termasuk LSM, organisasi profesi, organisasi massa, koperasi, organisasi sosial, serta pelaku usaha, untuk melaksanakan aktivitas ekonominya secara efisien dan bertanggungjawab, melaksanakan kewajiban sosialnya serta, membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, golongan usia lanjut dan cacat ganda.

2.4. Kebijakan Ketahanan Pangan

Kebijakan ketahanan pangan di Kawasan Bosowasi terdiri dari 14 elemen penting, yang diharapkan menjadi panduan bagi pemerintah daerah masing-masing, swasta dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, dan tingkat wilayah. Ke 14 elemen penting tersebut, yaitu:

Pertama, Menjamin Ketersediaan Pangan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut, yaitu: (1) Pengembangan Lahan Abadi Beririgasi dan Lahan Kering. Kegiatan ini mencakup penetapan kawasan pertanian dan pengendalian alih fungsi lahan melalui penegakan peraturan secara lebih tegas, penataan infrastruktur dan penerapan regulasi atas infrastruktur

pertanian, dan penguatan status kepemilikan lahan, (2) Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan. Kegiatan ini meliputi penyebarluasan penerapan teknologi konservasi dan rehabilitasi pada usaha-usaha berbasis pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan, dan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kerusakan, serta rehabilitasi lahan-lahan usaha pertanian dan perkebunan secara luas, (3) Pelestarian Sumberdaya Air dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penegakan peraturan untuk menjamin kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam secara ramah lingkungan, rehabilitasi daerah aliran sungai dan lahan kritis, konservasi air dalam rangka pemanfaatan curah hujan dan aliran permukaan, pengembangan infrastruktur pengairan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan air, serta penyebarluasan penerapan teknologi ramah lingkungan pada usaha-usaha yang memanfaatkan sumber daya air dan daerah aliran sungai, (4) Pengembangan dan Penyediaan Benih, Bibit Unggul dan Alsintan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui pengembangan benih/bibit induk unggul berkualitas spesifik lokasi, perakitan serta pengembangan produksi alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan efisiensi budidaya pertanian, (5) Pengembangan Skim Permodalan yang Kondusif bagi Petani dan Nelayan. Kegiatan ini meliputi upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang dialami petani/nelayan dalam mengakses permodalan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, baik dalam hal teknis administrasi maupun beban finansial yang harus ditanggung petani/nelayan. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan seperti pinjaman langsung bergulir kepada kelompok petani/nelayan, pengembangan usaha kredit mikro, pengembangan koperasi simpan pinjam, dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya agar lebih efektif dalam membantu menyediakan modal usaha dan mendidik kedisiplinan mengelola pinjaman pada petani/nelayan, (6) Peningkatan Produktivitas Melalui Perbaikan Genetis dan Teknologi Budaya. Kegiatan ini mencakup perakitan teknologi untuk menghasilkan varietas unggul spesifik lokasi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas usaha pertanian, perikanan dan kehutanan serta untuk perbaikan teknologi budidaya, meningkatkan efisiensi, memperbaiki/mempertahankan kesuburan lahan dan meningkatkan pendapatan

petani, (6) Peningkatan Efisiensi Penangan Pasca Panen dan Pengolahan. Kegiatan ini antara lain terdiri atas perakitan dan pengembangan teknologi pasca panen dan pengolahan tepat guna spesifik lokasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, mendorong pemanfaatan teknologi dan peralatan tersebut melalui penyediaan insentif bagi pelaku usaha, khususnya skala kecil, (7) Penyediaan Insentif Investasi di Bidang Pangan. Kegiatan ini meliputi pemberian berbagai kemudahan pada investor untuk mengurangi biaya dan waktu di bidang tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan, antara lain dalam hal perizinan, penyediaan informasi potensi dan teknologi, kepastian hukum atas penguasaan lahan/konsesi, perpajakan dan pungutan lainnya, serta keamanan usaha dari tindak kriminal, dan (8) Penguatan Penyuluhan, Kelembagaan Petani/Nelayan dan Kemitraan. Kegiatan ini meliputi penyusunan dan sosialisasi peraturan penyuluhan, penataan kelembagaan penyuluhan pertanian, peningkatan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan penerapan secara meluas pendekatan pemberdayaan/pendampingan kepada kelompok masyarakat petani/nelayan.

Kedua, Menata Pertanahan dan Tata Ruang/Wilayah. Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut, yaitu: (1) Pengembangan Reforma Agraria. Kegiatan ini adalah penataan kembali kepemilikan, penguasaan, serta pemanfaatan lahan usaha dan lahan pertanian untuk memenuhi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial dan kelestarian sumberdaya alam. Hal ini dilaksanakan dengan penyusunan kebijakan operasional dan petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria, serta melaksanakannya secara terdesentralisasi dan partisipatif mengikutsertakan unsur-unsur masyarakat, (2) Penyusunan Tata Ruang Daerah dan Wilayah. Kegiatan ini meliputi perbaikan Rencanan Tata Ruang Daerah dan Wilayah secara terkoordinasi antar daerah/wilayah dengan mempertimbangkan unsur-unsur sosial, ekonomi, budaya dan kelestarian sumberdaya alam, disertai penerapannya secara tegas dan konsisten, dengan penerapan sanksi terhadap pelanggaran, (3) Perbaikan Administrasi Pertanahan dan Sertifikasi Lahan. Kegiatan ini meliputi perbaikan sistem pelayanan sertifikasi lahan, fasilitasi/dukungan proses sertifikasi lahan bagi

masyarakat kurang mampu dan percepatan penyelesaian masalah administrasi pertanahan secara hukum, dan (4) Penerapan Sistem Perpajakan Progresif Bagi Pelaku Konversi Lahan Pertanian Subur dan Pembiaran Lahan Pertanian Terlantar. Kegiatan ini meliputi penyusunan peraturan dan penerapannya secara tegas bidang perpajakan atas lahan atau usaha yang dapat menghambat/memberatkan setiap upaya mengkonversi lahan pertanian subur, dan atau membiarkan lahan pertanian terlantar.

Ketiga, Pengembangan Cadangan Pangan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut, yaitu: (1) Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dititikberatkan pada fasilitasi pengembangan cadangan pemerintah daerah masing-masing di Kawasan Bosowasi agar setiap jenjang pemerintahan mampu mengatasi masalah kerawanan pangan sesuai kewenangan dan tanggungjawab otonominya. Pengembangan sistem cadangan pangan pemerintah secara berjenjang ini diprioritaskan pada daerah-daerah rentan kerawanan pangan, dengan jenis pangan serta sistem pengelolaan yang sesuai budaya masyarakat setempat, dan (2) Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat. Kegiatan ini meliputi fasilitasi pengembangan sistem cadangan pangan masyarakat, di daerah rawan pangan kronismaupun rawan pangan darurat, agar masing-masing kelompok masyarakat mampu memanfaatkan dan mengelola sistem cadangan pangannya untuk mengatasi masalah kerawanan pangannya secara mandiri dan berkelanjutan. Fasilitasi dilakukan dalam aspek manajemen kelompok maupun aspek teknis pengelolaan pangan sehingga kualitas dan nilai ekonominya dapat ditingkatkan.

Keempat, Mengembangkan Sistem Distribusi Pangan yang Efisien. Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut, yaitu: (1) Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Distribusi. Kegiatan ini meliputi rehabilitasi dan pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, tempat pendaratan, serta pengembangan sistem angkutan umum yang menjangkau daerah-daerah terpencil dan rawan gangguan bencana. Pemerintah melaksanakan pembangunan pada segmen-segmen yang tidak mampu dilaksanakan oleh swasta, dan memfasilitasi peran swasta untuk mengembangkan segmen-segmen yang meng-

untungkan, (2) Penghapusan Retribusi Produk Pertanian dan Perikanan. Kegiatan ini meliputi penetapan aturan penghapusan retribusi produk pertanian dan perikanan, penelaahan terhadap peraturan pemerintah dan pemerintah daerah dan membatalkannya bila masih ada, (3) Pemberian Subsidi Transportasi bagi Daerah Sangat Rawan dan Daerah Terpencil. Kegiatan ini antara lain dapat berupa penyediaan pelayanan transportasi bersubsidi oleh pemerintah daerah masing-masing, bekerja sama dengan pemerintah daerah atau dengan swasta untuk menjamin stabilitas dan kontinuitas pasokan pangan pada daerah-daerah rawan pangan, rawan terisolasi dan daerah terpencil, dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat di daerah tersebut, dan (4) Pengawasan Sistem Persaingan Perdagangan yang Tidak Sehat. Kegiatan ini meliputi pengkajian dan penerapan regulasi perdagangan yang menjamin proses yang adil dan bertanggungjawab, serta melindungi para pelaku ekonomi dari persaingan yang tidak sehat.

Kelima, Menjaga Stabilitas Harga Pangan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut, yaitu: (1) Pemantauan Harga Pangan Pokok Secara Berkala. Kegiatan ini meliputi pemantauan harga beberapa bahan pangan tertentu yang bersifat pokok dan strategis, khususnya pada bulan-bulan tertentu saat produksi menurun dan kebutuhan meningkat. Data hasil pemantauan dapat memberikan indikasi stabilitas harga. Apabila terjadi gejolak harga yang meresahkan masyarakat, maka pemerintah melakukan tindakan intervensi untuk menstabilkan kembali pada tingkat yang dapat diterima. Pada musim panen, pemantauan harga bermanfaat untuk mencegah agar harga gabah/beras tidak jatuh hingga di bawah harga, dan (2) Pengelolaan Pasokan Pangan dan Cadangan Penyangga untuk Stabilisasi Harga. Kegiatan ini meliputi penyediaan cadangan beras pemerintah setempat, serta kerja sama dengan badan-badan usaha pemerintah setempat dan swasta dalam penyediaan cadangan penyangga bahan pangan lainnya, untuk dimanfaatkan/dimobilisasi apabila terjadi kelangkaan pasokan atau gejolak harga.

Keenam, Meningkatkan Aksesibilitas Rumahtangga Terhadap Pangan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut, yaitu: (1) Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Rawan Pangan. Kegiatan ini meliputi

pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu memahami peluang dan mendayagunakan sumberdaya yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga. Peningkatan kapasitas meliputi kemampuan berorganisasi, bekerja sama dan pembentukan modal, keterampilan mengolah sumberdaya alam, serta mengelola usaha dan mengembangkan jaringan usaha. Di samping itu diberikan pula bantuan untuk menambah aset kelompok untuk mempercepat pengembangan usahanya. Tahap selanjutnya adalah peningkatan kesadaran gizi serta sanitasi dan higiene dalam lingkungan rumah tangga, (2) Peningkatan Efektivitas Program Raskin. Kegiatan ini meliputi perbaikan metode penentuan kelompok sasaran menggunakan informasi terkini, melibatkan masyarakat desa untuk menajamkan proses seleksi kelompok sasaran, memantau dan mengawasi proses penyaluran, dan memberikan saran/umpan balik terhadap efektivitas program Raskin. Di samping itu juga kontribusi pemerintah setempat dalam penyediaan biaya distribusi dari tingkat desa ke titik bagi, dan (3) Penguatan Lembaga Pengelola Pangan di Pedesaan. Kegiatan ini memfasilitasi berbagai lembaga sosial masyarakat di pedesaan yang bergerak di bidang pangan agar mampu meningkatkan perannya dalam turut serta mengatasi masalah pangan dan gizi di lingkungannya, dan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat di sekelilingnya untuk berperan serupa.

Ketujuh, Melaksanakan Diversifikasi Pangan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut, yaitu: (1) Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan dan Gizi Seimbang. Kegiatan ini meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi, keterampilan mengelola pangan dan konsumsi dengan gizi seimbang, sanitasi dan higiene di bidang pangan, dan sumberdaya keluarga untuk meningkatkan gizi, (2) Pengembangan Teknologi Pangan. Kegiatan ini meliputi perekayasaan atau inovasi terhadap teknologi/kearifan lokal di bidang pangan, untuk meningkatkan kualitas fisik maupun kandungan gizi, daya simpan, dan daya saing komoditas pangan. Teknologi tepat guna spesifik lokasi ini membantu masyarakat dalam kegiatan produksi, cadangan, distribusi dan perdagangan pangan hingga aktivitas jasa boga untuk meningkatkan ketersediaan pangan serta pendapatan masyarakat, dan (3) Diversifikasi Usahatani dan

Pengembangan Pangan Lokal. Kegiatan ini antara lain adalah memfasilitasi kelompok masyarakat melalui pendampingan, inovasi terhadap kearifan lokal dan dukungan input atau permodalan untuk melakukan diversifikasi usahatani. Hal ini untuk memperkenalkan berbagai peluang peningkatan pendapatan melalui pendayagunaan sumber-sumber pangan lokal menjadi bahan pangan yang sehat dan bergizi, serta tidak kalah menarik dengan bahan pangan produk industri.

Kedelapan, Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut, yaitu: (1) Pengembangan dan Penerapan Sistem Mutu Pada Proses Produksi, Olahan dan Perdagangan Pangan. Kegiatan ini meliputi perumusan dan penetapan sistem mutu, penyuluhan, pelayanan dan fasilitasi penerapan sistem mutu, pemantauan penerapan sistem mutu serta penghargaan terhadap produsen, pengolah dan pedagang di bidang pangan yang telah menerapkan sistem mutu dengan baik, (2) Peningkatan Kesadaran Mutu dan Keamanan Pangan Pada Konsumen. Kegiatan ini meliputi pendidikan dan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik melalui jalur formal maupun non formal untuk meningkatkan pemahaman terhadap mutu dan keamanan pangan serta dampaknya terhadap kesehatan tubuh, serta kemampuan untuk menyeleksi pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi, dan (3) Pencegahan Dini dan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Aturan Mutu dan Keamanan Pangan. Kegiatan ini antara lain adalah kampanye peningkatan kesadaran masyarakat atas berbagai aturan tentang mutu dan keamanan pangan, penerapan sistem pemantauan terhadap produk pangan yang berpotensi pelanggaran dan membahayakan, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran. Kesadaran masyarakat atas bahaya pada bahan pangan yang dikonsumsi akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencegahan dini dan pengawasan.

Kesembilan, Mencegah dan Menangani Keadaan Rawan Pangan dan Gizi. Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut, yaitu: (1) Pengembangan Isyarat Dini dan Penanggulangan Keadaan Rawan Pangan dan Gizi (SKPG). Kegiatan ini meliputi peningkatan kepedulian pemerintah dan masyarakat khususnya di kabupaten, terhadap manfaat sistem isyarat dini serta

memfasilitasi penerapannya sesuai kondisi setempat. Di samping itu juga memfasilitasi pemerintah daerah untuk membangun kemampuan untuk merespon isyarat tersebut secara tepat dan cepat untuk mencegah dan mengatasi terjadinya kerawanan pangan, (2) Peningkatan Keluarga Sadar Gizi. Kegiatan ini antara lain meliputi penyuluhan dan bimbingan sosial kepada keluarga yang membutuhkan melalui sistem komunikasi, informasi dan edukasi yang sesuai dengan situasi sosial budaya dan ekonomi setempat, (3) Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Peningkatan Gizi Keluarga. Kegiatan ini antara lain adalah penyuluhan, bimbingan dan fasilitasi kepada kelompok masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga, dan (4) Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Rawan Pangan dan Gizi. Kegiatan ini berupa pengeluaran cadangan beras pemerintah, yang dikelola Perum Bulog, oleh Menteri Sosial atas permintaan pemerintah daerah, untuk menanggulangi masalah kerawanan pangan dan gizi di daerahnya.

Kesepuluh, Meningkatkan Peran Serta Masyarakat. Kebijakan ini dilaksanakan dengan menerapkan sistem penghargaan tingkat nasional kepada mereka yang telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan di bidang pangan dan gizi, untuk memotivasi dan memperluas peran serta lembaga-lembaga pemerintah daerah, lembaga non pemerintah, organisasi masyarakat maupun perorangan untuk melakukan hal serupa.

Kesebelas, Mengembangkan Sumberdaya Manusia. Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut, yaitu: (1) Perbaikan Program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan di Bidang Pangan. Kegiatan ini meliputi penataan kembali kelembagaan, peningkatan kualifikasi tenaga pengelola dan pelaksana, peningkatan mutu penyelenggaraan, serta pengembangan jaringan kerjasama pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, (2) Pemberian Muatan Pangan dan Gizi pada Pendidikan Formal. Kegiatan ini meliputi penyusunan program dan kurikulum yang tepat untuk masing-masing segmen dan tingkatan, sosialisasi kepada pihak terkait dan penerapan secara partisipatif dengan seluruh pemangku kepentingan, dan (3) Pemberian Jaminan Pendidikan Dasar dan Menengah Khususnya bagi Perempuan dan Anak-anak di Pedesaan. Hal ini dilakukan dengan

peningkatan kepedulian dan fasilitasi kepada pemerintah daerah kabupaten untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh kebijakan wajib belajar sembilan tahun, dengan penajaman prioritas pada perempuan dan anak-anak di pedesaan. Dana alokasi khusus bidang pendidikan, dikombinasikan dengan dana pemerintah daerah dan dana sumbangan masyarakat, digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dan membebaskan biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.

3. Kontribusi Realitas Sosial Keagamaan

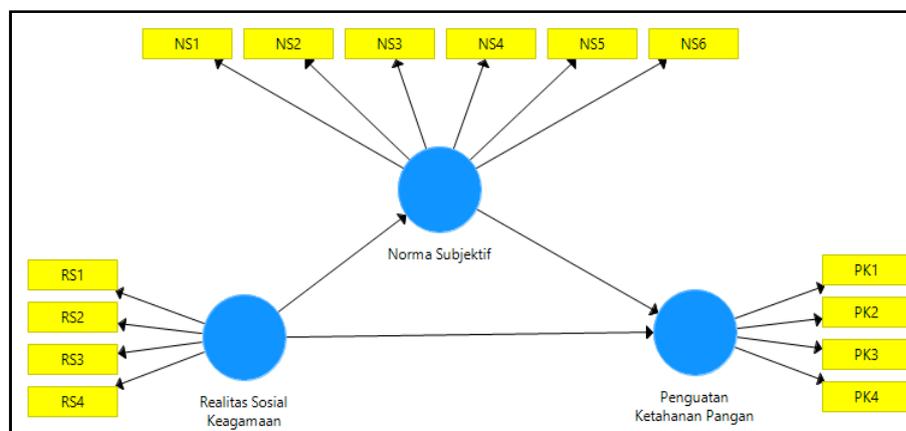
Dalam mengetahui kontribusi Realitas Sosial Keagamaan (RS) terhadap Penguatan Ketahanan Pangan (PK) rumah tangga di Kawasan Bosowasi melalui mediasi dan tanpa mediasi Norma Subjektif (NS) digunakan metode *Partial Least Square* (PLS). PLS merupakan metode analisis dengan *Structural Equation Modelling* (SEM) yang berbasis variance. Keunggulan metode ini adalah tidak memerlukan asumsi dan dapat diestimasi dengan jumlah sampel yang relatif kecil. Alat bantu yang digunakan berupa program aplikasi statistik *Smart-PLS* Versi 3.3.2 yang dirancang khusus untuk mengestimasi persamaan struktural dengan basis variance.

Variabel Realitas Sosial Keagamaan (RS) merupakan variabel eksogen, terdiri dari 4 indikator. Keempat indikator tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan 4 Kementerian Agama dan 4 MUI di Kawasan Bosowasi. Keempat indikator yang dimaksud, yaitu: Sipakatau' (tidak saling membedakan), Sipakalebbi (Saling Menghargai), Sipakainge (Saling mengingatkan), dan Sipatokkong (Saling Bekerjasama). Sedangkan variabel Norma Subjektif (NS) merupakan variabel intervening, terdiri dari 6 indikator. Variabel dan indikatornya diturunkan dari Teori *Planned Behavior*. Indikatornya, yaitu: Pengaruh Teman, Keluarga, Tetangga, Ulama, Tokoh Masyarakat, dan Perintah Pemerintah Daerah. Adapun variabel Penguatan Ketahanan Pangan (PK) merupakan variabel endogen, terdiri dari 4 indikator. Keempat indikatornya diturunkan dari konsep FAO tentang ketahanan pangan dan indikatornya, yaitu: Ketersediaan Pangan, Akses Pangan, Pemanfaatan Pangan, dan Stabilitas Pangan.

3.1. Konstruksi Diagram Jalur

Konstruksi Diagram Jalur untuk pengukuran kontribusi Realitas Sosial Keagamaan (RS) terhadap Penguatan Ketahanan Pangan (PK) rumah tangga di Kawasan Bosowasi melalui mediasi dan tanpa mediasi Norma Subjektif (NS), disajikan dalam bentuk gambar seperti yang disajikan pada gambar 4.1 (lihat gambar 4.1).

Gambar 4.1
Konstruksi Diagram Jalur



Sumber: Dirangkum dari Berbagai Sumber, 2020

Pada gambar 4.1 (lihat gambar 4.1) ditunjukkan bahwa konstruk Realitas Sosial Keagamaan (RS) diukur dengan 4 buah indikator, yaitu RS1, RS2, RS3, dan RS4 dan KM5. Demikian juga konstruk Norma Subjektif (NS) diukur dengan 6 indikator, yaitu: NS1, NS2, NS3, NS4, NS5 dan NS6. Sedangkan konstruk Penguatan Ketahanan Pangan (PK) diukur dengan 4 indikator, yaitu PK1, PK2, PK3 dan PK4. Arah panah antara indikator dengan konstruk laten yang menuju indikator menunjukkan bahwa penelitian menggunakan indikator reflektif yang relatif sesuai untuk mengukur penguatan ketahanan pangan bagi rumah tangga di Kawasan Bosowasi. Hubungan yang diteliti dilambangkan dengan anak panah antara konstruk

Diagram Jalur tersebut di atas dapat dikonversi ke dalam persamaan struktural. Persamaan strukturalnya dapat dinyatakan seperti di bawah ini:

3.1.1. Outer Model

Persamaan struktural untuk indikator variabel eksogen 1 (Realitas Sosial Keagamaan) dapat dinyatakan seperti di bawah ini:

$$\chi_{RS1} = \lambda_1 \xi_1 + \delta_1$$

$$\chi_{RS2} = \lambda_2 \xi_2 + \delta_2$$

$$\chi_{RS3} = \lambda_2 \xi_3 + \delta_3$$

$$\chi_{RS4} = \lambda_2 \xi_4 + \delta_4$$

Persamaan struktural untuk indikator variabel eksogen 2 (Intervening: Norma Subjektif) dapat dinyatakan seperti di bawah ini:

$$\chi_{NS1} = \lambda_1 \xi_1 + \delta_1$$

$$\chi_{NS2} = \lambda_2 \xi_2 + \delta_2$$

$$\chi_{NS3} = \lambda_2 \xi_3 + \delta_3$$

$$\chi_{NS4} = \lambda_2 \xi_4 + \delta_4$$

$$\chi_{NS5} = \lambda_2 \xi_5 + \delta_5$$

$$\chi_{NS6} = \lambda_2 \xi_6 + \delta_6$$

Persamaan struktural untuk indikator variabel endogen (Penguatan Ketahanan Pangan) dapat dinyatakan seperti di bawah ini:

$$\gamma_{PK1} = \lambda_1 \eta_1 + \varepsilon_1$$

$$\gamma_{PK2} = \lambda_2 \eta_2 + \varepsilon_2$$

$$\gamma_{PK3} = \lambda_3 \eta_3 + \varepsilon_3$$

$$\gamma_{PK4} = \lambda_4 \eta_4 + \varepsilon_4$$

Keterangan:

- x_{RS1-4} : indikator variabel laten eksogen RS1-4 dari ξ (Realitas Sosial Keagamaan)
- x_{NS1-6} : indikator variabel laten eksogen (intervening) NS1-6 dari ξ (Norma Subjektif)
- y_{KH1-4} : indikator variabel laten endogen PK1-4 dari η (Penguatan Ketahanan Pangan)
- ξ : variabel laten eksogen (independen/intervening)
- η : variabel laten endogen
- λ : loading factor indikator variabel laten endogen dan eksogen
- δ : galat pengukuran dari indikator x
- ε : galat pengukuran dari indikator y

3.1.2. Inner Model

Persamaan struktural untuk variabel laten (Realitas Sosial Keagamaan, Norma Subjektif, dan Penguatan Ketahanan Pangan) dapat dinyatakan seperti di bawah ini:

$$\begin{aligned}\eta_{PK} &= \beta\eta_{PK} + \gamma_{1NS}\xi_{1NS} + \zeta \\ \eta_{NS} &= \beta\eta_{NS} + \gamma_{2RS}\xi_{2RS} + \zeta \\ \eta_{PK} &= \beta\eta_{PK} + \gamma_{3RS}\xi_{3RS} + \zeta \\ \eta_{PK} &= \beta\eta_{PK} + \gamma_{4NS}\xi_{4NS} + \gamma_{5RS}\xi_{5RS} + \zeta\end{aligned}$$

Keterangan:

- η_{NS} : variabel laten endogen (Intervening: Norma Subjektif)
- η_{PK} : variabel laten endogen (Penguatan Ketahanan Pangan)
- $\beta\eta_{NS}$: matriks koefisien untuk variabel laten endogen (Intervening: Norma Subjektif)
- $\beta\eta_{PK}$: matriks koefisien untuk variabel laten endogen (Penguatan Ketahanan Pangan)
- γ_{1NS} : matriks koefisien untuk variabel laten eksogen (Norma Subjektif) 1
- γ_{2RS} : matriks koefisien untuk variabel laten eksogen (Realitas Sosial Keagamaan) 2
- γ_{3RS} : matriks koefisien untuk variabel laten eksogen (Realitas Sosial Keagamaan) 3
- γ_{4NS} : matriks koefisien untuk variabel laten eksogen (Intervening: Norma Subjektif) 4
- γ_{5RS} : matriks koefisien untuk variabel laten eksogen (Realitas Sosial Keagamaan) 5
- ξ_{1NS} : variabel laten eksogen (Norma Subjektif) 1
- ξ_{2RS} : variabel laten eksogen (Realitas Sosial Keagamaan) 2
- ξ_{3RS} : variabel laten eksogen (Realitas Sosial Keagamaan) 3
- ξ_{4NS} : variabel laten eksogen (Intervening: Norma Subjektif) 4
- ξ_{5RS} : variabel laten eksogen (Realitas Sosial Keagamaan) 5
- ζ : galat struktural

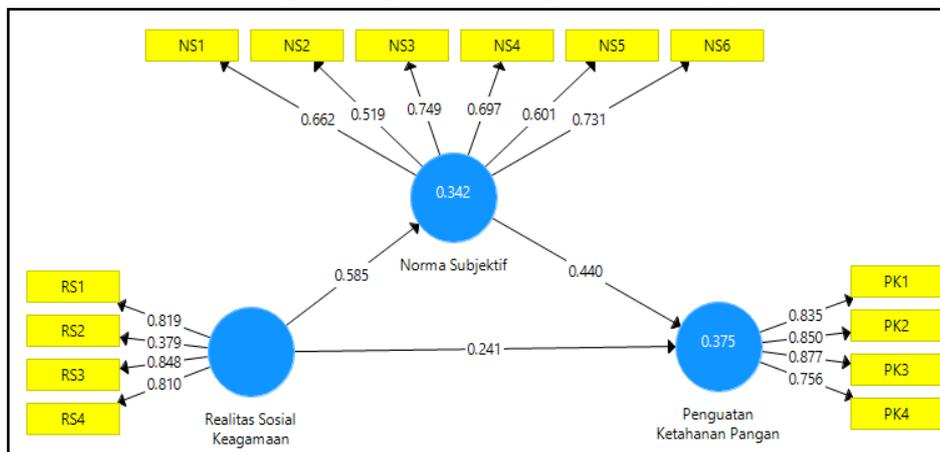
3.2. Pengujian Model

3.2.1. Pengujian *Outer Model*

Outer Model (Model Pengukuran) menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya atau dapat dikatakan bahwa outer model mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel

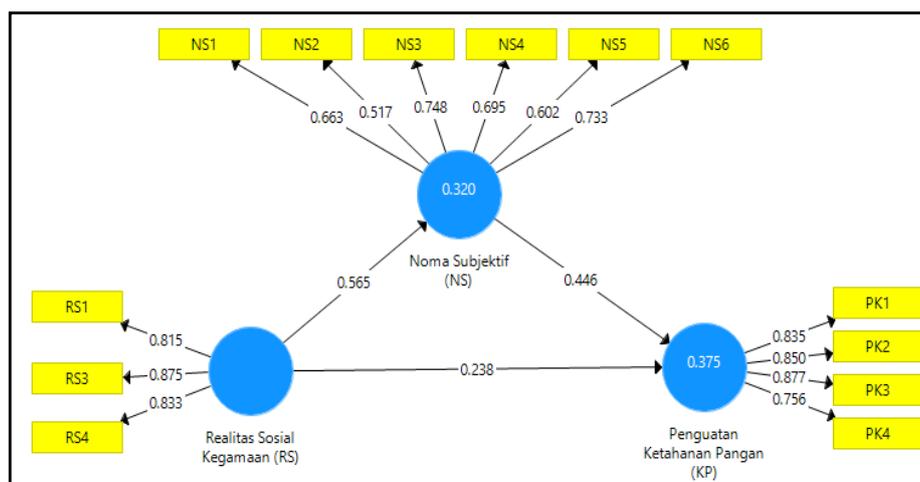
latennya. Pada penelitian ini, pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan pada masing-masing variabel laten, yaitu: Variabel Realitas Sosial Keagamaan (RS), Norma Subjektif (NS), dan Penguatan Ketahanan Pangan (PK) dengan menggunakan bantuan software *Smart-PLS*. Ukuran refleksif individual dikatakan valid jika memiliki nilai *loading* (λ) dengan variabel laten yang ingin diukur > 0.5 . Jika salah satu indikator memiliki nilai *loading* (λ) < 0.5 maka indikator tersebut harus dibuang (didrop) karena akan mengindikasikan bahwa indikator tersebut tidak cukup baik untuk mengukur variabel laten secara tepat.

Gambar 4.2
Output Diagram Jalur Uji Validitas (1)



Sumber: Data Primer (Angket) Diolah, 2020

Gambar 4.3
Output Diagram Jalur Uji Validitas (2)



Sumber: Data Primer (Angket) Diolah, 2020

Output diagram jalur persamaan struktural pada PLS dengan menggunakan software *Smart-PLS* untuk uji validitas pada masing-masing variabel laten disajikan dalam bentuk gambar seperti yang disajikan pada gambar 4.2 (lihat gambar 4.2). Pada gambar 4.2 ditunjukkan bahwa terdapat satu indikator variabel dengan nilai *loading* (λ) < 0,5, yaitu pada variabel indikator RS2 (0,379). Indikator tersebut harus dibuang (didrop). Setelah indikator RS2 dikeluarkan dari model, selanjutnya dilakukan pengujian ulang. Output diagram jalur persamaan struktural pada PLS dengan menggunakan software *Smart-PLS* untuk pengujian yang kedua, juga disajikan dalam bentuk gambar seperti yang disajikan pada gambar 4.3 (lihat gambar 4.3). Output Diagram Jalur Uji Validitas untuk pengujian yang kedua seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.3, disimpulkan dalam bentuk tabel seperti yang disajikan pada tabel 4.1 (lihat tabel 4.1).

Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas

Hubungan Konstruk dengan Indikator		Loading (λ)	Standart Error	T-Statistik	P-Values
Realitas Sosial Keagamaan (RS)	RS1	0.815	0.022	36.963	0.000
	RS3	0.875	0.014	61.637	0.000
	RS4	0.833	0.022	38.691	0.000
Norma Subjektif (NS)	NS1	0.663	0.038	17.652	0.000
	NS2	0.517	0.055	9.445	0.000
	NS3	0.748	0.028	26.944	0.000
	NS4	0.695	0.040	17.540	0.000
	NS5	0.602	0.044	13.695	0.000
	NS6	0.733	0.028	26.369	0.000
Penguatan Ketahanan Pangan (PK)	PK1	0.835	0.020	42.763	0.000
	PK2	0.850	0.019	44.882	0.000
	PK3	0.877	0.014	62.062	0.000
	PK4	0.756	0.031	24.782	0.000

Sumber: Data Primer (Angket) Diolah, 2020

Pada tabel 4.1 (lihat tabel 4.1) dapat disimpulkan bahwa nilai *loading* dari hubungan indikator RS1, RS3 dan RS4 dengan konstruk Realitas Sosial Keagamaan (RS), hubungan indikator NS1, NS2, NS3, NS4, NS5 dan NS6 dengan konstruk Norma Subjektif (NS), hubungan indikator PK1, PK2, PK3 dan

PK4 dengan konstruk Penguatan Ketahanan Pangan (PK), masing-masing memiliki nilai *loading* (λ) > 0.5 dan memiliki nilai T-Statistik > 1.64 pada taraf signifikansi $\alpha < 0.05$.

Dengan demikian indikator RS1, RS3 dan RS4 dapat dikatakan valid untuk mengukur konstruk Realitas Sosial Keagamaan (RS), indikator NS1, NS2, NS3, NS4, NS5 dan NS6 juga dapat dikatakan valid untuk mengukur konstruk Norma Subjektif (NS). Demikian pula, indikator PK1, PK2, PK3 dan PK4 dapat dikatakan valid untuk mengukur Penguatan Ketahanan Pangan (PK). Sedangkan model yang dapat ditulis untuk semua indikator tersebut, yaitu:

$$\begin{aligned} \text{RS1} &= 0.815 \text{ Realitas Sosial Keagamaan} + 0.022 \\ \text{RS2} &= 0.875 \text{ Realitas Sosial Keagamaan} + 0.014 \\ \text{RS3} &= 0.833 \text{ Realitas Sosial Keagamaan} + 0.022 \\ \text{NS1} &= 0.663 \text{ Norma Subjektif} + 0.038 \\ \text{NS2} &= 0.517 \text{ Norma Subjektif} + 0.055 \\ \text{NS3} &= 0.748 \text{ Norma Subjektif} + 0.028 \\ \text{NS4} &= 0.695 \text{ Norma Subjektif} + 0.040 \\ \text{NS5} &= 0.602 \text{ Norma Subjektif} + 0.044 \\ \text{NS6} &= 0.733 \text{ Norma Subjektif} + 0.028 \\ \text{PK1} &= 0.835 \text{ Penguatan Ketahanan Pangan} + 0.020 \\ \text{PK2} &= 0.850 \text{ Penguatan Ketahanan Pangan} + 0.019 \\ \text{PK3} &= 0.877 \text{ Penguatan Ketahanan Pangan} + 0.014 \\ \text{PK4} &= 0.756 \text{ Penguatan Ketahanan Pangan} + 0.031 \end{aligned}$$

Tabel 4.2

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	AVE	Nilai Composite Reliability	Nilai Cronbach's Alpha
Realitas Sosial Keagamaan (RS)	0.708	0.879	0.793
Norma Subjektif (NS)	0.641	0.824	0.745
Penguatan Ketahanan Pangan (PK)	0.690	0.899	0.849

Sumber: Data Primer (Angket) Diolah, 2020

Sedangkan untuk uji reliabilitas dalam penelitian ini, variabel Realitas Sosial Keagamaan (RS), Norma Subjektif (NS) dan Penguatan Ketahanan Pangan (PK) dikatakan reliabel jika nilai AVE variabel-variabel tersebut lebih besar dari 0.5, nilai *Composite Reliability*-nya lebih besar dari 0.7, dan Nilai Cronbach's Alpha-nya lebih besar dari 0.6. Hasil pengujian reliabilitas pada ketiga variabel laten tersebut dengan bantuan software *Smart-PLS* dapat disajikan dalam bentuk tabel seperti yang disajikan pada tabel 4.2 (lihat tabel 4.2)

Pada tabel 4.2 (lihat tabel 4.2), dapat disimpulkan bahwa untuk variabel laten eksogen Realitas Sosial Keagamaan (independen) dan Norma Subjektif (intervening) memiliki nilai AVE (*Average Variance Extracted*) lebih besar dari 0.5, memiliki nilai *Composite Reliability* lebih besar dari 0.7, dan memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0.6. Demikian pula variabel laten endogen Penguatan Ketahanan Pangan memiliki nilai AVE lebih besar dari 0.5, nilai *Composite Reliability*-nya lebih besar dari 0.7, dan nilai *Cronbach's Alpha*-nya lebih besar dari 0.6. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa semua konstruk pada model yang digunakan memenuhi kriteria *discriminant validity* dan juga dapat dinyatakan reliabel.

3.2.2. Pengujian *Inner Model*

Pengujian pada *Inner Model* (Model Struktural) dilakukan untuk menguji hubungan antara konstruk laten. Hasil pengujian pada *Inner Model* dapat dilihat nilai R^2 pada variabel endogen dan nilai koefisien parameter jalur (*path coefficient parameter*). Hasil pengujian pada *Inner Model* dengan bantuan software *Smart-PLS* dapat disajikan seperti di bawah ini:

3.2.2.1. Nilai *R-Square*

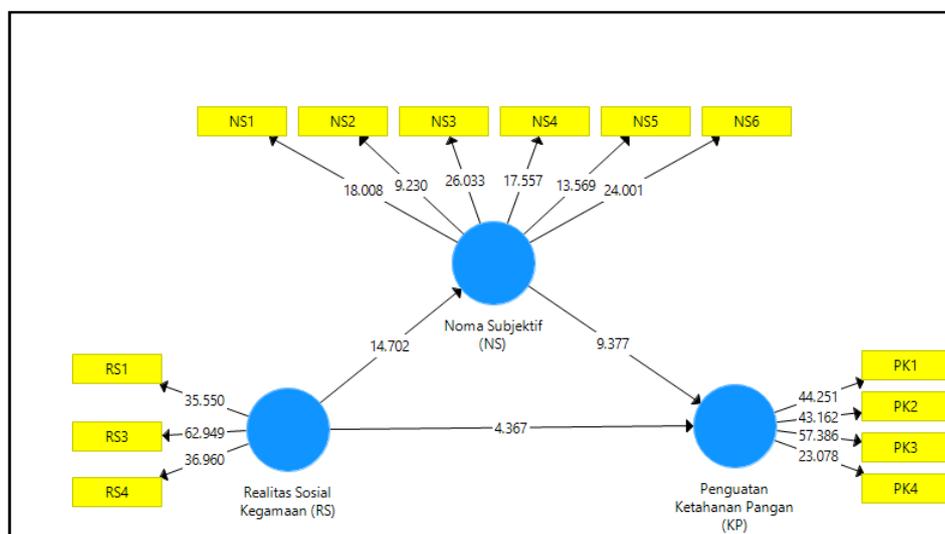
Nilai R^2 yang diperoleh dari hasil pengujian pada *Inner Model* dengan bantuan software *Smart-PLS* untuk variabel endogen Norma Subjektif sebesar 0.342 (34%), yang artinya nilai tersebut mengindikasikan bahwa variasi Norma Subjektif dapat dijelaskan oleh variabel Realitas Sosial Keagamaan hanya sebesar 34% sedangkan sisanya sebesar 66% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian ini, dengan kata lain Besarnya pengaruh Realitas

Sosial Kegamaan terhadap Norma Subjektif adalah sebesar 0,342 (34%). Sedangkan untuk variabel endogen Penguatan Ketahanan Pangan adalah sebesar 0.375 (37%), yang artinya nilai tersebut mengindikasikan bahwa variasi Penguatan Ketahanan Pangan di Kawasan Bosowasi dapat dijelaskan oleh variabel Realitas Sosial Kegamaan dengan mediasi Norma Subjektif hanya sebesar 37%, sedangkan sisanya sebesar 63% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian ini, dengan kata lain bahwa besarnya pengaruh Realitas Sosial Kegamaan dan Norma Subjektif terhadap Penguatan Ketahanan Pangan adalah sebesar 0,375 (37%). Artinya, hanya sebesar 37% Realitas Sosial Kegamaan mampu menjelaskan penguatan ketahanan pangan di Kawasan Bosowasi dengan mediasi Norma Subjektif, sedangkan 63% dijelaskan oleh variable lain.

3.2.2.2. Nilai Koefisien Parameter Jalur

Hasil pengujian *Inner Model* (Output) disajikan dalam bentuk diagram jalur seperti yang disajikan pada gambar 4.4 (lihat gambar 4.4). Lalu Output Diagram Jalur untuk pengujian *Inner Model* seperti yang disajikan pada gambar 4.4 tersebut, disimpulkan dalam bentuk tabel seperti yang disajikan pada tabel 4.3 (lihat tabel 4.3).

Gambar 4.4
Hasil Pengujian Inner Model



Sumber: Data Primer (Angket) Diolah, 2020

Tabel 4.3
Hasil Pengujian Inner Model

No	Hubungan Kausalitas	Koefisien Parameter	Standart Error	T-Statistik	P-Values
Pengaruh Langsung					
1	Norma Subjektif (NS) -> Penguatan Ketahanan Pangan (PK)	0.446	0.045	9.984	0.000
2	Realitas Sosial Keagamaan (RS) -> Norma Subjektif (NS)	0.565	0.039	14.395	0.000
3	Realitas Sosial Keagamaan (RS) -> Penguatan Ketahanan Pangan (PK)	0.238	0.054	4.402	0.000
Pengaruh Tidak Langsung					
4	Realitas Sosial Keagamaan (RS) -> Norma Subjektif (NS) -> Penguatan Ketahanan Pangan (PK)	0.252	0.031	8.058	0.000

Sumber: Data Primer (Angket) Diolah, 2020

Pengaruh (langsung dan tidak langsung) variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen seperti yang disajikan pada tabel 4.3 (lihat tabel 4.3) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Koefisien parameter jalur yang diperoleh dari hubungan antara variabel Norma Subjektif dengan Penguatan Ketahanan Pangan sebesar 0.446 dengan nilai T-statistik 9.984 (> 1.96) pada taraf signifikansi $\alpha = 0.05$ (P-Values = 0.000) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Norma Subjektif dengan Penguatan Ketahanan Pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi. Nilai positif pada koefisien parameter menunjukkan bahwa jika teman, keluarga, tetangga, ulama, tokoh masyarakat mendorong dan pemerintah daerah memerintahkan rumah tangga di Kawasan Bosowasi untuk menguatkan ketahanan pangannya, maka ketersediaan pangan, akses pangan,

pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan bagi mereka akan menjadi semakin baik, demikian pula sebaliknya.

- Koefisien parameter jalur yang diperoleh dari hubungan antara variabel Realitas Sosial Kegamaan dengan Norma Subjektif sebesar 0.565 dengan nilai T-statistik 14.395 (> 1.96) pada taraf signifikansi $\alpha = 0.05$ (P-Values = 0.000) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kondisi Realitas Sosial Kegamaan dengan Norma Subjektif. Nilai positif pada koefisien parameternya menunjukkan bahwa jika prinsip Sipakatau, Sipakainge, Sipatokkong dijadikan sebagai pegangan, maka teman, keluarga, tetangga, ulama, tokoh masyarakat, dan pemerintah akan menjadi semakin termotivasi dan bersungguh-sungguh dalam mendorong dan memerintahkan rumah tangga di Kawasan Bosowasi untuk menguatkan ketahanan pangannya, demikian pula sebaliknya.
- Koefisien parameter jalur yang diperoleh dari hubungan antara variabel Realitas Sosial Keagamaan dengan Penguatan Ketahanan Pangan sebesar 0.238 dengan nilai T-statistik 4.402 (> 1.96) pada taraf signifikansi $\alpha = 0.05$ (P-Values = 0.000) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Realitas Sosial Keagamaan dengan Penguatan Ketahanan Pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi. Nilai positif pada koefisien parameternya menunjukkan bahwa jika prinsip Sipakatau, Sipakainge, Sipatokkong dijadikan sebagai pegangan oleh rumah tangga di Kawasan Bosowasi, maka ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan mereka akan semakin baik dan juga semakin terjamin, demikian pula sebaliknya.
- Koefisien parameter jalur yang diperoleh dari hubungan antara variabel Realitas Sosial Keagamaan dengan Penguatan Ketahanan Pangan melalui mediasi Norma Subjektif sebesar 0.252 dengan nilai T-statistik 8.058 (> 1.96) pada taraf signifikansi $\alpha = 0.05$ (P-Values = 0.000) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Realitas Sosial Keagamaan dengan Penguatan Ketahanan Pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi melalui mediasi Norma Subjektif. Nilai positif pada koefisien parameternya

menunjukkan bahwa jika prinsip Sipakatau, Sipakainge, Sipatokkong digunakan sebagai pegangan oleh teman, keluarga, tetangga, ulama, tokoh masyarakat dalam mendorong dan pemerintah daerah dalam memerintahkan rumah tangga di Kawasan Bosowasi untuk menguatkan ketahanan pangannya, maka ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan bagi mereka akan menjadi semakin baik dan juga semakin terjamin, demikian pula sebaliknya.

Selanjutnya koefisien-koefisien parameter jalur seperti yang disajikan pada tabel 4.3 (lihat tabel 4.3), dapat ditulis model persamaan strukturalnya sebagai berikut:

- Penguatan Ketahanan Pangan = 0.446 Norma Subjektif + 0.045
- Penguatan Ketahanan Pangan = 0.238 Realitas Sosial Keagamaan + 0.054
- Norma Subjektif = 0.565 Realitas Sosial Keagamaan + 0.039
- Penguatan Ketahanan Pangan = 0.446 Norma Subjektif + 0.238 Realitas Sosial Keagamaan + 0.031.

4. Perumusan Model Penguatan Secara Sosial Keagamaan

Hasil pengujian *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan metode *Partial Least Square* (PLS) sebagaimana yang diuraikan di atas, menunjukkan bahwa realitas sosial keagamaan berpengaruh secara signifikan terhadap penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, prinsip Sipakatau, Sipakainge, Sipatokkong dapat dijadikan sebagai pegangan dalam menguatkan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi secara kolektif dan individu. Secara kolektif, yakni rumah tangga bersama-sama dengan pihak lain dalam menguatkan ketahanan pangannya, sedangkan secara individu, yakni rumah tangga dapat menguatkan ketahanan pangannya secara mandiri karena kondisinya sudah berada pada level kemandirian pangan. Namun demikian, secara kolektif peran norma subjektif sangat penting dalam menjadikan realitas sosial keagamaan sebagai prinsip utama dalam membantu rumah tangga di Kawasan Bosowasi untuk menguatkan ketahanan pangannya.

Konstruk realitas sosial keagamaan terdiri dari (1) Tidak saling membeda-bedakan (Sipakatau'), (2) Saling mengingatkan (Sipakainge) dan (3) Saling bekerjasama (Sipatokokkong). Ketiga hal ini tidak akan berjalan maksimal tanpa mediasi dari norma subjektif. Norma subjektif, yang dimaksud di sini, adalah pengaruh teman, keluarga, tetangga, ulama, tokoh masyarakat dan perintah pemerintah daerah dalam membantu untuk menguatkan ketahanan rumah tangga di Kawasan Bosowasi. Karena peran norma subjektif di tengah-tengah masyarakat, maka rumah tangga di Kawasan Bosowasi dapat melakukan penguatan ketahanan pangan secara kolektif untuk keberlangsungan rumah tangganya, namun demikian rumah tangga dapat juga melakukannya secara individu. Artinya, ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan bagi mereka akan menjadi semakin baik dan juga semakin terjamin baik dilakukan secara kolektif maupun secara individu. Jika demikian adanya, maka ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi dapat dikuatkan dengan tiga prinsip utama, yaitu: Sipakatau, Sipakainge, dan Sipatokkong baik secara kolektif maupun secara individu.

Penjelasan tersebut di atas, dapat dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan model penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi secara sosial keagamaan. Oleh karena realitas sosial keagamaan berpengaruh secara signifikan terhadap penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi baik secara langsung maupun tidak langsung, maka ada model penguatan yang dapat dirumuskan, yaitu model penguatan secara kolektif dan model penguatan secara individu. Kedua model penguatan tersebut, dapat disajikan dalam bentuk gambar seperti yang disajikan pada gambar 4.5 dan 4.6 (lihat gambar 4.5 dan 4.6).

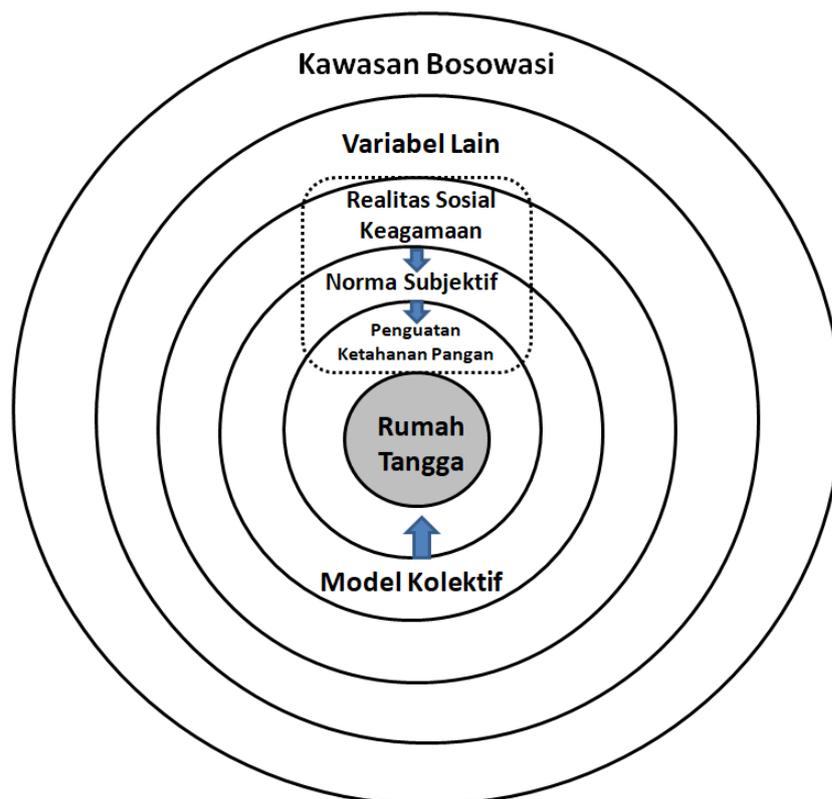
Pada gambar 4.5 ditunjukkan bahwa model penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi dapat dilakukan dengan mediasi norma subjektif. Hal mensiratkan bahwa ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi akan menjadi semakin baik dan juga semakin terjamin jika dikuatkan dengan realitas sosial keagamaan melalui mediasi norma subjektif. Atas dasar ini dapat dinyatakan bahwa jika teman, keluarga, tetangga, ulama, tokoh masyarakat

dan pemerintah daerah menjadikan prinsip Sipakatau, Sipakainge, Sipatokkong dalam membantu rumah tangga untuk mengelolah pangannya, maka ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangannya akan menjadi semakin baik dan juga semakin terjamin. Akan tetapi perlu disadari bahwa model penguatan ketahanan pangan seperti yang digambarkan tersebut di atas bukanlah segala-segalanya melainkan hanya sekitar 37% kontribusi sosial keagamaan dalam menguatkan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi. Sedangkan 63% merupakan kontribusi dari faktor lain. Meskipun demikian adanya, penguatan ketahanan pangan bagi rumah tangga akan mudah dilakukan jika prinsip Sipakatau, Sipakainge, Sipatokkong bisa dijadikan pegangan oleh teman, keluarga, tetangga, ulama, tokoh masyarakat dan juga oleh pemerintah daerah dalam membantu rumah tangga di Kawasan Bosowasi untuk mengelolah pangannya jika kondisinya belum berada pada level kemandirian pangan. Jika demikian adanya maka model penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi melalui mediasi norma subjektif dapat ditetapkan sebagai rumusan model penguatan ketahanan pangan secara kolektif bagi rumah tangga di Kawasan Bosowasi.

Sedangkan pada Gambar 4.6 (lihat gambar 4.6) ditunjukkan bahwa model penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi dapat dilakukan secara mandiri tanpa mediasi norma subjektif. Hal ini mensiratkan bahwa jika kondisi pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi sudah berada pada level kemandirian pangan, yakni sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai dalam mengelolah pangannya sendiri, dimana realitas sosial keagamaan dijadikan sebagai prinsip utama dalam mengelola pangannya, maka kondisi pangannya akan menjadi semakin baik dan juga menjadi semakin terjamin meskipun dilakukannya secara mandiri tanpa mediasi norma subjektif. Atas dasar ini, maka dapat dinyatakan bahwa jika rumah tangga di Kawasan Bosowasi menjadikan prinsip Sipakatau, Sipakainge, Sipatokkong dalam mengelola pangannya sendiri, maka ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangannya akan menjadi semakin baik dan juga semakin terjamin. Akan tetapi perlu disadari bahwa model penguatan ketahanan pangan seperti yang

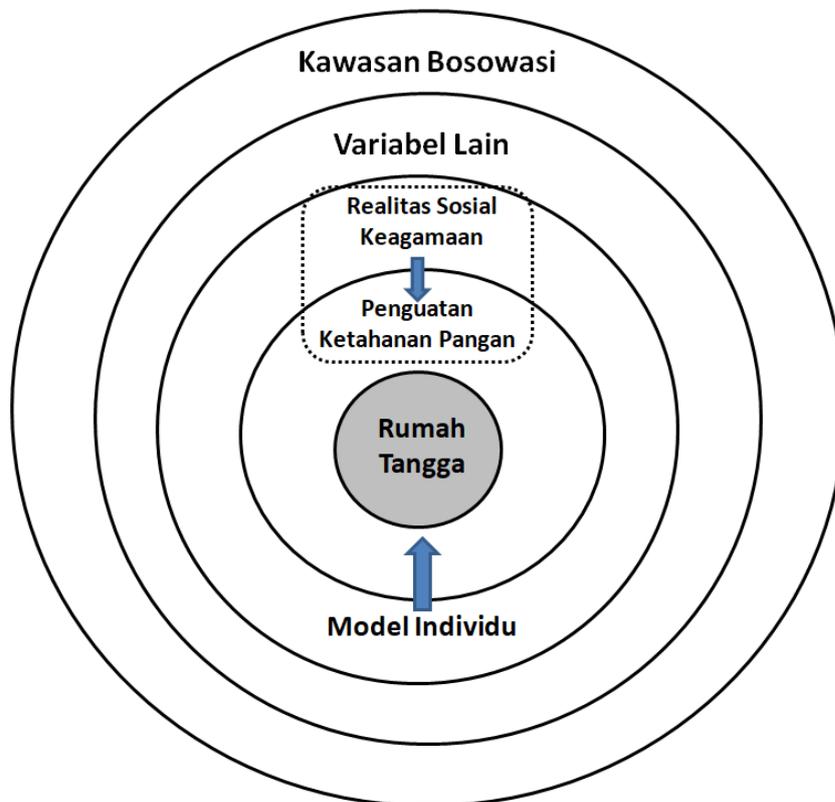
digambarkan tersebut di atas bukanlah segala-segalanya melainkan hanya sekitar 37% kontribusi sosial keagamaan dalam menguatkan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi. Sedangkan 63% merupakan kontribusi dari faktor lain. Meskipun demikian adanya bahwa prinsip Sipakatau, Sipakainge, Sipatokkong bisa dijadikan pegangan oleh rumah tangga di Kawasan Bosowasi dalam mengelolah pangannya sendiri jika kondisinya sudah berada pada level kemandirian pangan. Jika demikian adanya maka model penguatan ketahanan pangan bagi rumah tangga di Kawasan Bosowasi tanpa mediasi dapat ditetapkan sebagai rumusan model penguatan ketahanan pangan secara individu bagi rumah tangga di Kawasan Bosowasi.

Gambar 4.5
Model Penguatan Kolektif



Sumber: Hasil Penelitian Diolah, 2020

Gambar 4.6
Model Penguatan Individu



Sumber: Hasil Penelitian Diolah, 2020

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini mengasumsikan bahwa: (1) Realitas kehidupan sosial keagamaan masyarakat di daerah dapat dijadikan sebagai dasar penguatan ketahanan pangan rumah tangga, (2) Penguatan ketahanan pangan rumah tangga yang berorientasi kepada realitas kehidupan sosial keagamaan di daerah akan lebih mudah dilakukan, dan (3) Penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi akan lebih mudah dikembangkan jika dilakukan secara sosial keagamaan baik melalui mediasi norma subjektif maupun tanpa mediasinya. Dalam merespon tiga asumsi penelitian ini digunakan hasil penelitian sebagaimana yang dikemukakan di atas. Sedangkan dalam memaknai hasil penelitian tersebut digunakan teori struktur sosial, kontruksi sosial, perubahan sosial dan konsep falah dalam Islam. Penjabaran keempat teori tersebut dalam

memaknai hasil penelitian seperti yang dikemukakan di atas, dapat disajikan secara tematik seperti di bawah ini:

1. Rumah Tangga di Kawasan Bosowasi

Rumah tangga terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang. Rumah tangga di sini hanya terbatas pada keluarga tertentu di Kawasan Bosowasi yang dijadikan sebagai unit analisis penelitian dalam penelitian ini. Jika dipandang dari aspek struktur sosial, sesungguhnya keluarga itu merupakan salah satu jenis lembaga sosial, yakni lembaga sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang memiliki peran dan fungsi tersendiri.

Sebagai lembaga sosial, keluarga di Kawasan Bosowasi telah melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadian dalam masyarakat. Anak-anak mereka berkembang, melihat dan mengenal arti diri sendiri, kemudian dikenal sebagai individu. Keluarga di Kawasan Bosowasi telah berperan membina dan membimbing anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya di mana mereka berada. Semua anggotanya dapat beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggal, sehingga kehidupan masyarakat di kawasan tersebut tercipta menjadi kehidupan yang tenang, aman dan tenteram. Jika demikian adanya, sadar atau tidak sadar dapat dinyatakan bahwa sesungguhnya setiap anggota keluarga pasti memiliki peran dan fungsi yang berkaitan dengan proses regenerasi bagi anak-anaknya. Dalam konteks ketahanan pangan rumah tangga, hal tersebut mensiratkan bahwa ketahanan pangan rumah tangga perlu dijaga untuk proses regenerasi tersebut.

Dipandang dari aspek struktur sosial, sesungguhnya suatu lembaga sosial harus memiliki fungsi yang pasti dan jelas (Koentjaraningrat, 1988). Demikian pula keluarga di Kawasan Bosowasi yang dijadikan sebagai unit analisis penelitian. Diantara fungsi keluarga tersebut yang dapat diungkapkan di sini, yaitu:

1.1. Fungsi reproduksi

Masyarakat di Kawasan Bosowasi memandang bahwa anak-anak adalah wujud cinta kasih dan tanggung jawab suami istri meneruskan keturunannya. Dalam konteks ketahanan pangan rumah tangga, suami istri bertanggungjawab dalam menjamin pangannya untuk keberlangsungan keturunannya.

1.2. Fungsi proteksi

Masyarakat di Kawasan Bosowasi memandang bahwa keluarga memberikan harus mampu memberikan perlindungan kepada anggotanya, berupa perlindungan fisik dan kejiwaan. Dalam konteks ketahanan pangan rumah tangga, keluarga harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya untuk keberlangsungan hidup penghuninya.

1.3. Fungsi ekonomi

Masyarakat di Kawasan Bosowasi memandang bahwa ayah adalah kepala keluarga dan tulang punggung keluarga. Ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi istri dan anak-anaknya, Dalam konteks ketahanan pangan rumah tangga, ayah berkewajiban untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan keluarganya dengan baik.

1.4. Fungsi sosialisasi

Masyarakat di Kawasan Bosowasi memandang bahwa keluarga berperan membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Keluarga adalah sosialisasi pertama bagi anak. Di dalam lingkungan keluarga, anak dilatih dan diperkenalkan cara-cara hidup bersama orang lain. Anak diajak memahami lingkungan lebih luas sehingga nanti benar-benar siap hidup dalam masyarakat. Orang tua memperkenalkan anak tentang norma yang berlaku di masyarakat seperti norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam rangka sosialisasi ini, anak diajarkan menjalankan kehidupan sesuai nilai dan norma di masyarakat. Dalam konteks ketahanan pangan rumah tangga, anak harus diajarkan norma dan nilai-nilai sosial untuk dijadikan sebagai prinsip utama dalam mewujudkan kemandirian ketahanan pangan dalam keluarga.

1.5. Fungsi afeksi

Masyarakat di Kawasan Bosowasi memandang bahwa keluarga harus mampu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya tanpa membeda-bedakan. Karena itu, keluarga diharapkan memberikan kehangatan perasaan kepada anggota keluarga. Dalam konteks ketahanan pangan rumah tangga, keluarga diharapkan mampu menjaga ketahanan pangannya sebagai salah satu sarana dalam memberikan kehangatan perasaan kepada anggota keluarganya.

1.6. Fungsi pengawasan sosial

Masyarakat di Kawasan Bosowasi memandang bahwa pada dasarnya setiap anggota keluarga saling mengawasi karena memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh anggota keluarga yang lebih tua. Dalam konteks ketahanan pangan rumah tangga, anggota keluarga yang lebih tua yang bertanggung jawab dalam menyediakan kebutuhan pangan bagi anggotanya.

1.7. Fungsi pemberian status

Masyarakat di Kawasan Bosowasi memandang bahwa seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan baru di masyarakat melalui perkawinan, sebagai suami atau istri. Ia akan diperlakukan sebagai orang dewasa dan dianggap mampu bertanggungjawab pada diri sendiri, keluarga, anak-anak dan masyarakat. Fungsi status suami adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga, pencari nafkah. Istri berfungsi sebagai pendamping suami dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Keluarga memberikan status pada anak, bukan hanya status yang diperoleh seperti status terkait jenis kelamin, urutan kelahiran dan hubungan kekerabatan, tetapi termasuk status yang diperoleh orang tua, yaitu status dalam kelas sosial tertentu. Dalam konteks ketahanan pangan rumah tangga, pangan keluarga yang terjamin dengan baik dapat menguatkan bahkan meningkatkan status kelas sosialnya dalam masyarakat.

Selain menggunakan aspek struktur sosial dalam memaknai peran dan fungsi rumah tangga di Kawasan Bosowasi dalam menguatkan ketahanan pangannya, dapat juga digunakan aspek perubahan sosial dalam memaknainya. Dalam konteks perubahan sosial, masyarakat di Kawasan Bosowasi memandang

bahwa keluarga sebagai agen sosialisasi pertama dan terdekat harus bisa memberikan nilai-nilai sesuai harapan masyarakat kepada anak-anak. Peter Ludwig Berger menjelaskan bahwa sosialisasi adalah proses seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Keluarga juga berperan sebagai benteng atau penyaring nilai-nilai di masyarakat kepada anak-anaknya, karena tidak semua nilai-nilai dalam masyarakat itu baik. Dalam proses sosialisasi kepada anak, kegiatan dalam keluarga dan peran tiap anggota keluarga pada dewasa ini, telah bergeser jika dibandingkan pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, hubungan antara anak dan orang tua dalam rumah tangga di Kawasan Bosowasi lebih terlihat jelas. Karena usia dan peran yang sangat berbeda, anak harus hormat kepada orang tua. Anak harus membantu pekerjaan rumah tangga orang tua. Keluarga di Kawasan Bosowasi pada zaman dahulu, anak usia dengan 10-15 tahun sudah diberikan tanggung jawab besar untuk membantu orang tuanya. Sekarang pada usia tersebut, anak dituntut mandiri dengan cara lain. Misalnya mandiri dalam kegiatan sekolah dan menyelesaikan masalah pribadi. Peran ibu dan ayah dalam keluarga sekarang tidak sama dengan dahulu. Perubahan ini dilihat dari perubahan sosial, sekarang perubahan itu terjadi pada peran ayah dan ibu. Dulu ibu bekerja di dapur, sekarang ibu juga bisa bekerja. Ibu lebih bebas bekerja di luar seperti ayah, dan ayah bergantian mengurus keperluan rumah tangga seperti ibu. Bagi beberapa keluarga di Kawasan Bosowasi, hal tersebut dapat memberikan interaksi lebih positif dan berdampak kepada ketahanan pangan keluarga yang lebih kuat dan lebih terjamin.

2. Penguatan Ketahanan Pangan

Dalam memaknai penguatan ketahanan pangan yang dilakukan rumah tangga di Kawasan Bosowasi digunakan teori konstruksi sosial yang digagas oleh Berger dan Luckmann (1966). Berger dan Luckmann berpandangan bahwa kenyataan itu dibangun secara sosial, dalam pengertian individu-individu dalam masyarakat yang telah membangun masyarakat, maka pengalaman individu itu tidak dapat terpisahkan dengan masyarakat. Manusia sebagai pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui tiga momen dialektis secara simultan, yaitu:

Eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Pemaknaanya dapat disajikan seperti di bawah ini:

2.1. Eksternalisasi

Eksternalisasi merupakan usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Proses ini merupakan bentuk ekspresi diri untuk menguatkan eksistensi individu dalam masyarakat. Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai produk manusia. Dalam konteks penguatan ketahanan pangan, rumah tangga di Kawasan Bosowasi berusaha untuk mencurahkan dirinya melalui prinsip Sipakatau', Sipakainge, dan Sipatokokkong ke dalam dunia untuk memenuhi kebutuhan pangannya baik dilakukan secara individu maupun secara kolektif dalam rangka untuk menguatkan eksistensi keluarga dalam masyarakat. Jika demikian adanya, maka dapat dinyatakan bahwa penguatan ketahanan pangan rumah tangga merupakan produk rumah tangga itu sendiri, namun demikian untuk mewujudkannya ke dalam dunia riil dapat dilakukan secara mandiri jika kondisi pangannya sudah berada pada level kemandirian pangan dan juga dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak lain jika kondisinya belum berada pada level kemandirian pangan. Hal ini mensiratkan bahwa ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan yang baik bagi rumah tangga pada dasarnya diciptakan oleh rumah tangga itu sendiri, sedangkan pihak luar hanya bisa memberikan dukungan baik secara fisik maupun secara mental dalam membantu untuk menguatkan ketahanan pangan mereka.

2.2. Objektivasi

Objektivasi merupakan hasil yang telah dicapai (baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia), berupa realitas objektif yang mungkin akan menghadapi penghasil itu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada diluar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya (hadir dalam wujud yang nyata). Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai realitas yang objektif atau proses interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Dalam konteks penguatan ketahanan, sebagian rumah

tangga di Kawasan Bosowasi telah menjadikan ketahanan pangannya sebagai sebuah institusi dalam hidupnya, yakni bagian dalam hidupnya yang harus diorganisir dengan baik, akan tetapi sebagian yang lain belum melakukannya. Bagi rumah tangga yang sudah melakukannya, prinsip Sipakatau', Sipakainge, dan Sipatokokkong digunakan sebagai pondasi utama dalam membangun institusi ketahanan pangan. Hal ini mensiratkan bahwa pada tahap ini, bagi rumah tangga yang memiliki institusi ketahanan pangan keluarga dapat mengorganisir ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangannya dengan baik sehingga kebutuhan pangan mereka selalu cukup bahkan lebih dari cukup terpenuhi.

2.3. Internalisasi

Internalisasi merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa, sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifikasi akan ditangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi manusia menjadi hasil dari masyarakat. Dalam konteks penguatan ketahanan pangan, bagi rumah tangga di Kawasan Bosowasi yang sudah melembagakan ketahanan pangannya, kegiatan penguatan ketahanan pangan bagi mereka telah menjadi bagi dari hidupnya. Jika demikian adanya, hal ini dapat memberikan dampak yang baik kepada kehidupan mereka dalam dunia riil, misalnya kesejahteraan ekonominya akan semakin meningkat dan lain-lain sebagainya. Hal ini mensiratkan bahwa jika prinsip Sipakatau', Sipakainge, dan Sipatokokkong dijadikan sebagai pondasi utama mengorganisir ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga.

3. Kolektif dan Individu

Dalam memaknai penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi yang dilakukan secara kolektif dan juga secara individu digunakan teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial yang digunakan adalah teori fungsionalis. Teori fungsionalis adalah teori yang menekankan perubahan

pada fungsi-fungsi lembaga sosial dalam masyarakat. Masyarakat memiliki sistem sosial yang saling berhubungan satu sama lainnya. Sistem tersebut bergerak untuk mewujudkan tujuan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Mengutip pandangan Person, Schae (2012) mengemukakan bahwa jika melihat masyarakat, maka harus dilihat dalam keadaan keseimbangan secara alami. Ia memberikan pengertian teori fungsionalis bahwa masyarakat cenderung menuju kondisi stabil atau mencapai keseimbangan. Ketika terjadi perubahan dalam salah satu unsur masyarakat, harus dilakukan penyesuaian pada unsur lain. Jika tidak, keseimbangan masyarakat akan terancam dan tekanan akan terjadi.

Menurut teori fungsionalis, lembaga sosial yang ada dalam suatu kehidupan manusia tidak akan bertahan, kecuali berguna bagi masyarakat. Meskipun demikian, lembaga sosial yang secara drastis berubah akan mengancam segala bentuk keseimbangan sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks penguatan ketahanan pangan, rumah tangga di Kawasan Bosowasi diwajibkan memiliki ketersediaan pangan dan kemampuan untuk mengaksesnya. Rumah tangga di kawasan tersebut dapat dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Oleh karena itu, ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi dapat dikatakan stabil jika kondisi pangannya sudah terpenuhi, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Akan tetapi untuk memperkuat pencapaian ketahanan pangan, rumah tangga di Kawasan Bosowasi tidak cukup hanya dengan melakukan hal tersebut, melainkan mereka harus melakukan perubahan sosial secara fungsional dalam menguatkan ketahanan pangan keluarganya, baik dilakukan secara kolektif maupun secara individu. Jika dilakukan secara kolektif, rumah tangga belum bisa secara mandiri mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan keamanan pangan bagi penghuninya karena masih membutuhkan bantuan pihak lain. Namun jika sudah dilakukan secara individu, rumah tangga diasumsikan

dapat mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan keamanan pangan bagi penghuninya secara mandiri.

Perubahan sosial yang dimaksud di atas adalah penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi dengan mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan keamanan pangan secara mandiri. Dikatakan secara mandiri, jika kedaulatan pangan bagi rumah tangga di Kawasan Bosowasi memiliki hak untuk menentukan kebijakannya sendiri, yang menjamin hak atas pangan bagi penghuninya. Juga dapat dikatakan secara mandiri, jika kemandirian pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi dapat dilakukan rumah tangga dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam, yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Demikian pula dapat dikatakan secara mandiri, jika keamanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi berada dalam kondisi aman (berada pada level keamanan pangan), yakni tidak tercemar secara biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatannya serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

4. Kesejahteraan Hidup

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika prinsip Sipakatau', Sipakainge, dan Sipatokokkong dijadikan sebagai pondasi utama mengorganisir ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Dalam memaknai hal ini digunakan konsep *falah* dalam Islam. *Falah* berasal dari bahasa arab dari kata kerja *aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan dalam hidup. Istilah *falah* menurut Islam sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih di tekankan pada aspek spiritual. Untuk kehidupan dunia, *falah* mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, *falah*

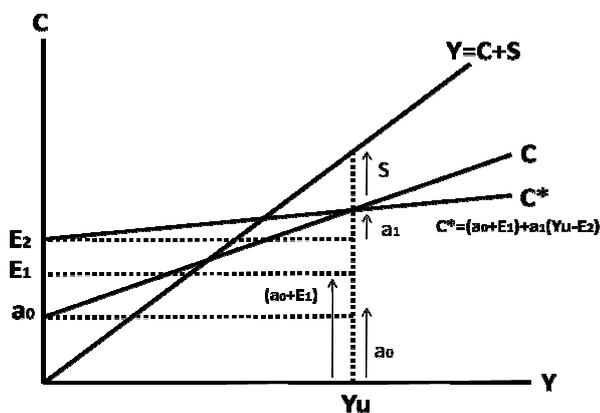
mencakup kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi, yakni bebas dari segala kebodohan (Misanam, 2014: 4-5).

Dalam konteks rumah tangga di Kawasan Bosowasi yang mampu mewujudkan penguatan ketahanan pangan, dapat dijelaskan bahwa rumah tangga yang mampu mewujudkan penguatan ketahanan pangannya, memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan sendiri dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat menciptakan dan mengatur lingkungan yang kompatibel dengan kebutuhannya, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Aktivitas duniawi yang dilakukannya diberi nilai religius sehingga ada energi besar yang diarahkan untuk melakukan hal-hal tersebut karena diberi sentuhan ukhrawi. Bagi rumah tangga muslim di Kawasan Bosowasi, kebahagiaan akhirat adalah tujuan utama dalam menjalani hidup di dunia. Dengan demikian, energi yang dikerahkan untuk mencapai hal tersebut akan berlipat ganda. Dari situ, mereka akan mampu memberi kontribusi yang lebih besar kepada umat manusia utamanya pada aspek perwujudan penguatan ketahanan pangan rumah tangga.

Kesejahteraan hidup rumah tangga di Kawasan Bosowasi, yang telah mampu mewujudkan penguatan ketahanan pangannya dengan prinsip Sipakatau', Sipakainge, dan Sipatokkong, dapat dijabarkan dalam bentuk kurva seperti yang disajikan pada gambar 4.7 (lihat gambar 4.7).

Gambar 4.7

Kurva Kesejahteraan Hidup Rumah Tangga



Pada gambar 4.7 ditunjukkan beberapa simbol, yaitu: C (konsumsi rumah tangga), Y (pendapatan rumah tangga), C^* (tingkat konsumsi rumah tangga di Kawasan Bosowasi), Y_u (pendapatan disposabel rumah tangga di Kawasan Bosowasi), a_0 (konsumsi fisik), E_1 (konsumsi ibadah), $a_0 + E_1$ (konsumsi dasar), E_2 (kebajikan), a_1 (konsumsi marginal), dan S (tabungan rumah tangga), $Y=C+S$ (alokasi pendapatan dalam bentuk konsumsi dan tabungan), $C^*=(a_0+E_1)+a_1(Y_u-E_2)$ (persamaan konsumsi berbasis falah bagi rumah tangga di Kawasan Bosowasi). Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa konsumsi dasar secara riil yang terjadi pada rumah tangga di Kawasan Bosowasi yang telah mampu mewujudkan penguatan ketahanan pangannya dengan prinsip Sipakatau', Sipakainge, dan Sipatokkong, terdiri dari dua, yaitu: Konsumsi fisik dan konsumsi ibadah. Konsumsi ini telah menjadi orientasi hidup mereka, yakni dunia dan akhirat. Selain dari itu, rumah tangga tersebut juga memiliki konsumsi marginal, yakni konsumsi yang dipengaruhi oleh pendapatan disposabel mereka. Pendapatan disposabel yang dimaksud di sini adalah pendapatan yang dialokasi oleh mereka khusus untuk konsumsi marjinal (konsumsi tambahan terhadap konsumsi dasar). Akan tetapi, sebelum mereka membelanjakannya untuk konsumsi marjinal, perlakuan kebajikan (perlakuan ZIS) atas pendapatan disposabel tersebut juga dijadikan prioritas utama dalam hidup mereka dengan tujuan untuk menstabilkan MPC (kecenderungan konsumsi) saudara-saudara mereka yang kurang mampu. Sedangkan untuk berjaga-jaga di masa akan datang, sebagian pendapatan utama mereka disimpan dalam bentuk tabungan.

Dari penjelasan tersebut di atas, ternyata rumah tangga di Kawasan Bosowasi, yang telah mampu mewujudkan penguatan ketahanan pangannya dengan prinsip Sipakatau', Sipakainge, dan Sipatokkong memiliki kehidupan falah, seperti yang disajikan pada gambar 4.7.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian sebagaimana yang dituangkan pada Bab IV pada penelitian ini bahwa (1) Realitas kehidupan sosial keagamaan masyarakat ternyata dapat dijadikan sebagai dasar penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi, (2) Penguatan ketahanan pangan rumah tangga yang berorientasi kepada realitas kehidupan sosial keagamaan ternyata lebih mudah dilakukan di Kawasan Bosowasi, dan (3) Penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi ternyata lebih mudah dikembangkan jika dilakukan secara sosial keagamaan baik melalui mediasi norma subjektif maupun tanpa mediasinya.

Dari ketiga pernyataan tersebut di atas, dapat dirumuskan dua model penguatan ketahanan pangan bagi rumah tangga di Kawasan Bosowasi, yaitu: Model penguatan kolektif dan model penguatan individu. Model penguatan kolektif adalah model penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi dengan prinsip Sipakatau, Sipakainge, dan Sipatokkong, yang dilakukan oleh rumah tangga dan pihak lain (teman, keluarga, tetangga, ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah daerah) secara kolektif dalam menguatkan ketahanan pangan rumah tangga yang bersangkutan karena kondisi ketahanan pangannya belum berada pada level kemandirian pangan. Sedangkan Model penguatan Individu adalah model penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi dengan prinsip Sipakatau, Sipakainge, dan Sipatokkong, yang dilakukan oleh rumah tangga secara individu dalam menguatkan ketahanan pangan rumah tangganya karena kondisi ketahanan pangannya sudah berada pada level kemandirian pangan sehingga dapat dilakukannya secara mandiri.

B. Implikasi Penelitian

Jika model penguatan ketahanan pangan bagi rumah tangga di Kawasan Bosowasi sebagaimana yang dikemukakan di atas diterapkan, maka implikasi yang dapat ditimbulkan antara lain, yaitu:

1. Ketahanan pangan rumah tangga akan menjadi semakin baik dan juga semakin terjamin,
2. Ketahanan pangan rumah tangga mudah dikembangkan jika menggunakan prinsip Sipakatau, Sipakainge, dan Sipatokkong,
3. Rumah tangga akan terbantu dalam mewujudkan ketahanan pangannya (kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan keamanan pangan) dengan mudah, dan
4. Rumah tangga akan terbantu dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya (dunia dan akhirat) jika dua model tersebut diadopsi dalam menguatkan ketahanan pangannya.

C. Saran-saran

Tentu saja hasil perumusan model penguatan tersebut di atas tidak hanya dapat dilihat dari satu aspek seperti yang diungkapkan di atas, tetapi juga disarankan untuk memerhatikan aspek-aspek lain karena pangan itu merupakan hak dasar manusia yang harus diupayakan secara revolusioner. Artinya, untuk menguatkan ketahanan pangan tidak hanya dilakukan dengan satu aspek, tetapi banyak aspek yang harus diperhatikan.

Di sisi lain, meskipun penelitian ini telah berhasil menunjukkan dua model penguatan ketahanan pangan rumah tangga di Kawasan Bosowasi. namun belum dapat ditunjukkan bagaimana tingkat akurasi cara kerja model tersebut. Artinya, masih perlu diuji cara kerjanya, apakah dapat digunakan atau tidak dalam menguatkan ketahanan pangan rumah tangga dalam rangka untuk mengetahui apakah masyarakat di Kawasan Bosowasi dapat merespon upaya-upaya penguatan yang dilakukan ataukah tidak. Karena itu, disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan dalam rangka untuk membuktikan cara kerja model yang dirumuskan tersebut.

REFERENSI

- Abdullah, F. dkk. (2014). *Islam dan Budaya Jawa*, Surakarta: Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Surakarta.
- Abdullah, I., dkk. (2008), *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, Ed.Rev.,Cet.2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abercrombie, N., dkk. (2011). *Kamus Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ajzen, I. (1985). *From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior*, Dalam J. Kuhl & J. Beckman, Eds., *Action-control: From Cognition to Behavior*, Springer, Heidelberg
- Ajzen, I. (1991). "The Theory of Planned Behavior", *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50.
- Ajzen, I. (2001). "Perceived Behavioral Control, Self-efficacy, Locus of Control, and The Theory of Planned Behavior", *Journal of Applied Social Psychology*, 32.4.
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality and Behavior*, 2nd Edition, McGraw-Hill Professional Publishing, Berkshire, GBR.
- Ajzen, I., & Fishbein, M., (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*, Addison-Wesley, Reading, MA.
- Ajzen, I., & Fishbein, M., (1980). *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York.
- Anderson, M. D., & Cook, J. T. (1999). "Community food security: Practice in need of theory?", *Agriculture and human values*, 16 (2), 141-150.
- Arikunto, S. (2003). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: LP3ES.
- Bantacut, T. (2013). "Pembangunan ketahanan ekonomi dan pangan perdesaan mandiri berbasis nilai tambah (Rural Economic and Food Security Development Based on Added Value Formation):", *Jurnal Pangan*, 22 (2), 181-196.
- Bappenas, "Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP)", *Dokumen Internal*, Bappenas, Tahun 2019.
- Berger, P. L. and Luckmann, T. (1966) *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, New York: Anchor Books.
- Blau, P. M. (1977). "A Macrosociological Theory of Social Structure." *American Journal of Sociology*, 83.1.
- BPS Kabupaten Bone. (2020). *Kabupaten Bone dalam Angka Tahun 2020*, BPS Kabupaten Bone.

- BPS Kabupaten Sinjai. (2020). *Kabupaten Sinjai dalam Angka Tahun 2020*, BPS Kabupaten Sinjai.
- BPS Kabupaten Soppeng. (2020) *Kabupaten Soppeng dalam Angka Tahun 2020*, BPS Kabupaten Soppeng.
- BPS Kabupaten Wajo. (2020). *Kabupaten Wajo dalam Angka Tahun 2020*, BPS Kabupaten Wajo.
- Brown, R. and Reginald, A. (1940). "On Social Structure." *The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*, 70.1.
- Budiyanto, M. A. K. (2012). "Model pengembangan ketahanan pangan berbasis pisang melalui revitalisasi nilai kearifan lokal", *Jurnal Teknik Industri*, 11 (2), 170-177.
- Cohen, Bruce J. (1992). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Terj., Jakarta: Rineka Cipta.
- dan Bisnis Universitas Udayana*, 4 (2015).
- Darwanto, D. H. (2005). "Ketahanan pangan berbasis produksi dan kesejahteraan petani", *Ilmu Pertanian*, 12 (2), 152-164.
- Dokumen Internal Pemda Kabupaten Bone tentang Sejarah Kabupaten Bone (2020).
- Dokumen Internal Pemda Kabupaten Sinjai tentang Sejarah Kabupaten Sinjai (2020).
- Dokumen Internal Pemda Kabupaten Soppeng tentang Sejarah Kabupaten Soppeng (2020).
- Dokumen Internal Pemda Kabupaten Wajo tentang Sejarah Kabupaten Wajo (2020).
- Ecker and Breisinger, (2012). "The Food Security System" Washington: International Food Policy Research Institute, 1–14.
- Eshleman, J. R., and Cashion, B. G. (1985). *Sociology an Introduction*. Toronto: Little Brown & Company.
- Esti, I. (2012). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI).
- FAO (1997). "The food system and factors affecting household food security and nutrition". *Agriculture, food and nutrition for Africa: a resource book for teachers of agriculture*, Rome: Agriculture and Consumer Protection Department. Diakses tanggal 06 Agustus 2019.
- Geertz, C. (1973) *The Interpretation of Cultures*, New York: Basic Book.
- Gottlieb, R., & Fisher, A. (1996). "Community food security and environmental justice: Searching for a common discourse", *Agriculture and human values*, 13 (3), 23-32.

- Gregory, P. J.; Ingram, J. S. I.; Brklacich, M., (2005). "Climate change and food security". *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*. 360 (1463): 2139–2148.
- Hardono, G. S. (2016). "Strategi pengembangan diversifikasi pangan lokal", *Analisis Kebijakan Pertanian*, 12 (1), 1-17.
- Haris, R. (2018) "Dinamika Kelompok Sosial Budaya di Kota Makassar: Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan." *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 19.2.
- Hariyadi, P. (2010). "Penguatan Industri Penghasil Nilai Tambah Berbasis Potensi Lokal peranan Teknologi Pangan untuk Kemandirian Pangan", *Pangan*, Vol. 19 No. 4 Desember 2010: 295-301, 19 (4), 295-301.
- Henslin, J. M. (2006). *Sosiologi dengan Pendekatan Mebumi*, Edisi 6, Terj., Jakarta: Erlangga.
- Hidayah, N. (2011). "Kesiapan psikologis masyarakat pedesaan dan perkotaan menghadapi diversifikasi pangan pokok", *Humanitas: Jurnal Psikologi Indonesia*, 8 (1), 88-104.
- Hoddinott, J. (1999). "Operationalizing household food security in development projects: an introduction" *Technical guide*, 1, 1-19.
- Horton, P. B., dan Chester L H.(1987). *Sosiologi*. Jilid I. terj. Aminudin Ram & Tita Sobari. Jakarta: Erlangga.
- Japan Times, (2011). "Food self-sufficiency rate fell below 40% in 2010" , *Japan Times*, Aug. 12, 2011.
- Johnson, D. P. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Terj., Jilid 1 –2. Jakarta: PT. Gramedia Indonesia.
- Kamanto, S. (2000). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: LPE-UI.
- Koentjaraningrat. (1988). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Kornblum, W. (2000). *Sociology in a Changing World*. Florida: Harcourt College Publisher.
- Landis, J. R. (1986). *Sociology, Concepts and Characteristics*. California: Wadsworth Publishing Company.
- Loomis, C. P. (1867). "In Praise of Conflict and its Resolution." *The American Sociological Review*, 32.6.
- Mahbubi, A. (2013). "Model Dinamis Supply Chain Beras Berkelanjutan dalam Upaya Ketahanan Pangan Nasional", *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 10 (2), 81-89.
- Maxwell, S. (1990). "Food Security in Developing Countries: Issues and Options for the 1990s 1", *IDS bulletin*, 21 (3), 2-13.

- McMichael, P., & Schneider, M. (2011). "Food security politics and the Millennium Development Goals", *Third World Quarterly*, 32 (1), 119-139.
- Michael, H., and Andreas, M. K. (2004). *A Beginner's Guide to Partial Least Square Analysis*, Lawrence Erlbaum Association, Inc.
- Muksin, S. M., dkk. (2018). "Pola Adaptasi Sosial Ekonomi Suku Bugis sebagai Pendatang di Desa Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan." *Jurnal Neo Societal*, 3.1.
- Mungim, B. (2008). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Mustari, A. (2016). "Perempuan dalam Struktur Sosial dan Kultur Hukum Bugis Makassar." *Al-'Adl*, 9.1.
- Nasution, S. (2000) *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ogburn, W. F. (1922). *Social Change with Respect to Culture and Original Nature*. New York: B. W. Huebsch.
- Parsons, T. (1939). "The Professions and Social Structure." *Social Forces*, 17.4.
- Pothukuchi, K. (2004). "Community food assessment: A first step in planning for community food security", *Journal of Planning Education and Research*, 23 (4), 356-377.
- Prastowo, A. (2008) *Menguasai Teknik-teknik Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: DIVA Press.
- Prawoto, N. (2012). "Model Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemandirian Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Dan Ketahanan Pangan (Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pada Masyarakat Dieng Di Propinsi Jawa Tengah)", *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 8 (2), 135-154.
- Purwaningsih, Y. (2008). "Ketahanan pangan: situasi, permasalahan, kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat" *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 9 (1), 1-27.
- Purwantini, T. B. (2016). "Potensi dan prospek pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan", In *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 30, No. 1, pp. 13-30.
- Robert. H. (1993). *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: PT. Rhineka Cipta.
- Rogers, A., Ferguson, M., Ritchie, J., Van Den Boogaard, C., & Brimblecombe, J. (2016). "Strengthening food systems with remote Indigenous Australians: stakeholders' perspectives", *Health promotion international*, 33 (1), 38-48.
- Sanderson. (2000). *Sosiologi Macro, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Sihabudin, A. (2011). *Komunikasi Antarbudaya: Suatu Perspektif Multidimensi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Simatupang, P. (2016). "Analisis kritis terhadap paradigma dan kerangka dasar kebijakan ketahanan pangan nasional". In *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 25, No. 1, pp. 1-18.
- Sjafari, A., dkk. (Editor). (2011). *Perubahan Sosial (Sebuah Bunga Rampai)*, Banten: FISIP UNITIRTA.
- Smelser, N. J. (1981). *Sociology*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Soekanto, S. (1982). *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Sosial*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Soekanto, S. (1998). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Soemardjan, S. S. (1974). *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbitan UI.
- Soerjanto, P. (1989). *Strategi Kebudayaan Suatu Pengantar Filosofis*, Jakarta: Gramedia.
- Subagio, A. (2008). "Modified Cassava Flour (Mocal): Sebuah Masa Depan Ketahanan Pangan Nasional Berbasis Potensi Lokal", *Jurnal Pangan*, 17 (1), 92-103.
- Sudibyo, L. (2013). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Sugiyono. (2009). *Statistika Untuk Penelitian*, Cetakan Empat Belas, Bandung: Alfa Betha.
- Sulasman, G. S. (2013). *Teori-teori Kebudayaan*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*, Cet. ke 1, Yogyakarta: UII Press.
- Supartiningsih. (2010). "Konsep Ajoareng-Joa' dalam Tatanan Sosial Masyarakat Bugis (Perspektif Filsafat Sosial)." *Jurnal Filsafat*, 20. 3.
- Suryana, A. (2014). "Menuju ketahanan pangan indonesia berkelanjutan 2025: tantangan dan penanganannya", In *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 32, No. 2, pp. 123-135.
- Suwardi, E. (2012). *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Swastika, D. K. S. (2011). "Membangun kemandirian dan kedaulatan pangan untuk mengentaskan petani dari kemiskinan", *Pengembangan Inovasi Pertanian*, 4 (2), 103-117.
- Syani, A. (1995). *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, Bandung: Dunia Pustaka Jaya.

- Tweeten, Luther. (1999). "The Economics of Global Food Security", *Review of Agricultural Economics*, 21 (2): 473–488.
- United Nations (UN). (1999). "The right to adequate food", *Committee on Economic, Social, and Cultural Rights*, Geneva: United Nations.
- Vincenzo, et.,al. (2010). *Handbook of Partial Least Square*, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- Vos, R. (2015). "Thought for food: Strengthening global governance of food security", *Global Governance and Rules for the Post-2015 Era: Addressing Emerging Issues in the Global Environment*, 1-12.
- Warsito. (2012). "Antropologi Budaya". Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI).
- Werner, E. (1989). "Cooperating Agents: A Unified Theory of Communication and Social Structure." *Distributed Artificial Intelligence*. Morgan Kaufmann.
- YP, N. M. S. (2008). "Diversifikasi Konsumsi Pangan Pokok Berbasis Potensi Lokal Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah tangga Pedesaan Di Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul", *Economic Journal Of Emerging Markets*, 13 (1).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Narasumber Wawancara Tahun 2020
2. Daftar Narasumber Wawancara Tahun 2021
3. Surat Permohonan Wawancara
4. Pedoman Wawancara
5. Surat Keterangan Wawancara
6. Surat Permohonan Pengisian Angket
7. Angket Penelitian
8. Tabulasi Data Angket Penelitian
9. Surat Tugas dan Izin Penelitian

DAFTAR NARASUMBER WAWANCARA TAHUN 2020

No	Sumber Data	Informan
1	<i>Topik: Realitas Ketahanan Pangan di Bosowasi</i>	
1.1	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone	Kepala Sub Bagian Program
1.2	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai	Kepala Dinas
1.3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo	Kepala Dinas
1.4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
2	<i>Topik: Indikator Realitas Sosial Keagamaan di Bosowasi</i>	
2.1	Kementerian Agama Kabupaten Wajo	Kepala Kantor
2.2	Kementerian Agama Kabupaten Soppeng	Kepala Kantor
2.3	Kementerian Agama Kabupaten Sinjai	Kepala Kantor
2.4	Kementerian Agama Kabupaten Bone	Kasubag TU
2.5	MUI Kabupaten Bone	Ketua MUI
2.6	MUI Kabupaten Wajo	Wakil Ketua MUI
2.7	MUI Kabupaten Soppeng	Wakil Ketua MUI
2.8	MUI Kabupaten Sinjai	Sekretaris MUI
3	<i>Topik: Pangan Berbasis Organik dan Kearifan Lokal</i>	
3.1	Akademisi dan Praktisi Pangan Organik	Syamsuriadi
3.2	Praktisi Pangan Organik	Andi Haeri, S.
3.3	Praktisi Pangan Organik	Muh. Jafar

DAFTAR NARASUMBER WAWANCARA TAHUN 2021

No	Nama/Jenis Kelamin	Umur (Thn)	Alamat	Tgl/Bln/Thn Wawancara
1	M. Abu Bakar	45	Pasir Putih, Sinjai Borong, Sinjai	23 Oktober 2021
2	M. Yusuf	47	Sangiasseri, Sinjai Selatan, Sinjai	24 Oktober 2021
3	H. Sining	56	Atakkae, Tempe, Sengkang	30 Oktober 2021
4	H. Muh Nur	52	Cempalagi, Tempe, Sengkang	31 Oktober 2021
5	H. Bandu	49	Cabenge, Lilirilau, Soppeng	6 November 2021
6	Yasin Mahmude	55	Ujung, Lilirilau, Soppeng	7 November 2021
7	Sulfandi Ahmad	34	Lampoko, Barebbo, Bone	13 November 2021
8	Muhammad Ihsan	33	Lampoko, Barebbo, Bone	14 November 2021

SURAT PERMOHONAN WAWANCARA

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Informan Wawancara
Di
Tempat
(Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Sehubungan untuk memenuhi kelengkapan penulisan penelitian kami dalam bidang kajian Ekonomi dan Bisnis Islam pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, yang berjudul: "***Konstruksi Sosial Keagamaan atas Penguatan Ketahanan Pangan di Daerah (Studi tentang Stabilitas Ketersediaan Pangan di Kawasan Bosowasi)***", maka dengan segala kerendahan hati, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan sedikit waktunya guna diwawancarai berdasarkan pada pedoman wawancara yang terlampir.

Pedoman wawancara tersebut semata-mata bersifat ilmiah, dan hanya dipergunakan untuk keperluan penulisan penelitian kami. Oleh karena itu, informasi dan jawaban yang Bapak/ibu berikan secara jujur dan obyektif adalah merupakan bantuan yang tak ternilai harganya dan sangat besar manfaatnya bagi kelancaran dan kualitas penulisan penelitian kami.

Atas segala bantuan dan partisipasi yang Bapak/Ibu berikan, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Watampone,2020/2021

Hormat Kami,
Ketua Tim Peneliti

SYAPARUDDIN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pedoman Wawancara untuk Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2020

- 1.1. Bagaimana realitas ketahanan pangan (khususnya ketahanan pangan rumah tangga) di Bone/Soppeng/Wajo/Sinjai
- 1.2. Bagaimana penguatan ketahanan pangan (khususnya ketahanan pangan rumah tangga) yang dilakukan dari aspek fisik di Bone/Soppeng/Wajo/Sinjai (Misalnya, Konsep, orientasi, visi dan misi, dll.)?
- 1.3. Bagaimana penguatan ketahanan pangan (khususnya ketahanan pangan rumah tangga) yang dilakukan dari aspek non-fisik di Bone/Soppeng/Wajo/Sinjai (Misalnya, Strategi, upaya riil, pembiayaan, dll.)?
- 1.4. Bisakah kami diberikan data tertulis tentang ketiga hal tersebut di atas?

2. Pedoman Wawancara untuk Kantor Kementerian Agama dan MUI Tahun 2020

- 2.1. Bagaimana realitas kehidupan keagamaan masyarakat di Bone/Soppeng/Wajo/Sinjai?
- 2.2. Bagaimana realitas kehidupan sosial masyarakat di Bone/Soppeng/Wajo/Sinjai?
- 2.3. Apakah realitas keagamaan selaras dengan realitas sosial di Bone/Soppeng/Wajo/Sinjai?
- 2.4. Apakah realitas sosial keagamaan bisa dijadikan sebagai dasar penguatan ketahanan pangan di Bone/Soppeng/Wajo/Sinjai?
- 2.5. Bisakah kami diberikan data tertulis tentang realitas kehidupan sosial keagamaan masyarakat di Bone/Soppeng/Wajo/Sinjai?

3. Pedoman Wawancara untuk Praktisi Pangan Organik Tahun 2020

- 3.1. Bagaimana menciptakan dan menghadirkan pangan yang berbasis organik dan kearifan lokal di daerah?
- 3.2. Bagaimana tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat di daerah dalam menciptakan dan menghadirkan pangan yang berbasis organik dan kearifan lokal?
- 3.3. Apakah pangan yang berbasis organik dan kearifan lokal itu bisa dijadikan sebagai solusi alternatif dalam menguatkan ketahanan pangan masyarakat, khususnya rumah tangga di daerah?

4. Pedoman Wawancara untuk Kepala Rumah Tangga Tahun 2021

- 4.1. Bagaimana model penguatan ketahanan pangan rumah tangga secara umum di Kawasan Bosowasi?

- 4.2. Bagaimana model penguatan ketahanan pangan rumah tangga secara kolektif di Kawasan Bosowasi?
- 4.3. Bagaimana model penguatan ketahanan pangan rumah tangga secara individu di Kawasan Bosowasi?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan :
Instansi :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saudara Dr. Syaparuddin, S.Ag., M.SI. telah mewawancarai kami tentang Pangan Berbasis Organik dan Kearifan Lokal/Realitas Ketahanan Pangan/Indikator Realitas Sosial Keagamaan* di Bone/Soppeng/Wajo/Sinjai* pada penelitian yang dilakukannya dengan judul: "*Konstruksi Sosial Keagamaan atas Penguatan Ketahanan Pangan di Daerah (Studi tentang Stabilitas Ketersediaan Pangan di Kawasan Bosowasi)*", pada:

Hari/Tgl. :
Jam :
Tempat :

Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,2020/2021

Yang menyatakan,

**Coret yang tidak sesuai*

SURAT PERMOHONAN PENGISIAN ANGKET

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Responden
Di
Tempat
(Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Sehubungan untuk memenuhi kelengkapan penulisan penelitian kami dalam bidang kajian Ekonomi dan Bisnis Islam pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, yang berjudul: "***Konstruksi Sosial Keagamaan atas Penguatan Ketahanan Pangan di Daerah (Studi tentang Stabilitas Ketersediaan Pangan di Kawasan Bosowasi)***", maka dengan segala kerendahan hati, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan sedikit waktunya guna mengisi angket penelitian yang terlampir.

Angket penelitian tersebut semata-mata bersifat ilmiah, dan hanya dipergunakan untuk keperluan penulisan penelitian kami. Oleh karena itu, jawaban yang Bapak/ibu berikan secara jujur dan obyektif adalah merupakan bantuan yang tak ternilai harganya dan sangat besar manfaatnya bagi kelancaran dan kualitas penulisan penelitian kami.

Atas segala bantuan dan partisipasi yang Bapak/Ibu berikan, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Watampone,2020

Hormat Kami,
Ketua Tim Peneliti

SYAPARUDDIN

ANGKET PENELITIAN

I. IDENTITAS RESPONDEN

Petunjuk Pengisian :

Isilah identitas responden di bawah ini pada tempat yang telah disediakan dan berikanlah tanda *cheklist* (✓) pada pilihan Bapak/Ibu yang sesuai. Identitas Bapak/Ibu akan dirahasiakan dan hanya diketahui oleh peneliti.

1. Nama Kepala Rumah Tangga :
(jika keberatan boleh tidak diisi)
2. Jumlah Penghuni Rumah Tangga : (Orang)
3. Desa, Kecamatan dan Kabupaten Tempat tinggal :
.....
4. Lama Berdomisili : (Tahun)
5. Pekerjaan)* :

<input type="checkbox"/>	Dosen/Guru/Instruktur)*
<input type="checkbox"/>	PNS/TNI/POLRI)*
<input type="checkbox"/>	Karyawan: Swasta/BUMN/BUMD)*
<input type="checkbox"/>	Wiraswasta/Pedagang)*
<input type="checkbox"/>	Lainnya (sebutkan):

Tandai yang sesuai
6. Pendidikan terakhir)* *Tandai yang sesuai* :

<input type="checkbox"/>	SD/MI)*
<input type="checkbox"/>	SMP/MTs)*
<input type="checkbox"/>	SMA/MAN/SMK)*
<input type="checkbox"/>	Diploma: D.I/D.II/D.III/D.IV)*
<input type="checkbox"/>	Sarjana: S1/S2/S3)*
<input type="checkbox"/>	Lainnya (sebutkan):
7. Pendapatan/ bulan :

<input type="checkbox"/>	Di bawah Rp 1 juta	<input type="checkbox"/>	Rp 1 juta s.d. Rp 5 juta
<input type="checkbox"/>	Di atas Rp 5 juta s.d. Rp 10 juta	<input type="checkbox"/>	Di atas Rp 10 juta

II. ANGGKET PENELITIAN

Petunjuk Pengisian:

Berilah tanda *checklist* (✓) pada setiap kolom dari setiap pernyataan di bawah ini sesuai dengan pilihan Bapak/Ibu. Jika pernyataan-pernyataan di bawah ini dirasa sangat tidak setuju berilah tanda *checklist* (✓) pada alternatif jawaban 1 (satu) sedangkan jika dirasa sangat setuju berilah tanda *checklist* (✓) pada alternatif jawaban 5 (lima), atau pada alternatif jawaban antara 1 sampai 5 yang dirasa mewakili, misalnya pada alternatif jawaban 2 atau 3 atau 4.

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		1	2	3	4	5
I	<i>Realitas Sosial Keagamaan (RS)</i>					
1	(Prinsip Sipakatau') Apakah tidak saling membeda-bedakan dijadikan sebagai prinsip oleh penghuni rumah tangganya dalam mewujudkan penguatan ketahanan pangannya?					
2	(Prinsip Sipakalebbe) Apakah saling menghargai dijadikan sebagai prinsip oleh penghuni rumah tangganya dalam mewujudkan penguatan ketahanan pangannya?					
3	(Prinsip Sipakainge) Apakah saling mengingatkan dijadikan sebagai prinsip oleh penghuni rumah tangganya dalam mewujudkan penguatan ketahanan pangannya?					
4	(Prinsip Sipatokkong) Apakah saling bekerjasama dijadikan sebagai prinsip oleh penghuni rumah tangganya dalam mewujudkan penguatan ketahanan pangannya?					
II	<i>Norma Subjektif (NS)</i>					
1	(Pengaruh Teman) Apakah penghuni rumah tangganya dipengaruhi oleh teman dalam mewujudkan penguatan ketahanan pangannya?					
2	(Pengaruh Keluarga) Apakah penghuni rumah tangganya dipengaruhi oleh anggota keluarga dalam mewujudkan penguatan ketahanan pangannya?					
3	(Pengaruh Tetangga) Apakah penghuni rumah tangganya dipengaruhi oleh tetangga dalam mewujudkan penguatan ketahanan pangannya?					

4	(Pengaruh Ulama) Apakah penghuni rumah tangganya dipengaruhi oleh ulama dalam mewujudkan penguatan ketahanan pangannya?					
5	(Pengaruh Tokoh Masyarakat) Apakah penghuni rumah tangganya dipengaruhi oleh tokoh masyarakat dalam mewujudkan penguatan ketahanan pangannya?					
6	(Perintah Pemerintah Daerah) Apakah penghuni rumah tangganya diperintahkan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan penguatan ketahanan pangannya?					
III	<i>Penguatan Ketahanan Pangan (PK)</i>					
1	(Ketersediaan Pangan) Apakah penghuni rumah tangganya mampu mewujudkan suplai pangannya sendiri dan atau dibantu pihak lain?					
2	(Akses Pangan) Apakah penghuni rumah tangganya mampu mewujudkan dalam membeli dan atau mengalokasikan bahan pangannya sesuai dengan selernya?					
3	(Pemanfaatan Pangan) Apakah penghuni rumah tangganya mampu mewujudkan bahan pangan yang dikonsumsi aman dan dapat memenuhi kebutuhan fisiologisnya?					
4	(Stabilitas Pangan) Apakah penghuni rumah tangganya mampu mewujudkan dalam mendapatkan bahan pangan sepanjang waktu?					

Kami telah mengisi angket penelitian ini dengan benar sesuai dengan tingkat pengetahuan, pemahaman dan pengalaman yang kami miliki tentang penguatan ketahanan pangan rumah tangga, dan semoga bisa membantu dan bermanfaat dalam penyelesaian penulisan penelitian ini. *Amin, Ya Rabbal 'Alamin.*

.....,

Responden,

(.....)

55	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
57	5	2	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5
58	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4
59	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5
60	4	3	5	3	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
61	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
62	5	3	5	5	4	5	5	3	3	4	3	3	3	4
63	4	3	3	3	5	2	2	5	5	4	4	4	4	3
64	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
65	4	2	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4
66	4	4	5	5	3	5	5	5	5	3	4	4	5	4
67	5	5	4	4	4	5	5	5	3	3	5	5	5	5
68	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4
69	5	5	4	5	4	5	5	5	2	5	5	5	5	5
70	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5
71	5	4	5	5	5	3	4	5	5	5	3	4	3	5
72	3	3	3	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5
73	4	3	4	3	3	3	5	5	3	4	5	4	5	5
74	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
75	5	2	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5
76	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
77	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4
78	3	3	4	4	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5
79	4	2	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4
80	5	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
81	5	4	4	5	4	4	5	2	2	5	5	5	5	4
82	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
83	4	2	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4
84	4	4	4	3	3	4	5	5	5	4	5	5	4	5
85	4	4	5	5	5	3	3	4	4	4	3	3	3	3
86	5	1	5	5	5	3	4	4	5	4	5	5	5	5
87	5	5	5	5	4	3	4	4	5	4	4	4	5	4
88	5	1	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
89	5	1	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5
90	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4
91	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
92	3	4	4	3	3	5	5	4	5	5	4	5	5	4
93	5	2	5	5	5	3	5	3	4	4	4	4	4	4
94	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
95	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4
96	3	2	3	2	1	3	5	4	2	4	3	4	2	4
97	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
98	5	3	5	5	5	3	3	4	1	4	5	4	5	5
99	5	5	5	5	4	4	4	5	3	3	5	3	5	5
100	4	2	4	5	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4
101	5	2	5	5	5	3	5	5	5	5	4	4	5	5
102	5	5	5	4	4	4	4	4	3	5	2	4	4	4
103	4	5	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5	4
104	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	5	5
105	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5
106	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4
107	5	3	5	5	3	5	5	5	2	3	5	5	5	5
108	5	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4
109	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	5	4	4
110	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5
111	5	4	3	4	3	4	5	5	4	5	4	5	5	4
112	4	5	3	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	5
113	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5

173	5	4	4	3	4	2	4	4	4	5	4	5	5	5
174	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4
175	5	5	4	5	3	5	5	5	4	4	5	5	5	4
176	5	4	5	4	4	4	4	3	5	4	4	4	3	5
177	4	3	5	4	3	4	4	3	4	4	5	5	5	5
178	5	3	5	4	3	4	4	3	4	4	5	5	5	5
179	4	3	4	5	2	4	4	4	4	5	5	5	3	4
180	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5
181	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	5	4	5	4
182	5	5	5	5	5	5	5	4	3	5	5	5	5	5
183	4	4	4	4	4	4	5	3	4	5	5	4	4	4
184	4	1	4	3	2	2	2	2	2	2	4	3	3	4
185	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4
186	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
187	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
188	5	4	5	5	4	3	4	4	5	5	4	4	5	4
189	4	3	4	5	4	4	5	3	4	3	4	5	5	5
190	5	5	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4
191	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5
192	5	3	5	5	5	3	3	4	5	4	5	4	5	5
193	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
194	3	3	5	4	3	5	5	5	3	4	4	3	3	3
195	5	5	5	5	3	5	5	3	3	4	5	3	5	4
196	3	2	3	4	3	3	4	5	2	5	4	3	3	5
197	5	3	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5
198	4	3	3	3	2	5	4	3	4	4	5	4	5	5
199	5	4	5	4	4	4	4	3	5	4	4	4	3	5
200	4	4	4	3	5	2	5	4	2	3	4	3	4	4
201	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
202	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	4
203	5	3	5	5	5	2	5	3	3	4	5	5	5	5
204	4	3	4	4	4	2	5	5	3	4	4	4	4	5
205	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
206	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
207	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5
208	5	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4
209	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
210	4	4	5	4	5	5	5	5	3	4	5	3	5	5
211	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4
212	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4
213	5	3	5	5	5	4	5	5	5	3	5	5	5	5
214	5	4	4	5	5	3	5	4	4	4	4	4	4	4
215	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4
216	2	3	2	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
217	4	4	5	5	4	5	4	4	2	4	5	5	5	4
218	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5
219	5	4	5	5	5	5	5	4	3	4	4	3	3	4
220	4	2	4	3	4	5	4	5	4	3	3	4	5	4
221	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4
222	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
223	3	4	4	3	3	4	4	5	2	3	2	2	3	5
224	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	5	5	5	5
225	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3
226	4	4	5	5	4	1	5	4	4	4	5	5	5	5
227	5	1	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5
228	5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5
229	4	4	5	5	4	5	4	3	4	4	5	4	4	4
230	3	5	3	3	4	5	5	3	3	3	5	5	5	3
231	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5

232	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2
233	3	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
234	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	4	5	5
235	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4
236	5	4	5	5	5	4	5	3	4	5	5	5	5	5
237	5	3	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
238	4	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	5
239	5	5	5	5	3	5	5	3	5	5	5	5	5	5
240	3	2	4	4	2	2	2	2	3	3	3	5	4	5
241	3	4	5	5	5	3	4	5	5	4	5	5	5	5
242	5	4	3	4	1	5	5	4	4	3	5	5	5	5
243	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
244	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
245	5	5	3	3	4	4	5	3	5	3	4	4	4	3
246	4	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5
247	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
248	1	4	4	4	5	5	3	5	4	3	3	5	5	5
249	5	3	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
250	5	5	5	5	4	3	5	5	2	3	5	5	3	3
251	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
252	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5
253	4	1	5	5	3	5	3	4	4	3	5	3	5	4
254	4	5	3	4	5	5	3	4	5	5	4	3	4	3
255	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5
256	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	4
257	5	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5
258	5	2	5	5	4	5	5	5	2	5	5	5	5	5
259	3	2	3	3	2	2	3	3	4	3	4	4	3	4
260	4	4	5	5	4	2	4	4	3	5	5	4	5	4
261	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5
262	5	4	4	5	3	4	4	5	5	5	4	3	3	4
263	5	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4
264	5	3	5	5	5	3	2	5	3	4	4	5	4	4
265	5	1	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5
266	3	5	5	5	5	4	4	3	5	4	4	3	4	4
267	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
268	3	2	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4
269	5	2	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
270	5	3	5	5	3	3	5	5	5	5	3	4	5	4
271	4	3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
272	4	3	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5
273	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	5	4	4	4
274	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5
275	5	5	5	5	5	4	5	4	2	3	5	4	5	5
276	3	3	4	4	4	4	3	3	2	4	4	3	4	4
277	5	3	5	5	5	5	4	4	4	1	3	3	3	3
278	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
279	5	4	4	5	4	3	3	3	3	5	5	4	5	4
280	5	3	4	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
281	5	3	4	4	3	5	4	4	3	4	5	4	5	4
282	5	2	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4
283	5	4	4	5	5	3	5	5	2	3	5	3	5	5
284	4	3	5	5	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4
285	5	3	5	5	4	4	5	4	3	5	5	4	5	5
286	4	2	4	3	4	3	3	2	3	2	4	4	4	4
287	4	3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
288	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
289	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5
290	4	2	3	2	3	4	3	4	4	4	3	4	5	4

291	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3
292	5	2	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4
293	4	1	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
294	4	4	4	5	3	5	4	5	5	4	4	4	3	4
295	4	5	5	5	5	3	5	4	4	5	5	5	5	5
296	5	4	5	4	3	3	4	3	4	4	4	4	5	4
297	4	2	5	5	2	5	4	3	5	2	4	4	4	4
298	5	3	4	5	4	4	4	4	4	3	5	4	4	3
299	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3
300	4	3	4	4	3	4	4	5	4	4	5	5	5	5
301	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4
302	4	2	4	5	3	4	4	4	2	3	5	5	4	4
303	5	1	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4
304	5	4	4	5	5	5	5	3	5	5	3	3	4	4
305	4	3	3	5	4	3	3	4	4	4	5	3	4	3
306	4	4	3	3	3	5	4	4	3	4	5	5	5	4
307	4	2	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5
308	3	4	5	5	4	3	4	3	4	4	5	4	5	5
309	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	5	4	4	4
310	3	1	4	4	3	5	5	3	3	5	5	5	5	4
311	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
312	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
313	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
314	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
315	4	2	3	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5
316	4	5	4	4	4	3	4	4	3	4	4	5	5	5
317	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
318	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
319	5	4	4	4	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
320	5	2	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
321	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5
322	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
323	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
324	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	3	3	3	5
325	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
326	4	3	3	3	2	2	4	2	4	2	4	2	3	3
327	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	2	3	3
328	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
329	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
330	5	4	5	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5	4
331	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4
332	5	2	4	5	5	3	3	4	4	4	4	4	3	4
333	5	1	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5
334	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
335	3	1	4	4	4	3	5	5	4	4	5	4	5	5
336	5	4	5	4	5	4	5	3	4	5	4	4	4	4
337	3	3	4	4	3	4	5	5	5	5	5	5	3	3
338	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
339	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
340	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5
341	4	5	4	3	4	5	4	4	3	4	4	4	5	5
342	3	3	4	2	3	2	4	3	2	3	5	5	5	5
343	5	4	5	4	4	4	4	4	3	4	5	4	5	4
344	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
345	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5
346	4	2	5	4	3	4	3	3	3	4	5	3	5	4
347	5	4	5	5	5	1	5	1	5	5	5	5	5	5
348	5	4	5	4	3	5	5	5	2	4	4	5	5	5
349	5	4	5	5	5	4	4	4	3	4	5	4	5	4

SURAT TUGAS DAN IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan HOS. Cokroaminoto Tlp. (0481) 21395 Fax. (0481) 23928
Email : info@iain-bone.ac.id - web : www.iain-bone.ac.id KP 92733

SURATTUGAS

Nomor: B- 070/In.33/L.1/KP.01.1/6/2020

Bahwa yang namanya tersebut di dalam surat tugas ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan penelitian di Kawasan Bosowasi Provinsi Sulawesi Selatan

Memberi Tugas

Kepada : Nama : Dr. Syaparuddin, S.,Ag., M.Si

Jabatan : Lektor Kepala

Untuk : Melaksanakan penelitian pada tanggal 22 Juni – 22 November 2020 di Kawasan Bosowasi Provinsi Sulawesi Selatan

Demikian surat tugas tugas ini kami buat untuk dapat digunakan sesuai dengan fungsinya dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Watampone, 16 Juni 2020

Ketua LPPM

Rahmatunnair



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 WatamponeTelp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.475/VIIP/DPMPTSP/2020

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : SYAPARUDDIN, S.,Ag.,M. SI.,Dkk
NIP/Nim/Nomor Pokok : 196812202003121003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kompleks Perumahan Taman Angrek Indah Permai
Watampone B1/35 Jl. A. Sambaloge Baru Watampone
Pekerjaan : Dosen IAIN Bone

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dengan Judul :

**" KONSTRUKSI SOSIAL-KEAGAMAAN ATAS PENGUATAN KETAHANAN PANGAN
DI DAERAH (STUDI TENTANG STABILITAS KETERSEDIAAN PANGAN
DI KAWASAN BOSOWASI)"**

Lamanya Penelitian: 22 Juni 2020 s/d 16 November 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone,Camat Se- Kabupaten Bone.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Watampone, 22 Juni 2020
KEPALA,

Drs. MUHAMMADAKBAR, MM
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone di Watampone.
3. Kepala Badan Pensiitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
4. Para Camat Se- Kabupaten Bone Bersangkutan di Tempat
5. Arsip.



SRN C00003651

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PEHANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Sdowango No. 2 Tlp. 0434-2543 Watasoppeng 90812

IZIN PENELITIAN

Nomor : 144/IP/DPMP/TKT/VI/2020

DASAR: 1. Surat Permohonan: **SYAPARUDDIN** Tanggal **23-06-2020**
2. Rekomendasi dari **BAPELITBANGDA**
Nomor **144/IP/REK-T.TEK/IS/BAP/VI/2020** Tanggal **23-06-2020**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **SYAPARUDDIN**

UNIVERSITAS/ : **IAIN BONE**

LEMBAGA

Jurusan : **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

ALAMAT : **JL. A.SAMBALOGI BARU, DESA MASUMPU, KABUPATEN BONE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian :

JUDUL PENELITIAN : **KONSTRUKSI SOSIAL-KEAGAMAAN ATAS PENGUATAN KETAHANAN PANGAN DI DAERAH (STUDI TENTANG STABILITAS KETERSEDIAAN PANGAN DI KAWASAN BOSOWASI)**

LOKASI PENELITIAN: **DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN**

JENIS PENELITIAN : **PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL**

LAMA PENELITIAN : **22 Juni 2020 s.d 22 November 2020**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung dan dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan - undangan

Ditetapkan di : Watasoppeng

Pada Tanggal : 24-06-2020

An. **BUPATI SOPPENG**
KEPALA DINAS



ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M

Pangkat : **PEMBINA TK I**

NIP. : **19700518 199803 1 007**

Biaya: Rp. 0,00



SRN CO 0001143

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 33, Sengkang (90915), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Tlp/Fax (0486) 323549
Website : dpmptsp.wajokab.go.id, Email : dpmptsp.wajokab@gmail.com

IZIN PENELITIAN / SURVEY
Nomor: 1143/IP/DPMPTSP/2020

Membaca : Surat Permohonan **SYAPARUDDIN** Tanggal: **23-06-2020**
Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

2. Peraturan Bupati Wajo Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo

Memperhatikan : 1. Surat Ketua LPPM IAIN Bone Nomor: B-72/IN.33/TL.00/6/2020 Tanggal 16 Juni 2020 Perihal: Permohonan Izin Penelitian

2. Rekomendasi Tim-Teknis Nomor **00374/IP/TIM-TEKNIS/VI/2020** Tanggal **24-06-2020** Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

Menetapkan : Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY kepada :

Nama : **SYAPARUDDIN**
Tempat / Tgl Lahir : **BONE, 20 DESEMBER 1968**
Alamat : **WATAMPONE, BONE**
Universitas/
Lembaga : **IAIN BONE**
Judul Penelitian : **KONSTRUKSI SOSIAL KEAGAMAAN ATAS PENGUATAN KETAHANAN PANGAN DI DAERAH (STUDI TENTANG STABILITAS KETERSEDIAAN PANGAN DI KAWASAN BOSOWASTI)**

Lokasi Penelitian : **DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PUSAT-PUSAT KETAHANAN PANGAN DI WAJO**

Lama Penelitian : **23 JUNI 2020 s/d 23 NOVEMBER 2020**

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian / Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
2. Peneliti tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah
3. Menjalani semua undang-undang yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat

Ditandatangani di : Sengkang
Tanggal : 24 Juni 2020



Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.
Pangrehat : **PEMBINA UTAMA MUDA**
NIP : **19651128 199002 1001**

- Tembusan:
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Wajo
 2. Kepala Instansi Tempat Penelitian
 3. Camat Setempat
 4. Pertinggal

No. R eg: **0367/IP/DPMPTSP/2020**

Retribusi : Rp.0,00



1 2 0 2 0 1 9 0 0 9 0 0 0 1 7 9

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jalan Persatuan Raja No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai. Telpun : (0482) 21069 Fax: (0482) 22450 Kode Pos : 69512 Kabupaten Sinjai

Yth.

Nomor : 0599/16/01/DPM-PTSP/VI/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab Sinjai
2. Kepala MUI Kab. Sinjai
3. Pimpinan Pusat-Pusat Pengembangan Pangan Kab. Sinjai

Di
Tempat

Berdasarkan Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIM Kab. Bone, Nomor: B-71/In.33/L.1/TL.00/6/2020, Tanggal 16 Juni 2020 Perihal Penelitian.

Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama : Dr. SYAPARUDDIN, S.Ag, M.Si
Tempat / Tanggal Lahir : Bone/20 Desember 1968
Nama Perguruan Tinggi : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BONE
NIM : 2020126801
Program Studi : EKONOMI SYARIAH
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. A. Sambaloge Baru, Kel./Desa Masumpu, T. Riattang,Kabupaten Bone

Bermaksud akan Mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Seudtra Dalam Rangka Penyusunan Skripsi/Tesis/Desertasi, Dengan Judul: KONSTRUKSI SOSIAL KEAGAMAAN ATAS PENGUATAN KETAHANAN PANGAN DI DAERAH (STUDI TENTANG STABILITAS KETERSEDIAAN PANGAN DI KAWASAN BOSOWASI)

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 22 Juni s/d 22 November 2020
Pengikut : ANDI NUZUL

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas;
 2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata kepentingan pengumpulan data;
 3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adab istiadat setempat;
 4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
 5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
Pada tanggal : 22 Juni 2020

a.n. **BUPATI SINJAI**
KEPALA DINAS,



LUKMAN DAHLAN, S.IP, M.SI
Pangkat : Pembina Tk I / IVb
NIP : 197011301990031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
2. Rektor IAIM Kab. Bone di Bone
3. Yang Bersangkutan (Dr. Syarifuddin, S.Ag, M.Si)
4. Arsip

CV PENELITI

Dr. Syaparuddin, S.Ag., M.SI.	Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum.
 <p>ID Peneliti: 202012680102241, Jenis Kelamin: Laki-laki, NIDM: 202012680, Dosen Tetap (PNS) pada Prodi Ekonomi Syariah (S2) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bone, Sulawesi Selatan. Menyelesaikan Program Sarjana S1 (Muamalah) di IAIN Alauddin Ujung Pandang, Program Magister (S2 Keuangan dan Perbankan Syariah) dan Program Doktor (S3 Ekonomi Islam) di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain mengajar dan menulis buku dan artikel jurnal (ID Scopus: 57203352312 dan ID Sinta: 6665992), juga aktif dalam berbagai pertemuan dan kegiatan ilmiah dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam (lokal, nasional dan internasional), penelitian ilmiah dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam, dan juga aktif di berbagai kegiatan organisasi profesi, kemasyarakatan, dan keagamaan.</p>	 <p>ID Peneliti: 2030231340597, Jenis Kelamin: Laki-laki, NIDM: 2031126309, Guru Besar (Profesor) Ilmu Hukum pada Prodi Hukum Tata Negara (S2) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bone, Sulawesi Selatan. Menyelesaikan Program Sarjana S1 (Hukum Islam) di Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ujung Pandang, Program Sarjana S1 (Ilmu Hukum) di Fakultas Hukum UMI Ujung Pandang, Program Magister (S2 Ilmu Hukum) di Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, dan Program Doktor (S3 Ilmu Hukum) pada Pascasarjana Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Selain mengajar dan menulis buku dan artikel jurnal, juga aktif dalam berbagai pertemuan dan kegiatan ilmiah dalam bidang hukum (lokal, nasional dan internasional) baik sebagai narasumber maupun sebagai peserta. Selain itu, juga aktif dalam penelitian ilmiah bidang hukum, serta aktif di berbagai kegiatan organisasi profesi, kemasyarakatan, dan keagamaan.</p>